



## Hidup dalam Kepungan Industri Smelter; Ekspansi Kapital, Krisis Sosial-Ekologi dan Perlawanan Warga

Laporan Hasil Asesmen Pltu Captive dan Kawasan Industri-Smelter Bantaeng

*Ekonomi-Politik Transisi Energi Indonesia*

Agung Raka Pratama, Abrisal, Deni, Fahmi, Irwanto, Imamul Hak, Riswan, Suherman, Wiranto Mappe

# Dewan Redaksi

## **Pimpinan Redaksi**

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

## **Redaksi Pelaksana**

Eko Cahyono, M.Si.

## **Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Dian Yanuardy (Dewan Pengurus Sajogyo Inti Utama)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Ahmad Jaetuloh, S.IP (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



**Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia**

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: [eksekutif@sajogyo-institute.org](mailto:eksekutif@sajogyo-institute.org)

## **Tentang Sajogyo Institute**

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan badan pelaksana Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Website: <https://sajogyo-institute.org>

## **Tentang Cita Tanah Mahardika**

Cita Tanah Mahardika merupakan organisasi masyarakat sipil berbentuk Perkumpulan dan bersifat non-profit (nirlaba) yang dibentuk dengan kesadaran akan pentingnya membangun suatu gerakan sosial yang dipadu dengan; riset, pengorganisasian, dan pendidikan kritis untuk mendorong proses transformasi sosial. Website: <https://citanahmahardika.org>

## **Tentang Perkumpulan Oase**

*An Organization for Action on Social and Environmental issues* atau disebut Oase didirikan pada 2016 di Bantaeng dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Oase hadir sebagai lembaga nirlaba yang bergerak pada bidang pengorganisasian, penelitian, advokasi kebijakan untuk keadilan ruang/agraria, kemandirian dan kedaulatan desa dan keadilan sumber daya alam.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 4, Nomor 1, Januari 2025

© 2025, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

## **Usulan Pengutipan:**

Agung Raka Pratama, Abrisal, Deni, Fahmi, Irwanto, Imamul Hak, Riswan, Suherman, Wiranto Mappe. “Hidup dalam Kepungan Industri Smelter; Ekspansi Kapital, Krisis Sosial-Ekologi dan Perlawanan Warga”. Working Paper Sajogyo Institute (Vol. 4, No. 1, Januari 2025). Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Para penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Energi Kotor Batu Bara dan Pembangunan Kawasan Industri di Bantaeng .....	4
<b>KONTEKS KAMPUNG</b> .....	<b>15</b>
A. Sejarah Kampung, Awal Mula Penguasaan Lahan dan Warisannya .....	15
B. Kawasan Industri Bantaeng: Reorganisasi Ruang di Pedesaan Pajjukukang ....	24
<b>REORGANISASI RUANG HIDUP: PERUBAHAN AGRARIA DAN PERAMPASAN TANAH SETELAH ADANYA KAWASAN INDUSTRI BANTAENG (KIBA)</b> .....	<b>31</b>
A. Pola Perampasan tanah di KIBA: ‘Membujuk’ para Tuan Tanah – ‘Memaksa’ Pemilik tanah yang bertahan.....	31
B. Fase Beroperasinya Perusahaan: Beragam Pandangan Warga .....	37
C. Bangkit dan Redupnya Perlawanan.....	42
D. Dampak-Dampak Sosial Ekologis oleh Pabrik Smelter .....	48
<b>ISU PERBURUHAN: MENCIPTAKAN TENAGA KERJA INDUSTRIAL DAN CADANGAN BURUH YANG MELIMPAH PADA KIBA</b> .....	<b>58</b>
A. Bagaimana Orang-Orang Terserap dan Tidak Terserap ke Dalam Perusahaan .	61
B. Potret Alur Produksi dan Kondisi Kerja Buruh Smelter .....	64
<b>KONTRADIKSI-KONTRADIKSI SMELTER: HIDUP SEPERTI PENGUNSI DAN JANJI-JANJI KORPORASI KIBA</b> .....	<b>75</b>
A. Alasan Bertahan dan Perasaan Mendalam Warga .....	75
B. Beragam Artikulasi Perlawanan dan Kepentingan .....	81
<b>PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>90</b>

## ABSTRAK

Studi ini merupakan hasil belajar lapang tentang ekonomi politik korporasi energi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Industri utama yang beroperasi adalah industri pengolahan nikel atau Smelter. Sebagai suatu studi belajar permulaan, kajian lapangan yang dikombinasikan dengan studi literatur (*desk study*) ini berupaya memahami bagaimana kegelisahan warga setelah Kawasan Industri Bantaeng beroperasi. Banyak letupan kemarahan dan penyesalan yang kami dengar dari warga sekitar KIBA. Warga marah karena polusi sangat parah, menyesal karena dipaksa melepas tanah untuk perusahaan.

Pola perampasan tanah bisa dilihat dengan dua cara; pertama, membujuk para pemilik tanah luas. Kedua, menutup akses 'menjepit' lahan warga yang bertahan dengan membangun tembok pabrik di sekelilingnya. Tidak berhenti di situ, studi ini juga berupaya melihat jauh ke masa lalu sebelum keberadaan KIBA. Terutama bagaimana sejarah kampung dan penguasaan tanah, sehingga kondisi itu ikut membentuk model penguasaan atas tanah yang sangat timpang di awal. Ada tuan tanah dengan kepemilikan luas dan warga yang statusnya sebagai penggarap, hingga yang penguasaannya kecil-kecil. Struktur sosial agraria lama ini sangat berpengaruh pada fase pembebasan tanah untuk KIBA dan untuk korporasi Huadi Group.

Studi ini juga mempelajari sedalam apa krisis sosial ekologi yang muncul sebagai dampak atas polusi air, udara, suara bagi warga dan lingkungannya. Kami merekam perasaan mendalam warga yang terdampak karena bertahan di dalam kawasan. Situasi di pesisir juga terdampak. Para nelayan kecil dan pembudidaya rumput laut, serta perempuan mengeluhkan mata pencaharian dari rumput laut semakin menurun secara tajam. Isu perburuhan juga berupaya kami dalami, tentang situasi dan pembagian kerja, pengupahan, pola perekrutan hingga kondisi kerja para buruh.

Metode pengumpulan data lapangan adalah observasi, lalu wawancara mendalam kombinasi dengan survei mendengar, untuk memahami perasaan mendalam informan. Waktu pengumpulan data lapangan sebanyak dua minggu pada bulan Agustus. Ada tiga Desa yang jadi titik pengumpulan data, yaitu: Papanloe, Barang Loe, dan Baruga, semuanya berlokasi di Kecamatan Pajjukukang, Bantaeng.

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Transisi energi dari penggunaan bahan bakar fosil ke sumber terbarukan (*renewable energy*) dan lebih ramah terhadap lingkungan merupakan agenda mitigasi atas perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon secara global. Agenda penting ini adalah suatu upaya mitigasi atas perubahan iklim dan meningkatnya emisi karbon secara global. Upaya Transisi Energi juga berasal dari suatu kajian Panel antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang menunjukkan bahwa sumber Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar berasal dari sektor energi (34%), lalu industri (24%), disusul kegiatan di sektor pangan, alih fungsi lahan, dan kehutanan (22%), sektor transportasi (15%), dan bangunan (6%). Jadi transisi energi adalah upaya mengendalikan 49% (energi dan transportasi) sumber gas rumah kaca upaya (Whardana, 2023).

Pada tahun 2022, Indonesia menjadi presidensi kegiatan dengan “Transisi Energi” menjadi salah satu dari 3 isu prioritas yang akan dibahas di dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Langkah ini dijadikan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berkontribusi di kancah internasional untuk berperan dalam krisis iklim (Rizky et al., 2024). Pada forum ini, Indonesia meluncurkan dua skema atau inisiatif Transisi Energi: *Energy Transition Mechanism* (ETM) dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Dua langkah inisiatif Indonesia ini akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar, ETM diperkirakan akan mengalokasikan dana sebesar 500 juta dolar A.S dan memobilisasi dana sebesar 4 miliar dolar A.S, sementara JETP akan menjalankan dana awal di kisaran 20 miliar dolar A.S untuk tiga sampai lima tahun ke depan demi menuju penerapan energi terbarukan di Indonesia (Prasetyo et al., 2023). Setahun kemudian, pada tahun 2023, Indonesia meluncurkan sekretariat JETP. Dukungan ini dimanfaatkan Indonesia sebagai salah satu bentuk konkrit Transisi Energi oleh pemerintah adalah dengan mempercepat elektrifikasi kendaraan listrik (Riyanto et al., 2024).<sup>1</sup> Masalahnya adalah, JETP, sebagai perjanjian kerja sama Indonesia dengan negara-negara Group of seven (G7), ditargetkan untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Di kutip dalam satu bagian tulisan dalam buku yang ditulis oleh Ruthmedy Jemima Nathemia dengan judul “Greenwashing Dalam Transisi Energi: Solusi Hijau tidak Se hijau yang Di iklankan.”

34% energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Ditambah juga oleh minimnya transparansi terkait komposisi pembiayaan proyek Transisi Energi, 81% komposisi pendanaan proyek ini bersifat utang (Riyanto et al., 2024).<sup>2</sup> Seperti pengalaman di negara Afrika Selatan, menurut JATAM, dari total biaya investasi kemitraan sebesar 8,455 miliar dolar, komposisi investasi proyeknya adalah 96 persennya merupakan pinjaman konsesional-pinjaman komersial dan jaminan hutang, hanya 4 persen yang berbentuk hibah. Sebagian besar investornya berasal dari negara-negara Eropa. Akibatnya badan usaha kelistrikannya mengalami krisis yang mendalam.<sup>3</sup>

Fakta lainnya ditunjukkan dalam studi Trend Asia berjudul “Ambiguitas versus Ambisi; Tinjauan Kebijakan Transisi Energi Indonesia” yang dirilis 2023 lalu, saat ini bauran energi nasional separuhnya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru bara. Dengan kondisi tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia juga berasal dari mandat dari proyek transisi energi JETP yang harus mengurangi emisi dari sektor energi untuk mencapai target bauran energi terbarukan sampai 34%, sementara pemerintah hanya menargetkan 23,4% hingga 2030. Dengan begitu pemerintah dituntut untuk melakukan perombakan regulasi energi nasional agar bisa selaras dengan komitmen yang telah disepakati. Mampukah target itu tercapai di tengah tumpang tindih kebijakan dan target-target yang tidak selaras di antara kementerian?

Proyek besar dan ambisius Indonesia dalam skenario transisi energinya sangat rancu dan ambigu. Untuk membuktikannya, kita coba lihat dari salah satu regulasi pemerintah yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022,<sup>4</sup> mengatur tentang moratorium pembangunan PLTU baru yang di dalamnya tercantum pasal pengecualian untuk pembangkit bersifat *captive* atau PLTU *Captive* yang terintegrasi dengan industri atau terdaftar pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan catatan, *Captive Power* atau PLTU *captive* untuk kepentingan industri masih bisa dibangun selama mereka berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi

---

<sup>2</sup> Di kutip dalam satu bagian tulisan dalam buku yang ditulis oleh Pradnya Wicaksana dengan judul “Menghijaukan Kekacauan: Legalisme Liberal dan Ambiguitas Transisi Energi di Indonesia.”

<sup>3</sup> Jatam.org (2023). “JETP Indonesia: Kemitraan Eksploitatif untuk Jawaban yang Keliru atas Krisis Iklim”, <https://jatam.org/id/lengkap.php?slug=jetp-indonesia-kemitraan-eksploitatif-untuk-jawaban-yang-keliru-atas-krisis-iklim>.

<sup>4</sup> Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Perpres ini mengatur tentang moratorium pembangunan PLTu baru di luar yang telah ditetapkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

GRK minimal 35% dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak beroperasi. Masalah mendasarnya tidak hanya pada regulasi yang ambigu tersebut. Bagaimana dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan, baik pembangkit *captive* maupun industri pengolahan mineral yang dilayaninya? Dengan mekanisme apa kerusakan-kerusakan ekologis yang mendalam sebagai dampak penggunaan energi fosil, baik berupa infrastruktur dan teknologi yang telah beroperasi saat ini mampu dipulihkan? Apakah watak politik-ekonomi pemerintah saat ini sudah menunjukkan kesadaran untuk mewujudkan transisi energi terbarukan, bersih dan berkeadilan jika elit-elit politiknya serta para pengambil keputusan semuanya bagian dari oligarki yang berkuasa dan kaya dari bisnis energi kotor? Ataukah proyek transisi Energi ini hanya dipakai untuk memperbaiki citra Indonesia di kancah global, sembari meraup rente dari skema kerja sama pendanaan yang dibiayai oleh utang?

Tentu saja, studi ringkas ini tidak untuk menjawab kompleksitas persoalan tata kelola energi di atas. Kendati demikian, proyek besar dan ambisius itu telah berdampak besar pada situasi peDesaan saat ini. Salah satunya dapat dilihat dari ditetapkannya beberapa lokasi ke dalam Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) melalui Peraturan Daerah Bantaeng tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2032 yang mencakup dua kecamatan; Pajjukukang dan Gantarangkeke. KIBA adalah salah satu proyek PSN yang dayanya juga dilayani oleh PLTU. Rencana PLTU di KIBA sendiri belum terbangun sejak adanya penolakan warga pada 2014 silam. PLTU yang melayani KIBA adalah PLTU Punagaya yang distribusinya difasilitasi oleh PLN dengan pembangunan gardu-gardu induk di kawasan.

Dengan demikian, studi permulaan ini berupaya menampilkan suatu kondisi atau fakta lapangan tentang bagaimana suatu proyek kapitalis yang bekerja dalam relasi PLTU *Captive* di Punagaya, Jeneponto melayani pasokan energi suatu korporasi besar yang mengolah mineral (smelter nikel) di dalam Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan. Di samping itu, yang terasa sangat menyedihkan lagi adalah sejumlah temuan-temuan di lapangan. Kami mendapati jejak-jejak krisis sosial ekologis yang disebabkan baik di PLTU Punagaya maupun di pabrik smelter KIBA. Hasil belajar lapang ini tidak hanya melihat fenomena saat ini, kami juga melihat jauh ke belakang untuk memahami latar sosial, kultural, dan relasi yang bekerja sebelum ada kawasan dan smelter nikel. Juga berupaya memahami sistem penguasaan



agraria macam apa yang bekerja sebelum adanya KIBA. Sehingga studi ini mampu menjawab pertanyaan; berdiri di atas relasi macam apa smelter dan KIBA? Apa dampak-dampak sosial dan ekologisnya? Dan bagaimana respon warga atas beroperasinya teknologi kapital semacam ini? Kontradiksi-kontradiksi seperti apa yang muncul?

Sebagai gambaran, studi ini sedapatnya memberikan penjelasan yang secara berurutan untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang kami ajukan. Bagian awal, tulisan ini berfokus pada penjelasan terkait sejarah kemunculan KIBA yang berkaitan-kelindan dengan sejarah kampung dan hubungan agraria sebelum KIBA. Bagian kedua, penjelasan berpusat pada proses dan mekanisme yang bekerja dalam reorganisasi ruang hidup di Pajjukukang setelah ditetapkan sebagai kawasan industri—yang di antaranya mencakup: pola perampasan tanah, beragam cara pandang warga yang muncul setelah beroperasinya perusahaan smelter di KIBA, bangkit dan redupnya perlawanan, serta dampak-dampak sosial-ekologis yang muncul akibat operasi perusahaan smelter di KIBA. Ketiga, secara garis besar membahas isu-isu perburuhan diantaranya: bagaimana orang-orang terserap dan tidak terserap sebagai buruh perusahaan dan potret alur produksi dan kondisi kerja buruh perusahaan smelter di KIBA. Keempat, bentuk-bentuk kontradiksi smelter yang menjelaskan dua hal: alasan bertahan dan perasaan mendalam warga serta beragam artikulasi perlawanan dan kepentingan yang muncul. Dan terakhir (kelima) berisi kesimpulan dan rekomendasi dari studi ini.

## **B. Energi Kotor Batu Bara dan Pembangunan Kawasan Industri di Bantaeng**

Kehadiran pabrik pengolahan nikel Huadi Group di Bantaeng, tidak terlepas dari Penetapan Kabupaten Bantaeng sebagai kawasan industri dan masuk sebagai salah satu prioritas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk pasokan energinya disediakan oleh PLTU Punagaya dan Jeneponto, yang letaknya di Kec. Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Bagian ini akan melihat relasi ekonomi politik antara proyek-proyek energi ini saling terhubung secara kapital dan tidak hanya dalam hal pasokan daya listriknya melainkan juga tentang bagaimana dampaknya secara sosial ekologis yang daya rusaknya menyebabkan krisis mendalam terhadap kehidupan warga dan lingkungan di sekitarnya.

## Cerita Tentang Kawasan Industri Bantaeng dan Smelter Nikel

Bantaeng adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 395.83 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh sekitar 123 km dari kota Makassar. Wilayah ini terdiri dari delapan kecamatan, 46 Desa dan 21 kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 178.699 jiwa.<sup>5</sup> Daerah ini mulai bersinar sejak dipimpin oleh Bupati Nurdin Abdullah, dengan alasan pada dua periode memimpin daerah (2008-2013 dan 2013-2018), banyak melakukan perubahan terutama pembangunan infrastruktur di daerahnya. Selain lokasi Pantai Marina sebagai hasil reklamasi, terdapat juga Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang dibangun di Kecamatan Pajjukukang.



Gambar 1. Cerita Tentang Kawasan Industri Bantaeng dan Smelter Nikel

Inisiatif pembangunan KIBA pertama kali digencarkan pada tahun 2012 melalui Peraturan Daerah Bantaeng Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2032. Total luasan wilayah KIBA sebesar 3.128 Ha, yang mencakup dua kecamatan; Pajjukukang dan Gantarang Keke, dan enam Desa; Pajjukukang, Borong loe, Papanloe, Baruga, Nipa-nipa dan Layoa. Perkiraan penduduk dalam kawasan sebanyak 25.223 jiwa.

<sup>5</sup> Sulselprov.org.id (2024) "Deskripsi Daerah Kabupaten Bantaeng", [https://sulselprov.go.id/kota/des\\_kab/1](https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/1)

Ditetapkannya Pajjukukang sebagai daerah industri, sebetulnya tidak terlepas juga dengan promosi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pemerintah waktu itu, mengatakan bahwa ketika Pajjukukang ditetapkan sebagai wilayah industri, maka lapangan pekerjaan akan terbuka lebar dan pasti menguntungkan masyarakat setempat. Iming-iming ini, sedikit banyak telah memberi harapan pada warga, apalagi dengan situasi sumber penghidupan seperti pertanian, laut, dan bata merah—yang produktivitasnya semakin menurun.

Menanggapi situasi ini, salah seorang nelayan memberitahu kami sedikit rasa kekecewaannya terhadap pemerintah atas kenyataan yang terjadi hari ini. Menurutny, industri yang membuka lapangan pekerjaan memang adalah harapan besar bagi warga untuk memperbaiki nasib, tetapi krisis lingkungan, seperti polusi udara yang ditimbulkannya kian menyiksa banyak warga. Baginya, akan lebih baik jika perusahaan datang membuka lapangan pekerjaan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Selain itu, ia juga bercerita tentang sosok pemerintah waktu itu, Nurdin Abdullah (NA). Menurutny, ambisi NA dalam menetapkan Pajjukukang sebagai kawasan industri tidak terlepas dari pengaruh politiknya di Pajjukukang. Dalam dua periode kepemimpinan Nurdin, Pajjukukang selalu menjadi basis politik suaranya dalam pemilu. Dalam dua periode itu pula, ia selalu menang 80% lebih suara yang ia peroleh. Atas dasar itu, ia beranggapan bahwa hal tersebut membuat NA semakin percaya diri dan optimis dalam menyediakan tanah bagi industri yang akan masuk di Pajjukukang. Apalagi, basis politik NA, yang masih militan sampai saat ini kebanyakan dari mereka yang kerap disebut sebagai “Orang yang didengar di kampung”. Cerita mendalam tentang bagaimana dan kenapa warga terpaksa menjual tanah ke perusahaan akan diulas di bab lain.



**Gambar 2. Identitas Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KIBA di bawah payung Huadi**

Terhitung sejak perolehan izin untuk membangun perusahaan smelter pada tahun 2014, salah satu perusahaan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia – HNAI, telah membangun perusahaan smelter di pesisir Bantaeng. Perusahaan yang 51% sahamnya dimiliki Shanghai Huadi Industrial, Ltd tersebut kemudian memulai proses konstruksinya pada tahun 2015. Pendirian perusahaan pengolahan smelter lainnya di Kawasan Industri Bantaeng menyusul pada tahun 2021, seperti Hengsheng New Energy Material, Unity Nickel-Alloy Indonesia, dan Dowstone Energy Material.

Dalam kaitannya dengan industri energi dan nikel di Indonesia, China menjadi aktor dominan dalam mengalokasikan investasi langsung maupun dengan skema *loan*. Investasi langsung melalui Penanaman Modal Asing (PMA) diwujudkan melalui skema *Joint Venture* atau melalui kerja sama perusahaan China dan perusahaan domestik. Sejak beberapa tahun belakangan ini, investasi Tiongkok di Sulawesi Selatan kian semakin mencekam. Salah duanya dapat dilihat dari kehadiran industri smelter dan pembangunan PLTU di dua kabupaten, Jeneponto dan Barru. Kehadiran para investor Tiongkok, tentu tak dapat dilepaskan dari berbagai sistem ekonomi politik yang menjadi penopangnya, termasuk dengan hadirnya kebijakan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia. Di KIBA terdapat 4 perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel yang terafiliasi dengan China melalui skema *Joint Venture*. *Pertama*, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI) yang beroperasi sejak 2014. Perusahaan ini terdiri atas Shanghai Huadi Industrial, Ltd sebagai pemegang saham 51% dan Duta

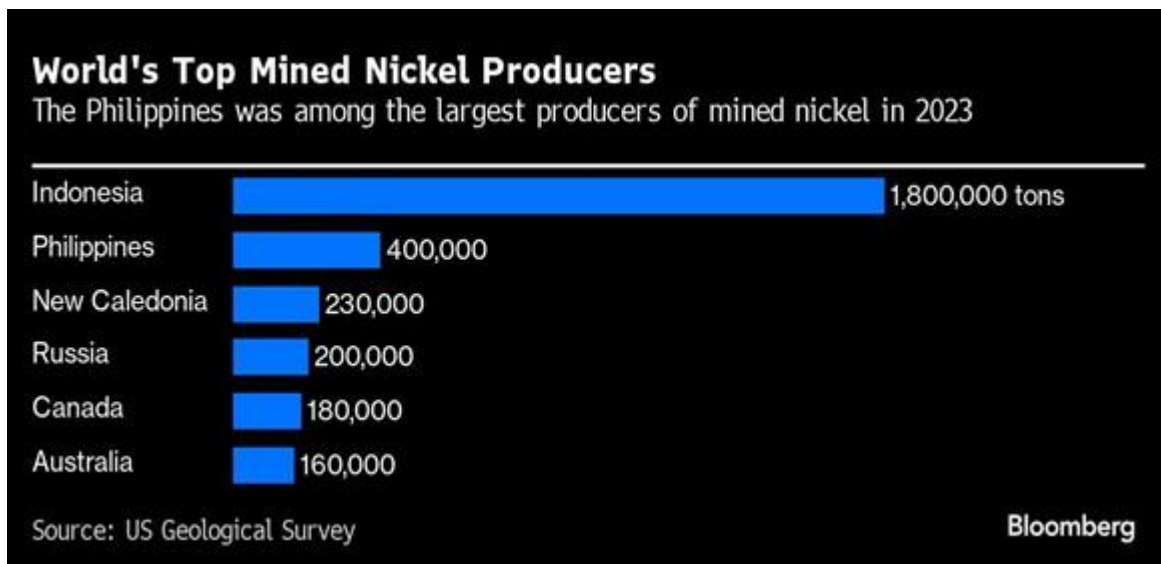
Nikel Sulawesi 49% atas saham PT HNI. PT HNI bergerak pada bidang pengolahan dan pemurnian nikel dan menghasilkan feronikel.

Kedua, Hengsheng New Energy Material yang didirikan pada 2021. Pemegang saham di antaranya Hainan Recycore New Energy Co.Ltd sebesar 50%, Huadi Investment Group 20%, Shengwei New Energy Pte.Ltd 15%, dan Zoomwe Hongkong New Energy Technology Co.Ltd Sebesar 15%. Hengsheng bergerak pada peleburan bijih nikel yang menghasilkan 13.000 MT nikel sulfat. Ketiga, Unity Nickel-Alloy Indonesia yang didirikan pada 2021, Pemegang saham diantaranya Huadi Investment Group sebesar 50%, Wang Jueqin 15%, Li Guangda 15%, Zang Lei 15%, dan Zheng Xuanwei sebesar 15%. Unity Nickel-Alloy bergerak pada peleburan bijih nikel yang menghasilkan 200.000 MT feronikel. Keempat, Dowstone Energy Material yang juga didirikan pada 2021, Pemegang saham diantaranya Amir Jao sebesar 99% dan Joss Stefan Hideky sebesar 1%. Dowstone Energy Material bergerak pada peleburan bijih nikel yang menghasilkan 13.000 MT nikel matte.

Pendirian perusahaan-perusahaan smelter ini dianggap oleh pemerintah sebagai upaya mendorong hilirisasi nikel yang bertujuan untuk memberi nilai tambah pada produk nikel, memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta pembukaan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat di daerah. Hilirisasi ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan nilai rantai pasok produksinya dari hulu ke hilir.<sup>6</sup> Di Kawasan Industri Bantaeng, produk akhir di hilir didominasi oleh pengolahan biji nikel ke feronikel yang tujuan ekspornya adalah ke China.

---

<sup>6</sup> Esdm.go.id (2020). "Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>



**Gambar 3. Produsen Tambang Nikel Teratas Dunia**

Kehadiran perusahaan smelter di Bantaeng tentu tak lepas dari sorotan publik. Protes dan kritik silih bergantian dilayangkan kepada perusahaan dari masyarakat sipil, utamanya masyarakat terdampak proyek ini. Sementara itu, berbagai ornop (lokal-nasional) juga tak tinggal diam, mulai dari melakukan pendampingan pelanggaran HAM dan melakukan sejumlah riset sebagai bagian dari gelombang perlawanan terhadap perusahaan smelter. Sementara itu, ada keuntungan bagi suatu Kawasan Industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain: kemudahan perizinan/non-perizinan; pembolehan untuk menerabas rencana tata ruang;<sup>7</sup> jaminan pengadaan tanah yang dianggap untuk 'kepentingan umum'<sup>8</sup>; membebaskan kewajiban pemberian royalti apabila terdapat korporasi yang ingin mengembangkan industri hilirisasi batu bara.

### **Cerita Tentang “PLTU *Captive*” - Punagaya dan Jeneponto**

Pada sore hari, kami mengitari kawasan pembangkit listrik Punagaya tujuannya untuk melihat langsung bagaimana lanskap ruang tempat PLTU ini berdiri. Kami berkeling-keliling sembari mengobservasi kampung. Setelah dirasa cukup dalam memasuki kampung, kami berhenti di dekat tungku dan *jetty* yang posisinya cukup dekat dengan pemukiman warga. Pengalaman langsung ini cukup membantu kami

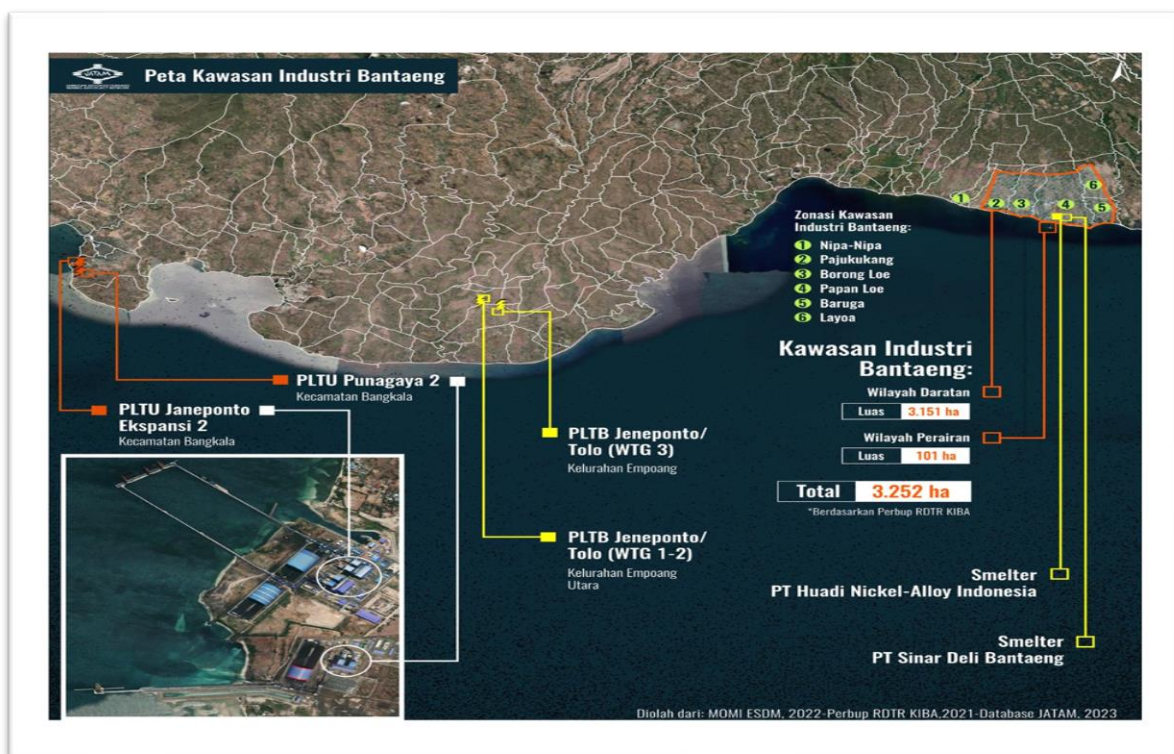
<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional (PP PSN). Pasal 8 ayat (2) jo. Ayat (3) PP PSN.

<sup>8</sup> Pasal 173 ayat (4) UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (UU Cipta kerja).



untuk menelusuri seluk beluk tentang PLTU *captive* di Punagaya sebagai pemasok energi listrik untuk kawasan industri dan Smelter di Bantaeng.

Sementara dalam ketenagalistrikan terlihat dalam proyek PLTU. Di Kabupaten Jeneponto sendiri, dalam laporan Walhi Sulsel menyebutkan terdapat dua PLTU dengan lokasi yang saling berdampingan. Pertama, PLTU Jeneponto unit I-II dan III-IV berkapasitas 2x135 MW ini dikelola oleh PT Bosowa Energi yang merupakan anak perusahaan dari induk Perusahaan PT. Bosowa Corporation. Selain itu, pada November 2017, diketahui bahwa PLTU Jeneponto telah terkoneksi langsung dengan Unit Pengatur Beban (UPB) melalui PLN Wilayah Sulselbar dan mulai mengalirkan energi listrik ke sistem Sulawesi bagian selatan (Syafaat et al., 2023). Kebutuhan listrik terbesar di Sulawesi adalah untuk listrik smelter hingga tahun 2030 mencapai 11.139 MW. (Siaran pers Kementerian ESDM, 5 Agustus 2024). Beban puncak kelistrikan di Sul-sel adalah 950 MW. Kapasitas pembangkit listrik di Sulsel sebesar 1.367 MW. Beban listrik PLN ke smelter KIBA sebesar 390 megavolt ampere (MVA).



Gambar 4. Peta kawasan industri Bantaeng dan lokasi PLTU Punagaya<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Gambar ini diambil dari media sosial Jatam, <https://threadreaderapp.com/thread/1683662759769280515.html>. Diakses pada 15 September 2024

Pembangunan PLTU Jeneponto tentu saja tidak terlepas dari pendanaan asing (Tiongkok). Hal tersebut terlihat jelas dalam penuturan Erwin Aksa, CEO PT Bosowa Energi mengatakan bahwa pembangunan PLTU Jeneponto Unit I dan II sekitar 60% dari investasi, sumber pendanaanya berasal dari lembaga keuangan asing *China Construction Bank* (CCB) dan sisanya dari sindikasi pendanaan dalam negeri.<sup>10</sup> Kedua, PLTU Punagayya atau biasa juga disebut PLTU Takalar.<sup>11</sup> PLTU Punagayya 2x100 MW, unit 1 dan unit 2 sudah beroperasi dan telah terkoneksi dengan sistem Sulsebar 150 KV. PLTU Punagayya adalah salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang termasuk dalam program pemerintah untuk pemenuhan listrik 35.000 MW. Seperti halnya PLTU Jeneponto, PLTU Punagayya juga tak lepas dari peran Tiongkok. PLTU ini dibangun melalui skema perjanjian kontrak *Engineering Procurement Construction* (EPC) antara pihak PLN dengan kontraktor EPC asal China, yaitu *Consortium of China Gezhouba Group CO, LTD* dan PT. Hutama Karya (Persero).<sup>12</sup> Skema EPC ini memberikan kewenangan perusahaan konstruksi (yang menjadi kontraktor) untuk melakukan langkah teknis dalam merancang dan menDesain proyek pembangkit listrik, penyediaan barang, hingga proses konstruksi sampai produksi dan pemeliharaan (Shalati & Simanjuntak, 2019).

Sama halnya dengan PLTU Punagayya, pembangunan PLTU Barru juga dibangun melalui skema EPC dengan menggandeng *Hubei Hongyuan Power Engineering Co Ltd*, salah satu perusahaan kontraktor China (Shalati & Simanjuntak, 2019). Melihat fenomena di atas, bisa dilihat peran besar investasi dan keterlibatan perusahaan China dalam konstruksi PLTU di Sulawesi Selatan, begitupun dengan konstruksi dan operasional industri smelter di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Peran besar China ini tidak bisa dilepaskan dari beragam model kerja sama antara Indonesia-China yang makin intens dibangun sejak periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). Pada Oktober 2013, Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Kedua negara telah menyetujui setidaknya enam aspek kerja sama yaitu industri, ekonomi, perdagangan, maritim, pariwisata, meteorologi dan klimatologi, serta luar angkasa. Pertemuan itu

---

<sup>10</sup> Beritasatu.com (2012). "Bosowa Siap Bangun PLTU Jeneponto II Senilai Rp 3,1 T", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/65459/bosowa-siap-bangun-pltu-jeneponto-ii-senilai-rp-3-1-t>

<sup>11</sup> Indonesian.cri.cn (2018). "Takalar PLTU Officially Operates", <https://indonesian.cri.cn/201/2018/02/21/222s170619.htm>

<sup>12</sup> Indonesian.cri.cn (2018). "Takalar PLTU Officially Operates", <https://indonesian.cri.cn/201/2018/02/21/222s170619.htm>



sekaligus dalam rangka promosi China atas proyek Belt and Road Initiative (BRI).<sup>13</sup> Nota kesepahaman resmi kemudian dilakukan antara kedua negara di era pemerintahan Jokowi pada *China-Indonesia Cooperation Forum: Belt and Road Initiative and Global Maritime Fulcrum* di Beijing, Tiongkok, 16 Juni 2017 (Saraswati, 2020). Kerja sama dalam koridor BRI ini secara umum mencakup kerja sama pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber energi, dan kerja sama industri (pembangunan kawasan industri).

Pada tahun 2013, China memang tengah mendorong *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai inisiatif pembangunan ekonominya sekaligus pengaruh geopolitiknya dalam lingkup global. Inisiatif ini dalam berbagai media dicitrakan sebagai proyek kerja sama antar negara-negara yang kedudukannya setara sebagai mitra dan dibingkai sebagai “*Shared Future*” bagi umat manusia.<sup>14</sup> Proyek ini juga dianggap sebagai suatu proyek ambisius China di bawah pemerintahan Xi Jinping, utamanya dalam hal kebijakan investasi ke luar negeri, terutama 7 sektor yang disasar yaitu Energi, Infrastruktur, Transportasi, Penerbangan, Logistik, Pertanian, dan Komunikasi (Riedho, 2024). Sejak awal, inisiatif ini didukung dengan pendanaan raksasa yang bersumber dari lembaga-lembaga keuangan di China. Dalam rentang waktu 2013-2015, China telah mendirikan *New Development Bank*, *Asian Infrastructure Investment Bank*, dan *Silk Road Fund* untuk menyokongnya (Anam & Ristiyani, 2018). Pengeluaran China diperkirakan mencapai USD 100 miliar per tahunnya.

*Belt and Road Initiative* kemudian digadang-gadang sebagai jalur Sutera Baru pada abad 21 dengan tiga ambisi besar pembangunan, di antaranya adalah sebagai Jalur Sutera Ekonomi, Jalur Sutera Darat dan Jalur Sutera Maritim. Inisiatif ini kemudian berkembang berbagai penjuru dunia, meliputi Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik, Asia Selatan, dan Asia Tenggara (Rakhmat & Yeta, 2023).

Menurut sebuah laporan yang dirilis Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER, 2023), sejak presiden China, Xi Jinping mengumumkan kebijakan BRI pada 2013 silam, investasi Tiongkok secara global mengalami kenaikan investasi hampir 11 kali

---

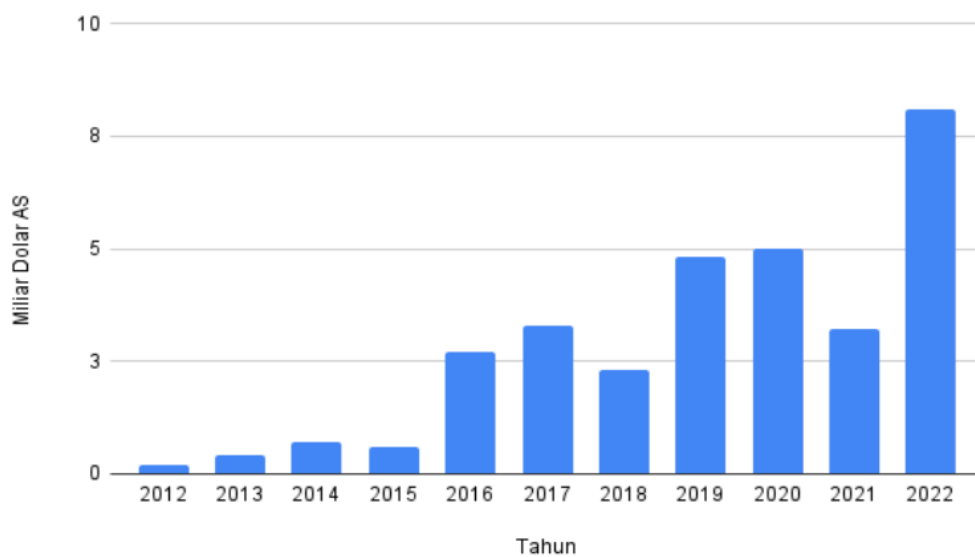
<sup>13</sup> Kumparan.com (2021). “Belt and Road Initiative di Indonesia: Perkembangan, Kritik, dan Alternatif”, <https://kumparan.com/introvert-note/belt-and-road-initiative-di-indonesia-perkembangan-kritik-dan-alternatif-1vRtw7nbzLo/4>

<sup>14</sup> Chinadailyhk.com (2023). “BRI paving the way for a community of shared future”, <https://www.chinadailyhk.com/hk/article/361050>

lipat pertahun. Argumen ini didasarkan dengan membandingkan investasi Tiongkok sebelum BRI dalam rentang tahun 2005-2013 yang hanya sebesar 467,97 miliar dolar AS dengan perkiraan rata-rata USD 85,50 milyar per tahun meningkat hingga mencapai 622,38 miliar dolar AS dengan perkiraan rata-rata sebesar USD 155,60 per tahun sepanjang 2014-2018 (Shalati & Simanjuntak, 2019).

Dalam konteks Asia Tenggara, pengaruh China lewat BRI semakin terlihat dari total investasinya senilai USD 1 triliun yang diperuntukkan pada empat negara yakni, Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Singapura. Investasi tersebut meliputi sektor pembangunan, pengembangan transportasi, tambang, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap maupun Air. Khususnya di Indonesia, investasi China terus mengalami perkembangan yang kian pesat (Shalati & Simanjuntak, 2019).

**Grafik 1. Nilai investasi China di Indonesia<sup>15</sup>**



Hingga saat ini, dalam laporan yang diterbitkan CELIOS pada tahun 2023, terdapat 14 proyek yang terbagi 4 jenis proyek antara lain; Proyek jalan dan kereta api (Kereta Cepat Jakarta Bandung Jalan Balikpapan- Samarinda), Pembangunan PLTU Batubara (PLTU Mulut Tambang Sumsel 8, PLTU Paiton Unit 9 dan PLTU Celukan Bawang), Pembangunan PLTA (Bendungan Nusa Tenggara Timur, Bendungan PLTA Batang Toru dan PLTA Sungai Kayan) dan pembangunan industri

<sup>15</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah diolah CELIOS (2023)

(Ketapang Industrial Park, Likupang Economic Zones, Morowali Industrial Park, Obi Industrial Area Proyek dan Semen SDIC) (Rakhmat & Yeta, 2023).

Tentu saja, dominasi Tiongkok melalui skema pendanaan juga berkelindan dengan program hilirisasi yang digulirkan di rezim pemerintahan Jokowi. Dengan dikeluarkannya aturan pelarangan ekspor UU No.03 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) berdampak pada massifnya pembangunan smelter di Indonesia, dengan harapan akan memberi nilai tambah pada komoditas nikel. Ambisi ini terlihat dari target operasi 30 smelter baru pada 2024, jauh lebih besar dari 2023 sebanyak 13 smelter.<sup>16</sup> Problem mendasarnya adalah, besaran investasi kapital ini hampir selalu dibarengi dengan pendalaman krisis sosial ekologis di sekitaran proyek beroperasi. Proyek PLTU di Jenepono dan Smelter di Bantaeng, tidak berjalan di atas ruang hampa atau tanah kosong, di sana ada pemukiman warga, ada penghidupan warga yang sudah dijalani selama bertahun-tahun, ada ritus dan kebudayaan yang dirusak, ada lanskap kampung yang diubah, ada lingkungan yang dirusak. Dengan kata lain proyek energi pemerintah dan swasta ini memiliki dampak-dampak sosial, ekonomi, lingkungan hingga kesehatan yang muncul sejak korporasi energi ini bekerja. Ulasan atas dampak itu akan diceritakan pada bagian selanjutnya.

---

<sup>16</sup> Jatam.org (2024). "Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi", <https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera>

## KONTEKS KAMPUNG

### A. Sejarah Kampung, Awal Mula Penguasaan Lahan dan Warisannya

Alkisah, ada seekor kerbau yang disebut *Tamba'laulung*. *Tamba'laulung* diceritakan memiliki perawakan tubuh yang besar dan memiliki tanduk panjang—yang diperkirakan hingga mencapai satu depa (atau setara dengan 1,8 m). Tak setiap waktu *Tamba'laulung* muncul di wilayah ini, ia berkeliling jauh entah kemana, begitu nenek moyang mereka mempercayai perilaku hidup *Tamba'laulung*. Saat datang, *Tamba'laulung* kerap ditemui sedang minum dan berendam dalam sebuah kubangan air, kubangan paling besar dari sekian banyak kubangan yang jumlahnya mencapai ratusan dan tersebar di kampung Papanloe—yang sampai saat ini, kubangan yang dimaksud masih eksis sampai sekarang.<sup>17</sup> Jejeran kerbau yang berukuran lebih kecil—seperti ukuran kerbau pada umumnya berbaris di belakangnya. Karena itu, *Tamba'laulung*—diyakini sebagai raja para kerbau.



**Gambar 1. Kubangan di Desa Papanloe tampak layaknya danau dan kondisi yang di tumbuhi tanaman air**

Terlepas dari cerita folklor tersebut, keberadaan kerbau menjadi satu rangkaian peristiwa sejarah yang saling terkait dengan lanskap bentang alam di wilayah ini. Sebelum menjadi perkampungan, wilayah ini hanya berupa hamparan padang sabana

---

<sup>17</sup> Kubangan yang dimaksud berada di Papanloe. Papanloe sendiri berasal dari kata *papoang* berarti kubangan dan *loe* berarti banyak. Sehingga, Papanloe dapat diartikan sebagai kampung yang memiliki banyak kubangan.



dan menjadi area penggembalaan hewan yang disebut *pallambarang*. Secara geografis, wilayah ini memiliki kontur yang sedikit berbukit dengan tanah lapang yang kering, ditumbuhi rumput liar dan pohon bambu berduri yang tumbuh tersebar di beberapa bagian—menyerupai hutan-hutan tipis. Hal itu, menarik orang-orang dari tetangga kecamatan dan kabupaten seperti Banyorang (Bantaeng) dan Gantarang (Bulukumba) untuk datang kesini menggembalakan hewan. Kerbau dan kuda mereka dibiarkan merumput—mengunyah rumput-rumput liar yang tersedia cukup. Di samping menjaga hewan gembalaan, mereka juga terlibat dalam perburuan rusa dan babi. Konon, rusa dan babi di masa itu masih lazim ditemui dan kerap bercampur dengan hewan gembalaan—masa sebelum padang sabana dicetak menjadi kebun, sawah, dan pemukiman melalui program Desa Binaan.



**Gambar 2. Peta sebaran kampung yang masuk dalam program Destamar.**

Di bawah program 'Desa Binaan' atau Desa Saptamarga (Destamar), para tentara masuk ke wilayah ini dan membuka kampung pada tahun 1969. Dari penuturan warga tempatan, kedatangan sekelompok tentara di wilayah ini tidak terlepas dari situasi politik di Indonesia pada masa itu yang belum sepenuhnya stabil akibat dari gelombang pemberontakan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII di Sulawesi Selatan. Sehingga, para tentara diutus untuk menjaga kampung, sebagai

benteng pengamanan negara terhadap berkembangnya pemahaman dan gerakan organisasi yang dianggap ‘terlarang’ pada masa itu.

Di masa sebelumnya, Sulawesi Selatan menjadi wilayah gerilyawan para gerombolan DI/TII pada masa 1950-1955, tak terkecuali di Bantaeng. Pada masa itu, untuk menghalau gerilyawan dan menumpas anggota DI/TII, pemerintah sempat mengeluarkan satu program bernama Organisasi Pagar Desa, termasuk di Bantaeng (Nirwana, 2023).<sup>18</sup> Di Bantaeng sendiri, gerilyawan DI/TII dipimpin oleh Ali A.T (Nirwana, 2023). Di Tompobulu, kecamatan yang mulanya melingkupi Desa Baruga dan Papanloe, terdapat gua yang menjadi bukti jejak kehadiran gerilyawan DI/TII di daerah ini. Dalam gua itu terdapat batu besar yang menyerupai meja bundar, yang ketika memasuki gua tersebut ruang di dalamnya seakan seperti ruangan rapat. Masyarakat setempat meyakini bahwa gua itu menjadi tempat kumpul bagi para gerombolan dalam membahas sesuatu yang sangat penting, terutama dalam menyusun strategi dan taktik. Cerita ini kian menunjukkan bukti keberadaan DI/TII di wilayah ini.

Saat itu, program Desa binaan banyak menysasar wilayah-wilayah perkampungan yang berada di bagian timur dan menyisir daerah-daerah dekat pesisir. Beberapa kampung yang disebutkan oleh warga setempat, membentang dari arah barat ke timur di antaranya: Kampung Panrumputan, Tanetea, Sabbanyang, Borong Loe, Papanloe, Baruga hingga Layoa. Program ini dengan demikian dapat dilihat sebagai upaya pengamanan negara melalui tentara di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Bantaeng. Dalam praktiknya para tentara banyak mensosialisasikan dan melakukan ‘pembinaan’ kepada warga dan ex-DI/TII terkait organisasi-organisasi yang dianggap kontra terhadap NKRI dan Pancasila. Salah duanya yang disebutkan oleh warga di kampung adalah DI/TII dan PKI.

Para penggembala yang datang dari luar kampung mengalami dampak langsung setelah program ini dijalankan. Tentara mulai melarang aktivitas penggembalaan di daerah ini. Kuda dan kerbau yang mulanya merumput bebas, dipulangkan ke kampung asal oleh pemiliknya. Kerbau dan kuda yang masih

---

<sup>18</sup> Organisasi Pagar Desa (OPD) merupakan salah satu organisasi yang dihimpun dari masyarakat sipil yang dibentuk pada 19 Maret 1955, berdasarkan keputusan bersama no. 319/VI/55 antara Gubernur Lanto Daeng Pasewang sebagai kepala daerah Sulawesi Selatan dan Panglima Ter. VII/WIRABUANA Kolonel Warouw sebagai bagian pemulihan keamanan.

berkeliranan, ditembak langsung oleh tentara. Tentara adalah pihak yang berkuasa pada masa itu.

Lebih jauh, kekuatan politik mereka juga ditandai dengan kedudukan para tentara sebagai kepala pemerintahan pada masa itu. Salah satu yang disebutkan oleh warga yang kami temui adalah Pak Mattata yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di kampung. Kampung ini yang dulunya hanya 1 kecamatan, Tompobulu, dibagi ke dalam tiga wilayah oleh Pak Mattata: di Desa Layoa saat ini dulu adalah wilayah Pak Mattata (mungkin pusat administrasi Desa), di lokasi yang saat ini dikenal sebagai Papanloe hingga di ujung Panowang adalah lokasi rakyat, dan selebihnya adalah wilayah kodam. Lokasi rakyat menapaki kondisi bentang alam berupa tanah kering. Sedangkan, para tentara menguasai tanah disekitar sumber air yang disebut *Bungung Rua*, yakni sumur dengan dua mata air tanah dibawahnya. Sebagai daerah yang tergolong kering, mata air menjadi ruang hidup yang sangat penting.

Di bawah pemerintahan Pak Mattata, warga setempat kerap diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, dan membuat papan sebagai bahan bangunan perumahan tentara. Karena itu, sangat jelas perbedaan tempat mukim antara tentara dan rakyat pada masa itu. Para tentara menggunakan papan sebagai bahan bangunan, sedangkan rumah-rumah rakyat terbuat dari bambu. Dari curahan kerja tersebut, rakyat mendapat imbalan (gaji) sebagai tambahan penghasilan—di samping bertani sebagai pekerjaan utama.

Di samping itu, rentang tahun 1969-1971, orang-orang dari luar kampung didatangkan untuk membuka lahan-lahan pertanian. Kebanyakan pekerja tersebut berasal dari Jeneponto. Selain kekuatan politik untuk mengarahkan pekerja untuk membuka lahan, pihak tentara juga secara wewenang dalam membagi tanah—mengatur siapa yang dapat apa dan berapa. Rakyat mendapat bagian 1,5- 2 hektar tanah per petani. Sementara pihak tentara, dengan pangkat yang berbeda mendapat luasan yang berbeda pula; 10 hektar untuk tentara yang berpangkat perwira dan 40 hektar untuk pangkat jendral atau petinggi.

Dari segi luasan, para tentara mendapat bagian yang jauh lebih luas dari pihak rakyat. Namun pada saat periode operasi selesai, tentara-tentara mulai meninggalkan wilayah Desa binaan tersebut karena sebagian besar berasal dari luar wilayah, tanah-

tanah tersebut kemudian diperjualbelikan dan dibeli oleh warga-warga sipil. Menurut salah seorang informan sebagai keluarga yang terlibat dalam jual-beli tanah di masa itu, orang tuanya membeli tanah seluas 8 hektar dengan nilai sebesar Rp.60.000;. Kendati demikian, beberapa pihak tentara masih menetap disini dan beranak pinak. Salah satunya, adalah Pak Mattata sebagai kepala pemerintahan, dan kemudian anaknya, Abdullah Mattata, belakangan juga diketahui telah menjadi kepala Desa pertama secara defenitif di Papanloe.<sup>19</sup>

Pada masa ini, tanah garapan lebih banyak di tanami jagung. Selain jagung, mereka juga menanam jambu mete, kemiri, jeruk, pisang, kapuk, dan tebu. Konon, tebu ditanam sebagai percobaan dan terhubung dengan perusahaan tebu yang ada di Takalar. Hasil-hasil pertanian, terutama jagung akan digunakan untuk kebutuhan subsisten (konsumsi). Sebagian lainnya, akan di bawa ke pasar ramba' untuk ditukar garam dan ikan kering. Belakangan, petani juga menanam padi. Saat itu, produksi pertanian sangat bergantung pada pihak tentara dalam menyediakan alat dan sarana produksi seperti benih dan cangkul.

Kembali ke transaksi tanah, dalam tuturan orang tua di kampung—penjualan tanah meningkat sekitar tahun 1979-1981. Pemicu utama dalam proses ini adalah ketika daerah ini dilanda kemarau panjang. Dan terjadi krisis air yang cukup mendalam. Para petani terengah-engah dalam mengurus lahan akibat kekeringan. Akibatnya, banyak dari pendatang yang menjadi pemukim awal dan memiliki tanah, menjual lahan mereka kepada warga. Dan kembali ke kampung halamannya.

Kisah-kisah lampau atas penguasaan tanah, kian masih terasa hingga saat ini. Menurut informasi yang kami peroleh di lapangan, kebanyakan dari mereka yang memiliki tanah luas sekarang ini adalah keturunan keluarga tentara. Sebagian lainnya—yang bertanah luas—adalah orang-orang dari luar kampung (misalnya dari Bulukumba dan dari Bantaeng Kota) dengan pekerjaan yang beragam seperti jaksa, pengusaha dan politisi. Di samping itu, beberapa warga setempat sebagai pemilik tanah luas berasal dari keluarga bangsawan atau karaeng, politisi lokal dan pejabat pemerintah di tingkat Desa—karenanya mereka juga dikenal sebagai orang memiliki kekuatan ekonomi dan politik di tingkat kampung. Dari beragam informasi yang

---

<sup>19</sup> Abdullah Mattata pernah menjabat sebagai kepala Desa Papanloe selama dua periode (2001-2006, 2006-2011)



didapatkan saat di kampung, para kelas penguasa tersebut menguasai tanah yang jumlahnya juga beragam, mulai dari 6 hektar hingga puluhan hektar.

Sementara itu, sebagian besar warga hanya memiliki tanah yang kecil. Bahkan, beberapa yang kami temui di kampung tidak memiliki tanah sama sekali. Lebih jauh, persoalan ketimpangan penguasaan atas tanah dapat dilihat secara lebih luas di Kabupaten Bantaeng. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2023) dalam ‘Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023’ dikatakan bahwa jumlah petani gurem sebesar 58,75%. Ini berarti bahwa petani mengusahakan lahan 0,5 hektar, baik secara perseorangan maupun bersama keluarga masih tergolong tinggi. Ketimpangan atas penguasaan lahan yang berlangsung secara historis ini dapat dilihat sebagai latar sosial yang turut memperlancar masuknya ekspansi kapital perusahaan smelter di Pajjukukang.

### **Pemukim Pesisir Pajjukukang**

Di bagian selatan Desa Baruga dan Papanloe, rumah-rumah warga berjejer sepanjang kecamatan Pajjukukang. Begitupun dengan jejeran perahu-perahu ramping yang bersayap bambu (atau pipa) di dua sisi sampingnya. Namanya *lepa-lepa*, sebutan setempat untuk perahu itu. Di sini hanya ada sekitar satu-dua perahu yang berukuran lebih besar. Orang-orang di pesisir, menurut tuturan setempat, mulai bermukim sejak tahun 1960-an. Di masa itu, mereka banyak terlibat dalam mencari induk ikan terbang atau *tuung-tuung*. Masa dimana telur ikan terbang, belum menjadi incaran seperti sekarang ini, dikarenakan komoditas telur ikan terbang baru berkembang belakangan sekitar tahun 1980-an.

Saat itu, rumah-rumah belum sepadat sekarang—hanya ada empat-lima rumah. Berbeda dengan kondisi kampung sekarang ini, rumah-rumah saling berdempetan dan hanya menyisahkan sedikit ruang. Pemukim pesisir, seperti hanya pemukim dataran rendah Pajjukukang, banyak berasal dari Jeneponto. Menurut warga setempat, kedatangan pemukim awal di pesisir Pajjukukang dikarenakan sumber daya laut yang masih melimpah. Beberapa informan menyebut kedatangan orang tua mereka sekitar tahun 1980-1990an. Masa itu, mereka bisa menangkap ikan dan mendapatkan hasil yang banyak. Mereka mengambil hasil-hasil laut untuk memenuhi kebutuhan harian, serta melakukan pertukaran barang (barter) dengan orang-orang dataran tinggi atau pegunungan.

Hasil-hasil laut telah menjadi penopang roda kebutuhan rumah tangga para pemukim pesisir, dari dulu sampai saat ini.<sup>20</sup> Selain perbedaan mata pencaharian<sup>21</sup>, perbedaan lainnya dapat dilihat dari perubahan akses dan kontrol atas ruang hidup. Dari pengalaman pemukim dataran rendah, perubahan akses dan kontrol atas lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik oleh kelompok tentara di masa awal, disusul dengan konsentrasi penguasaan tanah melalui jual beli oleh orang luar dan warga setempat yang bergelar *Karaeng*. Sedangkan pemukim pesisir justru mengalami pengaturan akses dan kontrol atas ruang hidup mereka dengan adanya intervensi pasar melalui komoditas rumput laut.



**Gambar 3. Jejeran kapal-kapal nelayan di pesisir Desa Baruga, Pajjukukang**

Sebelumnya, orang-orang pesisir diketahui dapat mengakses laut secara bebas. Mencari tempat-tempat yang produktif untuk menangkap ikan di laut. Bahkan, dulunya ada satu praktik penangkapan ikan yang dilakukan secara kolektif. Pada tahun 2000-an, orang pesisir mulai mengenal rumput laut. Dalam satu informasi dari

---

<sup>20</sup> Menurut data BPS Bantaeng 2024 produksi perikanan berbasis budidaya di Pajjukukang per tahunnya sebesar 43.671.103 ton untuk budidaya laut, 127. 831 ton untuk tambak dan 51.332 ton untuk kolam ikan. Data ini belum termasuk perikanan tangkap.  
<https://bantaengkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTIjMg==/produksi-perikanan-budidaya-menurut-kecamatan-dan-jenis-budidaya.html>

<sup>21</sup> Walau pun sekarang ini, karena Desakan ekonomi pemukim dataran rendah yang berbasis pertanian juga kerap berprofesi sebagai nelayan atau petani rumput laut, begitu pun sebaliknya

warga, rumput laut awalnya didatangkan dari Bulukumba. Saat itu, belum banyak yang bertani rumput laut. Pada rentang 2005-2007, banyak dari mereka yang kemudian menanam rumput laut. Hal tersebut dipicu oleh naiknya harga rumput laut. Seingatnya, rumput laut saat itu dihargai 14 ribu rupiah per kilogram. Rumput laut juga diceritakan berdampak nyata secara ekonomi bagi warga setempat. Di masa jayanya, rumput laut memberi pendapatan yang besar bagi warga. Beberapa warga sudah bisa membeli motor dan membangun rumah batu—yang sebelumnya jarang sekali warga miliki. Dalam penggambaran warga setempat, rumah-rumah saat itu seperti gubuk.

Tetapi, kedatangan rumput laut sebagai komoditas yang menggiurkan waktu itu, berujung pada pengkaplingan laut. Untuk menanam rumput laut, mereka mematok kayu dan membentangkan tali dasar hingga membentuk petak-petak seperti persegi panjang. Keberadaan klaim itu yang kerap disebut *lokasi* kemudian menjadi penanda kepemilikan dalam arti secara *de facto*, yakni aturan yang disepakati secara sosial. Hal ini berarti bahwa, pengaturan akses dan kontrol atas laut telah bergeser dari yang mulanya bersifat umum berubah menjadi akses pribadi. Fenomena ini, dalam kajian agraria, kerap disebut sebagai proses ‘pendalaman relasi-relasi komoditas’ (Bersntein, 2019).

Pada tahun 2014, pemerintah datang dengan rencana membebaskan lahan di Desa Baruga. Rencananya lahan seluas 50 hektar itu akan digunakan untuk membangun PLTU. Beberapa informasi yang kami dapatkan mengatakan bahwa progres pembangunan PLTU saat itu sudah sampai pada tahap peletakan batu pertama yang dihadiri oleh pemerintah dan investor dari China. Dalam sebuah informasi yang dirilis oleh Liputan 6, mengatakan bahwa peletakan batu pertama itu menelan biaya hingga US\$ 1,1 miliar. Proyek pembangunan PLTU ini dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak diantaranya, BTN Power, *China Machinery Engineering Corporation* (CMEC) dan juga pemerintah daerah Bantaeng, pada Agustus 2014.<sup>22</sup>

Rencana pembangunan PLTU ini, nantinya akan mengaliri kebutuhan listrik bagi Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Namun, mendapat penolakan besar-besaran dari warga Baruga. Akibatnya, proses konstruksi tidak berjalan sebagaimana yang

---

<sup>22</sup> Liputan6.com (2014). “Perusahaan Gabungan 3 Negara Mulai Bangun PLTU di Bantaeng”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2120112/perusahaan-gabungan-3-negara-mulai-bangun-pltu-di-bantaeng>

mereka rencanakan—yang disinyalir hanya memakan waktu sekitar 8 bulan. Sementara lahan yang telah dibebaskan itu, saat ini—masih dalam keadaan kosong, tidak ada bangunan sama sekali. Karena mendapat penolakan, dalam dugaan warga setempat, pembangunan PLTU yang mulanya di Bantaeng lalu digeser ke pesisir Punagaya, Jeneponto.

Selain PLTU, pesisir Baruga saat itu akan dibangun pelabuhan sementara, atau *jetty*. Awalnya, pembangunan *jetty* akan dilakukan di Desa Baruga, tetapi karena warga menolak, pembangunan *jetty* dipindahlan ke pesisir Papanloe. Menurut salah satu informan, warga di pesisir Papanloe tidak berhasil membendung proyek pelabuhan sebagaimana pengalaman dari pesisir Baruga. Terkait penolakan, salah seorang informan juga mengatakan bahwa rencana titik pembangunan pelabuhan di Desa Baruga—sebenarnya berada di area yang diyakini keramat oleh pemukim pesisir dan kerap dijadikan sebagai tempat ritual.

Eksisnya pembangunan *jetty* di pesisir Papanloe, bukan berarti pihak perusahaan tidak mendapat perlawanan sama sekali. Banyak dari mereka yang membudidayakan rumput laut merasa terancam dengan adanya proyek tersebut, sebab pelabuhan itu akan dibangun diatas lahan budidaya rumput laut milik warga. Di sini, proyek pembangunan pelabuhan berhadap-hadapan dengan hak akses dan kontrol atas ruang laut yang bersifat privat. Meskipun, dalam paham pemukim pesisir, pihak lain hanya dapat menyingkirkan atau membatasi akses terhadap lahan budidaya ketika si pihak pemilik telah melepas hak penguasaannya atas lahan tersebut.

Namun, menurut informasi yang kami peroleh—pihak perusahaan berdalih bahwa para pemilik lahan budidaya tidak memiliki hak sama sekali atas ruang laut. Pihak perusahaan mendaku bahwa laut adalah milik negara dan tidak boleh diprivatisasi. Terlepas dari itu, dengan cara ini, pihak perusahaan mulai meredam perlawanan warga. Di sisi yang lain, pihak perusahaan juga membayar ganti rugi atas pengambilalihan lokasi rumput laut produktif dari para petani dengan harga yang tinggi, puluhan hingga ratusan juta rupiah—bergantung pada luasan lahan budidaya masing-masing petani rumput laut.

Menyikapi pelemahan atas perlawanan yang dialami warga pesisir Papanloe, serta berhasilnya perusahaan merebut lahan budidaya dan membangun pelabuhan *jetty* bongkar-muat di Papanloe, salah seorang informan dari pesisir Baruga

mengatakan “Gampang *ji* dibangun pelabuhan di Papanloe, karena *nda* bersatuarganya. Jadi gampang dibodohi.”

## **B. Kawasan Industri Bantaeng: Reorganisasi Ruang di PeDesaan Pajjukukang**

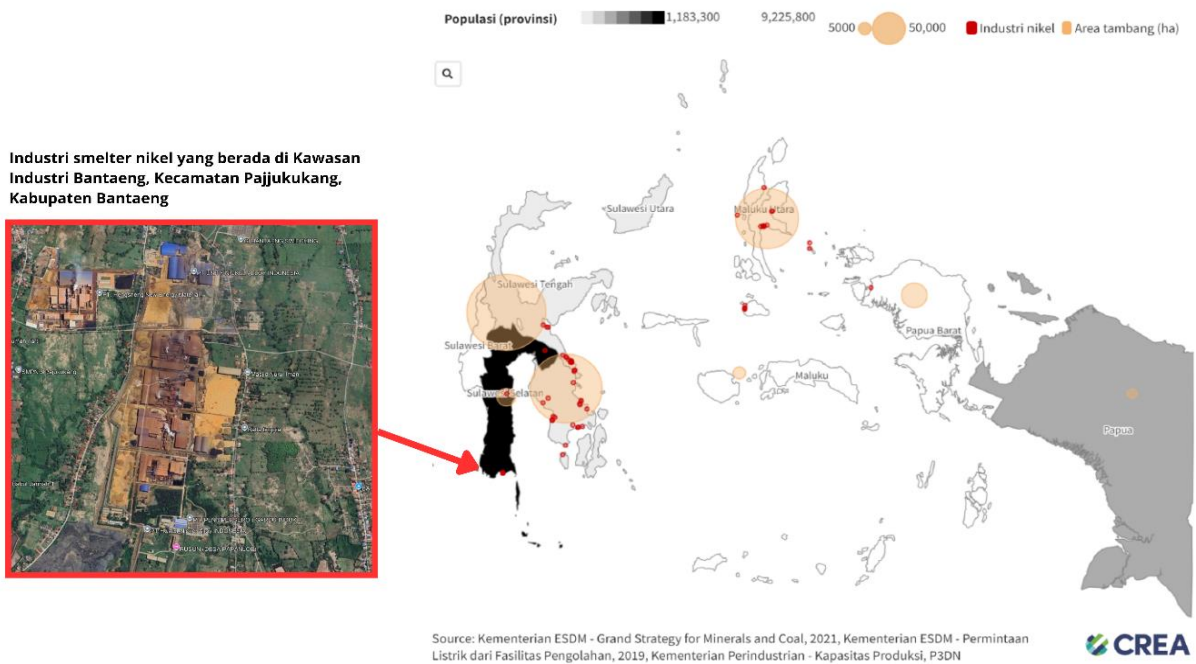
Dalam sebuah pertemuan pada 13 Maret 2014 bertajuk ‘Pajak Expo 2014’ yang berlangsung di Celebes Convension Center (CCC) di Makasar, M Yasin, Wakil Bupati Bantaeng (2013-2018) secara jelas mengatakan rencana ‘besar’ pemerintah untuk menjadikan Bantaeng sebagai daerah Industri. Dia bilang “Bantaeng adalah wilayah yang kecil dengan sumber daya seadanya. Karena itulah kami menyiapkan Bantaeng untuk menjadi wilayah industri agar pertumbuhan ekonomi bisa naik,” kata Muh Yasin, dikutip dari laman (Tempo.co, 2014).<sup>23</sup>

Upaya untuk menjadikan Bantaeng sebagai daerah industri dapat dilihat dari Peraturan Daerah Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang menunjuk Kecamatan Pajjukukang dan Gantarangkeke sebagai kawasan industri dengan rencana luas kawasan 3154 hektar. Catatan LBH Makassar dan Trend Asia menyebutkan bahwa perda tersebut akan memudahkan investor untuk berinvestasi di Bantaeng (Pratama Ady Anugrah & Haidir, 2023). Singkatnya, melalui aturan ini, pemerintah sedang melakukan reorganisasi ruang di Pajjukukang dan membuka jalan masuknya investor.

Pertanyaannya kemudian, mengapa harus Bantaeng? Dan mengapa di Pajjukukang? Menanggapi pertanyaan ini, setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, Bantaeng merupakan titik sentrum dalam bahan baku industri. Dalam catatan *booklet* Teroka KIBA Bantaeng memiliki aksesibilitas dalam mengakses sumber-sumber bahan baku seperti biji nikel, batu bara, biji besi, dan mineral bumi lainnya, dari empat lokasi pertambangan yakni di pulau Sulawesi dan Kalimantan melalui transportasi jalur laut. Selain itu, Pajjukukang merupakan daerah pesisir dengan laut dalam yang menghadap Laut Flores yang cocok untuk pembangunan pelabuhan bongkar-muat bahan baku (Zuhri et al., 2023).

---

<sup>23</sup> Tempo.co (2014) “Kabupaten Bantaeng Siap Jadi Daerah Industri”, <https://bisnis.tempo.co/read/562302/kabupaten-bantaeng-siap-jadi-daerah-industri>



**Gambar 4. Industri smelter nikel di Bantaeng dan sebaran industri nikel di Indonesia Timur menurut data laporan (CREA & CELIOS, 2024)**

Kedua, Bantaeng dikenal dengan produktivitas pertaniannya. Sejak pemerintahan Nurdin Abdullah, produksi pertanian Bantaeng mengalami peningkatan. Sementara itu, Pajjukukang dinilai sebagai daerah kering. Atas dasar ini, pemerintah menunjuk Pajjukukang sebagai kawasan industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Bantaeng dengan kontur wilayah pegunungan, serta hasil pertaniannya, Pajjukukang akan dinilai sebagai wilayah kering. Apalagi dengan bentang alam yang letaknya lebih dekat dengan laut, dan siklus produksi pertanian seperti jagung dan padi hanya panen sekali setahun dan sangat bergantung pada pertanian tadah hujan.

Akan tetapi, daerah kering tidak selalu berasosiasi bahwa daerah itu tidak produktif sama sekali. Pada saat di kampung, beberapa sawah dan kebun yang kami lewati ketika berkendara di sekitar perusahaan, jagung dan padi masih tumbuh baik. Meskipun beberapa keluhan mereka terhadap hasil tani tak terbatas pada air (sebagai daerah kering), tetapi juga soal musim, pupuk yang semakin mahal dan susah diakses, serta dampak perusahaan. Salah satu pemuda mengatakan kepada kami, “Waktu kalian jalan tadi, apakah anda melihat Pajjukukang sebagai daerah kering

yang tidak produktif sama sekali? Buktinya padi masih tumbuh,” ungkapnyanya dengan nada yang sedikit meninggi.

Ketiga, Pajjukukang merupakan basis politik Nurdin Abdullah. Hal itu membuat NA mendapat suara diatas 80% di Bantaeng selama dua kali pemilihan bupati di Bantaeng. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Bantaeng, pasangan Nurdin-Yasin memperoleh 82,58%, sementara tiga pesaingnya masing-masing memperoleh suara Rachmat Rahman-Imran Massoewalle dengan suara 11,68%, pasangan Andi Nurjaya-Idrus Hamdjal 3,60% dan pasangan Jabal Nur-Mansyur Tjongkeng 2,14%.<sup>24</sup> Selain itu, dari informasi yang kami dapatkan, umumnya yang menjadi basis politik utama NA di Pajjukukang adalah orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik yang kuat di kampung, seperti pengepul atau tengkulak, tuan tanah, dan politisi lokal. Hal ini menjadi basis yang kuat bagi NA untuk menjalankan ambisinya. Saking kuat dan militannya, saat NA ditangkap oleh KPK dengan kasus korupsi, para pendukung politiknya di Pajjukukang enggan mempercayai hal tersebut, mereka percaya bahwa apa yang dialami oleh NA adalah bagian dari cobaan sebagai politisi yang kariernya sedang melengking hingga provinsi.

Sementara itu, jauh sebelum wacana menuju daerah industri digulirkan pada tahun 2012, situasi penghidupan di Pajjukukang mengalami penurunan dari segi produktivitas. Beberapa sawah dan kebun yang ditanami jagung dan padi tidak mampu lagi mampu memenuhi kebutuhan reproduksi rumah tangga petani. Salah satunya dapat dilihat dari cerita Ibu Suminah, salah seorang petani penggarap. Pada tahun 1997, ia menyewa lahan Karaeng Toto, seorang tuan tanah lokal, seluas 1 hektar dengan harga Rp. 70.000 per tahunnya. Di lahan tersebut ia menanam jagung. Seingatnya, saat itu ia menanam 30 kg bibit jagung dengan hasil mencapai 10 ton saat panen. Menurutnya, jagung masa itu memang cukup produktif dibanding sekarang. Batangnya tinggi dan buahnya lebih berisi.

Meski pun, jika dibandingkan dengan tempat asalnya, Jeneponto, produktivitas jagung di Pajjukukang (Bantaeng) masih terhitung rendah. Petani Jeneponto, kata Ibu Suminah, jika menanam bibit 20 kg saja, hasil panennya lebih dari 10 ton. Pada 2005, harga sewa tanah naik menjadi Rp800.000, sehingga biaya produksi menjadi lebih

---

<sup>24</sup> Antara (2013). “KPU Bantaeng Tetapkan Nurdin-Yasin Pemenang”, <https://makassar.antaranews.com/berita/46650/kpu-bantaeng-tetapkan-nurdin-yasin-pemenang>

besar. Di tahun selanjutnya, Ibu Suminah tidak lagi menanam jagung, dikarenakan pemilik lahan tidak lagi memberlakukan skema sewa, tetapi menggantinya dengan skema *attesang*, penamaan setempat untuk bagi hasil. Dengan diterapkannya skema bagi hasil, Ibu Suminah merasa rugi. Selain menanggung ongkos produksi sendiri, hasilnya pun harus dibagi dengan pemilik tanah. Di samping itu, ia juga bilang bahwa produktivitas pertanian dari ukuran hasil panen semakin sedikit setelahnya. Penyebabnya, ketika tanah-tanah produktif diambil untuk industri bata merah. Banyak yang terlibat dengan profesi ini, menggali lahan hingga kedalaman satu meter dan hanya menyisakan lapisan tanah yang berbatu. Situasi ini, dalam amatan Ibu Suminah turut menjadi alasan mengapa tanaman jagung sekarang ini tumbuh lebih kerdil.

Seperti halnya tanaman pertanian, industri bata merah juga mengalami tekanan akibat harga bata merah yang turun. Industri bata merah merupakan salah satu pekerjaan yang banyak ditekuni di Baruga dan Papanloe, yang diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Saat itu, pembuatan bata merah diperkenalkan oleh tentara untuk membangun kompleks perumahan tentara. Belakangan, industri bata merah berkembang pesat mulai tahun 2000-an. Satu demi satu *bantilang* terbangun, terutama di sepanjang area kampung.<sup>25</sup> Hal ini memicu peningkatan pengambilan tanah liat. Hal tersebut berdampak pada akses terhadap tanah liat sebagai bahan baku semakin berkurang dari waktu ke waktu. Beberapa pengrajin bata merah harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli tanah liat sekarang ini di kampung tetangga, di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke dengan harga Rp250.000-Rp280.000/mobil.

Selain itu, beberapa warga juga menganggap proses produksi batu-bata ikut menyumbang polusi udara. Utamanya pada saat pembakaran. Bahkan beberapa kali pernah terjadi kebakaran di beberapa rumah warga. Belakangan, industri bata merah mengalami keterpurukan di tahun-tahun berikutnya. Salah seorang pengrajin bata merah menduga, merosotnya harga bata merah dikarenakan semakin banyaknya bangunan gedung sekarang ini lebih memilih menggunakan batako ringan. Karena dianggap murah dan lebih tahan.

Cerita serupa juga dialami oleh masyarakat pesisir. Penghidupan dari rumput laut juga mengalami tekanan akibat cuaca yang buruk. Sehingga, kegagalan panen

---

<sup>25</sup> Bantilang merupakan sebutan untuk rumah produksi industri bata merah



kerap terjadi di masa itu. Salah satunya dapat dilihat dari kasus yang menimpa Pak Makmum,<sup>26</sup> seorang pedagang rumput laut yang ikut mengalami kerugian. Saat gagal panen dialami oleh sebagian besar petani pada masa itu, bisnis rumput laut yang dilakoninya juga terpuruk. Ia dililit utang dan terpaksa merantau ke Kalimantan sebagai buruh pengangkutan sawit di salah satu perusahaan pada 2010 untuk membayar utangnya. Selain Pak Makmum, banyak dari kalangan petani rumput laut juga terpaksa keluar kampung—merantau untuk mengais rejeki di kampung orang, seperti dalam tuturannya, “Banyak dulu orang merantau itu di tahun 2009-2010. itu pasnya rusak-rusaknya rumput laut,” tegasnya.

Setahun setelahnya, gagal panen masih saja dialami oleh para petani rumput laut. Salah satu berita online (Antaraneews.com, 2011) yang meliput pemberitaan produktivitas rumput laut petani mengalami penurunan produksi.<sup>27</sup> Curah hujan yang tinggi disinyalir sebagai penyebabnya, membuat rumput laut terlilit lumut. Sehingga, sangat wajar, ketika petani rumput laut melihat gagal panen dan munculnya penyakit pada batang rumput laut, semata-mata hanya disebabkan oleh aktivitas perusahaan smelter. Namun, turunnya produksi hasil panen yang terjadi di masa itu, jauh berbeda dengan apa yang dialami petani rumput laut sekarang ini, terutama semenjak beroperasinya perusahaan. Menurut tuturan setempat, sekarang ini—lebih banyak gagal panen, terutama rumput laut jenis katonik.

Keadaan ini, tentu saja turut mempengaruhi cara pandang warga dalam melihat rencana industri yang akan dibangun di Pajjukukang. Apalagi, saat pemerintah memberikan iming-iming bahwa dengan ditetapkannya Pajjukukang sebagai kawasan industri, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Terlepas dari itu, dari pengalaman kami di kampung, menurut beberapa informan, mereka mengaku tidak menduga sama sekali bahwa apa yang disebut kawasan industri itu hanya berdiri perusahaan pemurnian nikel atau biasa disebut smelter. Mereka tidak pernah mendengar bahwa smelter akan dibangun di kampung mereka. Salah seorang yang kami temui di Papanloe bercerita tentang Desas-desus yang muncul dalam percakapan harian, bahwa pemerintah akan memberi jalan bagi pihak swasta untuk

---

<sup>26</sup> Semua informan menggunakan nama samaran untuk menjaga kerahasiaan identitas, kami menggunakan format ini secara konsisten dalam laporan ini.

<sup>27</sup> Antaraneews (2011). “Cuaca Berubah, Produksi Rumput Laut Turun”, <https://www.antaraneews.com/berita/241845/cuaca-berubah-produksi-rumput-laut-turun>

membangun perusahaan otomotif. Ia menganggap bahwa kampungnya, akan menjadi tempat industri perakitan kendaraan seperti mobil. Namun pada kenyataannya, hanya industri pengolah biji nikel yang eksis di tempat itu.

Di tempat lain, kami bertemu dengan warga di Desa Baruga juga mengatakan hal yang sama. Ia justru secara tegas mengatakan bahwa proses penetapan kawasan industri tidak pernah melibatkan warga secara umum. Juga tidak ada sosialisasi yang terjadi. Namun, ada perbedaan informasi yang dia ketahui tentang KIBA. Dia mendengar bahwa kelak jika Bantaeng menjadi kawasan industri, pemerintah akan membangun pabrik pengolahan hasil pertanian dan laut, salah satunya ikan kaleng. Selain itu, mereka juga mendengar bahwa bagian dari kawasan industri yang direncanakan seluas 3000 hektar lebih itu, terdapat pasar hewan yang terlatak di Desa Baruga.

Sebagai warga biasa, mereka hanya tahu itu. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam memutuskan arah pembangunan di kampungnya sendiri. Padahal orang-orang biasa yang tidak memiliki jabatan politik, maupun ekonomi yang kuat, adalah golongan yang paling terdampak dari cita-cita menuju daerah industri ini. Kenyataan ini, tentu saja kontradiksi dengan klaim pihak perusahaan yang mengklaim bahwa kebanyakan warga telah mengetahui rencana pembangunan smelter (Balang Institut & JATAM, 2023).<sup>28</sup> Kurangnya transparansi dikarenakan saat proses perencanaan dilakukan dengan pola *top-down* dan hanya melibatkan orang-orang tertentu. Para elit lokal dan pemerintah setempat seperti kepala Desa dan kepala kecamatan, serta orang-orang terdekat mereka lah yang tahu-menahu soal rencana ini. Orang-orang inilah yang kemudian diundang sebagai 'perwakilan' dalam rangka mewujudkan proses yang 'partisipatif'.

---

<sup>28</sup> Dalam laporan tersebut menyinggung persoalan dokumen AMDAL dimana pihak HNAI mengklaim bahwa 93,33% masyarakat di Desa Papanloe telah mengetahui sedang tersisa 6,67% yang tidak tahu yang jauh berbeda dengan temuan dalam laporan. Justru sebaliknya yang terjadi, lebih banyak warga yang tidak mendapat informasi.

Menurut tuturan setempat, saat itu mereka diundang dan dijamu makanan mewah, disebuah tempat wisata yang bernama Pantai Marina—akronim dari ‘Mari Ingat Nurdin Abdullah’—sambil mendengar sosialisasi penetapan kawasan industri di Bantaeng. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa rencana pemerintah dalam membangun industri di Pajjukukang sebagai upaya dalam mereorganisasi wilayah pesedaan di Pajjukukang. Celakanya, dalam ambisi ini tidak pernah melibatkan warga setempat. Begitupun informasi yang mereka peroleh sangat samar. Di samping itu, kondisi penghidupan yang dialami oleh warga juga semakin menurun, sementara biaya-biaya kebutuhan hidup selalu meningkat.

## **REORGANISASI RUANG HIDUP: PERUBAHAN AGRARIA DAN PERAMPASAN TANAH SETELAH ADANYA KAWASAN INDUSTRI BANTAENG (KIBA)**

Pada bagian ini akan diceritakan tentang suatu fase penting di awal-awal beroperasinya Smelter nikel di dalam Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Tonggak awal ini menjadi situasi yang memungkinkan keberlanjutan KIBA, yang menandai reorganisasi atas ruang hidup masyarakat yang berada di dalam kawasan-KIBA. Agar kontradiksinya terlihat, alih-alih menyebut pembebasan lahan, justru yang kami lihat justru yang terjadi adalah suatu model perampasan tanah warga untuk kepentingan pembangunan. Berdasarkan kajian Kami, perampasan tanah dalam bentuk pembebasan lahan terjadi dalam dua pola. Pola pertama, pihak pemerintah ikut memfasilitasi membujuk para pemilik tanah luas untuk dijual ke perusahaan Smelter-Huadi Group. Pola kedua, perusahaan menyasar pemilik tanah yang penguasaannya di bawah 3 hektar, yang banyak di antaranya merasa terpaksa menjual tanahnya. Di sini juga mengulas kembali gerakan penolakan warga kampung atas keberadaan Smelter dan KIBA. Aspek penting lainnya yang dibahas tentang krisis sosial ekologis sebagai dampak-dampak langsung setelah Smelter beroperasi, termasuk menunjukkan juga krisis mendalam yang diakibatkan oleh PLTU *captive* di Jeneponto.

### **A. Pola Perampasan tanah di KIBA: 'Membujuk' para Tuan Tanah – 'Memaksa' Pemilik Tanah yang Bertahan**

Ditetapkannya Pajjukukang sebagai Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) kian membuka ruang bagi pihak swasta untuk membangun industri pemurnian mineral (smelter nikel). Industri smelter membutuhkan banyak ruang untuk membangun pabrik pengolahan dan infrastruktur lainnya. Sehingga, pembebasan lahan menjadi hal yang penting dalam proses ini. Dalam proses penelusuran di lapangan, kami berupaya memahami bagaimana status penguasaan tanah di dalam kawasan industri sebelum dikuasai oleh korporasi, yang status kepemilikannya bersifat milik negara dan hak milik. Di mana proporsi penguasaan tanah 10 % dikuasai oleh negara, 90% dikuasai oleh pribadi. Kehadiran korporasi Huadi banyak mengubah status penguasaan tanah, mereka difasilitasi pemerintah tanah-tanah yang kemudian beralih penguasaan, ada warga yang menjual secara sukarela, tapi tidak sedikit juga yang menjual karena terpaksa.

Dalam tuturan warga, setidaknya dalam proses pembebasan lahan dilakukan dengan 2 pola yang umum terjadi. Pertama, pembebasan lahan dilakukan dengan menyasar para tuan tanah atau orang yang bertanah luas baik mereka sebagai warga setempat maupun tanah yang dimiliki oleh orang luar kampung. Misalnya, dalam sebuah wawancara dengan petani peggarap mengatakan bahwa tanah-tanah yang ditempati berdirinya perusahaan saat ini, kebanyakan adalah tanah yang pemilikinya dari luar kampung. Selain itu, ia juga bilang bahwa kepala Desa saat itu (2014) sebagai pemilik tanah luas juga menjual tanahnya dan berperan dalam proses pembebasan lahan. Sebagai contoh, ia sebutkan bahwa tanah yang menjadi tempat berdirinya rusun (tempat tinggal atau penginapan) adalah milik mantan kepala Desa dengan perkiraan luas 4 hektar. Sementara itu, pemilik tanah-tanah kecil juga semakin terpengaruh untuk menjual lahannya.

Kendati demikian, selalu ada perlawanan dalam pembebasan lahan tersebut. Namun, warga cukup rasional dan kalkulatif dalam melepas tanahnya. Apalagi saat harga tanah semakin naik pertahunnya. Pada masa awal konstruksi (2014) tanah hanya dihargai sekitar 14 ribu per-meter, lalu naik 25 ribu per-meter, 30 ribu per-meter, 40 ribu-per meter, hingga 50-65 ribu per-meter. Bahkan, beberapa warga juga menyebut ada yang tanahnya dibeli perusahaan dengan harga sampai 150 ribu per-meter. Sebelumnya, tanah dibeli dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam satu hektar tanah, diperkirakan hanya dijual sekitar 30 juta rupiah saja. Berbeda saat perusahaan datang, tanah sehektar bisa sampai ratusan juta harganya. Hal ini menjadi semakin menggoyahkan keyakinan warga dalam mempertahankan tanahnya.

Informasi terkait penjualan tanah menyasar pemilik tanah luas ini juga dikonfirmasi oleh informan kami yang dulu aktif mendampingi warga di masa-masa kehadiran korporasi. Dia menyebutkan kebanyakan para tuan tanah atau pemilih tanah luas yang paling mudah menjual tanah ke Huadi. Situasi ini yang perlahan-lahan melemahkan gerakan penolakan smelter-KIBA. Situasi lain tapi tetap terkait adalah melonjaknya harga tanah yang signifikan, yang juga pelan-pelan disadari ada pengaruh gerakan penolakan dengan naiknya harga tanah yang diincar oleh korporasi Huadi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ardi direktur OASE. Agustus 2024

Kedua, pola pembebasan tanah dengan cara mengepung. Tak jarang, cerita-cerita tentang seorang petani yang terpaksa menjual tanah karena terkepung oleh tanah-tanah yang terbeli oleh perusahaan muncul. Semisal dalam kasus seorang petani yang kami temui, ia terpaksa menjual lahannya seluas 2 hektar lebih dikarenakan posisinya berada di tengah, dan terkepung. Padahal tanah itu masih produktif. Sebelum dijual ia masih menanam padi dan jagung. Baginya, jika tanah sudah terkepung, akan lebih sulit mengakses tanah tersebut dikarenakan—ketika perusahaan telah membeli tanah warga, pihak perusahaan langsung memagarinya dengan beton. Di tempat lain, kami bertemu warga lainnya dan menanggapi situasi ini: “memang betul kalau banyak disini yang dikepung tanahnya baru dijual. Mau bagaimana? *Masa pake helikopter orang masuk (akses tanah yang terkepung)*” ujarnya sambil tertawa.

Di Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, sebagian besar lahan telah dibebaskan untuk kawasan industri kecuali lahan pemukiman. Sama dengan Dusun Mawang, Dusun ini juga berbatasan langsung dengan perusahaan yang telah beroperasi saat ini. Di belakang rumah bapak Enal,<sup>30</sup> pagar dan bangunan perusahaan nampak jelas. Hanya berjarak beberapa meter dari bale-bale tempat kami mengobrol di depan rumahnya.

Lahan-lahan yang sudah berpagar, menurutnya adalah pertanda jika lahan itu telah dibebaskan dan pembayarannya telah dilunasi perusahaan. Warga sudah tidak berani lagi mengaksesnya, mereka takut dituduh sebagai pencuri. Di dekat rumahnya, berjarak sekitar 100 meter, terdapat lahan berpagar seluas 8 hektar yang digunakan untuk gardu PLN untuk memasok daya listrik ke perusahaan.

Salah satu informan, warga Balla Tinggia yang telah melepaskan lahannya seluas 1 hektar ke perusahaan. Harga tanah di Balla Tinggia bervariasi dari tahun ke tahun. Menurutnya, harga tanah berbeda-beda. Dulu, di awal-awal pembebasan, di bagian depan, harga tanah berkisar antara 18-19 ribu rupiah per meter persegi. Berarti berkisar antara 180-190 juta rupiah untuk luasan satu hektar. Dari harga tersebut, kemudian naik lagi menjadi 20, 40, hingga 60 juta rupiah per meternya. Seingatnya, ia melepas lahannya pada saat pandemi Covid-19 (corona) melanda. Ia juga mengatakan melepas lahannya saat pabrik Uniti akan dibangun. Ia sendiri

---

<sup>30</sup> Bukan nama sebenarnya

melepasnya di harga 65 ribu per meter. Ia membebaskan lahannya belakangan. Jadi dia memperoleh sekitar 650 juta rupiah untuk lahannya yang seluas 1 hektar tadi.

Saat ditanyakan siapa yang mendatangnya untuk membebaskan lahannya, ternyata bukan dari pihak perusahaan ataupun pemerintah. Menurutnya yang datang membeli lahannya adalah warga biasa, bukan orang dari perusahaan dan pemerintah yang mendatangnya langsung. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut. Kemungkinan yang ia maksudkan adalah ada perantara atau broker/makelar tanah yang membelinya terlebih dahulu, sebelum dilepaskan ke pengelola kawasan atau perusahaan.

Hasil dari pembebasan lahan itu kemudian ia belikan sawah padi di wilayah bawah, di Bissappu, Bantaeng. Dari lahannya di sana, ia bisa gunakan hasilnya untuk konsumsi keluarganya. *“Dari situ ki makan, di sana ditanam di sini dimakan,”* katanya. Itu adalah keputusannya setelah melepas lahan, sebab menggunakan uang untuk konsumsi saja tidak akan menopang reproduksi keluarganya dalam jangka panjang. *“Kalau uang ja itu pak, aih, cepatki habis,”* ungkapnya.

Sebagian besar rumah di Balla Tinggia yang dulu adalah rumah panggung atau rumah kayu, sekarang telah direnovasi menjadi rumah batu. Ia sendiri telah merenovasi rumahnya. Ia mengatakan jika merenovasi rumahnya itu setelah masih ada tersisa dari membeli lahan di luar. Beberapa warga lainnya menggunakannya sebaga modal dagang atau membuka usaha-usaha, kalau pintar dagang katanya.

Pembebasan lahan ini terus dilakukan hingga saat ini. Awal-awal pembebasan lahan itu menurutnya sebaiknya atau seharusnya diperantarai dan difasilitasi oleh Perusda. Namun kalau kita perhatikan di lapangan, itu seperti hanya transaksi antara perusahaan dan warga. Ini juga yang menjadi pertanyaan dari dulu, bagaimana status kepemilikan tanah yang sudah diperjualbelikan tersebut? Apakah lantas menjadi milik perusahaan? Atau menjadi milik Pemda?

Status pengelolaan oleh perusahaan sebaiknya kontrak berjangka waktu tertentu, misalnya seperti HGU, di KIBA ini belum jelas seperti apa kedudukannya. Bagaimana jika perusahaan nantinya beroperasi, bagaimana status lahan tersebut. Pengelolaan kawasan ini harus diperjelas status kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan lahannya. Status kepemilikan ini menjadi pertanyaan sebab di lapangan

transaksinya kerap berlangsung secara langsung antara dua pihak, perusahaan dan warga, tanpa ada peran Perusda di sana sebagai pengelola KIBA.

Pembebasan dengan mekanisme jual-beli antara perusahaan swasta dan warga ini agak janggal. Di periode awal misalnya, praktik-praktiknya itu transaksinya tidak langsung dengan pemilik pertama. Misalnya, orang-orang dengan kepemilikan modal yang banyak atau kaya, seperti yang ia sebut, Hj Nampo, Hj Sila, dll. Mereka akan membeli lahan-lahan warga satu persatu hingga jumlahnya meluas, baru kemudian orang-orang kaya ini yang melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan. Saat dibeli di warga biasa, nilai tanah bisa lebih rendah ketimbang saat dijual ke perusahaan. Jadi menurutnya ada semacam spekulasi-spekulasi dalam jual beli tanah.

Ia juga menyoroti, IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri) di KIBA yang belum rampung saat ini, padahal sudah memasuki tahun 2024. Kabarnya mereka dituntut, utamanya Perseroda (PT Basic) untuk merampungkan hal tersebut di bulan Agustus ini, sebab kabar yang beredar adalah yang dipertaruhkan adalah status PSN-nya akan dicabut apabila beberapa syarat tidak terpenuhi, misalnya standar luasan tertentu dalam hal pembebasan lahan. Yang ia pertanyakan kemudian adalah, jika statusnya dicabut, apakah kemudian perusahaan akan berhenti beroperasi? Bagaimana dengan Desa?

Bung Andi heran dengan keputusan-keputusan Pemdes. Sebenarnya jika dilihat dari rencana kawasan, itu mencakup beberapa Desa dan sebagian besar masuk ke dalam kawasan, terutama seperti Desa Papanloe. Desa ini terancam akan kehilangan otoritas pemerintahan jika semuanya telah berubah menjadi kawasan Industri, terutama jika nanti semua warga sudah direlokasi, apalagi yang akan dilakukan pemerintah Desa? Siapa dan apa yang akan diaturnya?

Di awal operasional yang juga bermasalah adalah digunakannya fasilitas publik seperti jalan umum dalam operasional perusahaan. Seperti jalan di Dusun Mawang. Di jalan tersebut, bisa dikatakan sudah sangat hancur karena lalu lintas material yang bebannya cukup besar. Dalam aturan itu kan tidak boleh. Di sana, sudah ada satu jalan kampung yang tertutup yang menghubungkan Mawang dan Balla Tinggia. Itu bahkan sudah masuk dalam kawasan perusahaan Huadi saat ini, dan tidak digunakan



lagi secara umum. Sementara saat ini, jalanan di Dusun Mawang tampak tidak ada perbaikan sama sekali.

Daeng Tompo tinggal di Dusun Mawang Desa Papang Loe, ia salah seorang warga yang lahannya dibebaskan oleh perusahaan Huadi pada awal-awal perusahaan akan dibangun. Walaupun tidak menyebut berapa total nominal hasil dari pembebasan lahannya namun ia mengaku bahwa diawal, perusahaan membeli mulai dengan harga 7 ribu Rupiah per meter, lalu meningkat keharga 60 ribu per meter sampai 100 ribu rupiah per meter *“jadi kalau 1 hektar yah 1 milyar harganya”* kata Daeng Tompo.

Daeng Nompo mengaku pada awalnya menolak untuk menjual lahannya, karena lahannya adalah lahan produktif yang biasa ditanami Jagung dan kacang-kacangan, namun penolakan itu tidak final karena pada akhirnya ia dengan terpaksa setuju melepaskan lahannya sebab melihat perusahaan telah membeli beberapa lahan yang berada di dekat lahannya, situasi tersebut membuat Daeng Nompo tentunya tidak bisa berbuat apa-apa sehingga mau tidak mau harus rela menjual lahannya walaupun pada dasarnya ia ingin mempertahankan.

Rahim sendiri adalah salah seorang warga yang telah dibebaskan lahannya oleh pihak perusahaan PT Hensheng. Pada awalnya Rahim sebetulnya merasa bimbang terkait keputusan yang akan ia pilih. Tapi Menurutnya, perusahaan punya strategi jitu yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain harus rela menjual lahannya, ia merasa tidak bisa mengambil pilihan lain karena perusahaan telah membeli lahan yang ada disekeliling lahannya.

Rahim dengan berat hati menjual lahannya karena ia takut dikemudian hari akan kesulitan mengakses lahannya. Seperti diketahui perusahaan sendiri akan memagari tembok setelah membebaskan lahan warga. Rahim menggambarkan seolah lahannya telah dikepung oleh lahan yang telah perusahaan bebaskan.

Selain pola pengepungan yang digunakan perusahaan dalam proses pembebasan, perusahaan juga menawarkan harga tinggi kepada warga, perusahaan menawarkan harga pembelian sekitar 50 ribu per meter, harga yang sangat jauh berbeda sebelum masuknya perusahaan *“Dulu tanah disini harga nya sangat murah,”* kata Rahim.

Lahan yang telah ia jual adalah lahan produktif yang selama ini ia peruntukkan untuk menanam jagung. Selain itu ia juga telah menjual sawah miliknya yang biasa ia panen sekali dalam setahun. Menurutnya selama ini hasil pendapatan dari menggarap cukup untuk menghidupi keluarganya. Dia sedikit menyesali telah menjual lahannya karena sekarang ia tidak punya lagi lahan yang bisa digarap.

Selain Rahim ternyata banyak warga Papang Loe yang telah menjual lahannya, hasil dari penjualannya digunakan untuk kembali membeli lahan diluar daerah. Rahim menceritakan salah satu keluarganya setelah menjual lahannya yang memilih untuk membeli lahan sawit di Mamuju Sulawesi Barat. Alasannya karena lahan diluar daerah lebih murah dan juga produktif karena penghasilannya bisa 2 kali dalam setahun.

## **B. Fase Beroperasinya Perusahaan: Beragam Pandangan Warga**

### **Posisi yang Dilematis: Menguntungkan Sekaligus Merugikan**

Hampir semua warga yang kami temui di kampung menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan membuat posisi warga menjadi dilematis. Pertama, tidak semua warga bisa terserap menjadi tenaga kerja perusahaan, utamanya anak muda. Warga yang kami temui mayoritas mengakui bahwa kedatangan perusahaan berdampak secara ekonomi. Perusahaan membuka dan menyerap banyak tenaga kerja di Desa. Sebelumnya, tidak ada perusahaan yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar dan mempekerjakan hingga ribuan orang, dan disaat bersamaan menjamin pendapatan bulanan—yang dalam pandangan warga, jumlahnya cukup besar.

Sejak berdirinya perusahaan smelter di Bantaeng, tercatat lebih dari 3000 lebih buruh yang dipekerjakan. Salah satu perusahaan smelter menyebut bahwa mereka menggunakan tenaga kerja lokal sekitar 75% dari total jumlah buruhnya (Huadi.co.id, n.d.).<sup>31</sup> Beberapa warga (atau memiliki keluarga) yang bekerja untuk perusahaan, mengatakan bahwa kehadiran perusahaan membawa keuntungan secara ekonomi. Bahkan, yang tidak terserap pun kadang kala mengakui ini. Bagi yang gagal, mereka diperhadapkan pada kenyataan bahwa tetangga-tetangga mereka yang menjadi buruh adalah fakta yang tidak dapat dinafikkan—sebagai bagian dari dampak

---

<sup>31</sup> Huadi.co.id. "Presentase Tenaga Kerja Huadi Group: 75% Dominasi Tenaga Kerja Lokal", <https://huadi.co.id/presentase-tenaga-kerja-huadi-group-75-dominasi-tenaga-kerja-lokal/>

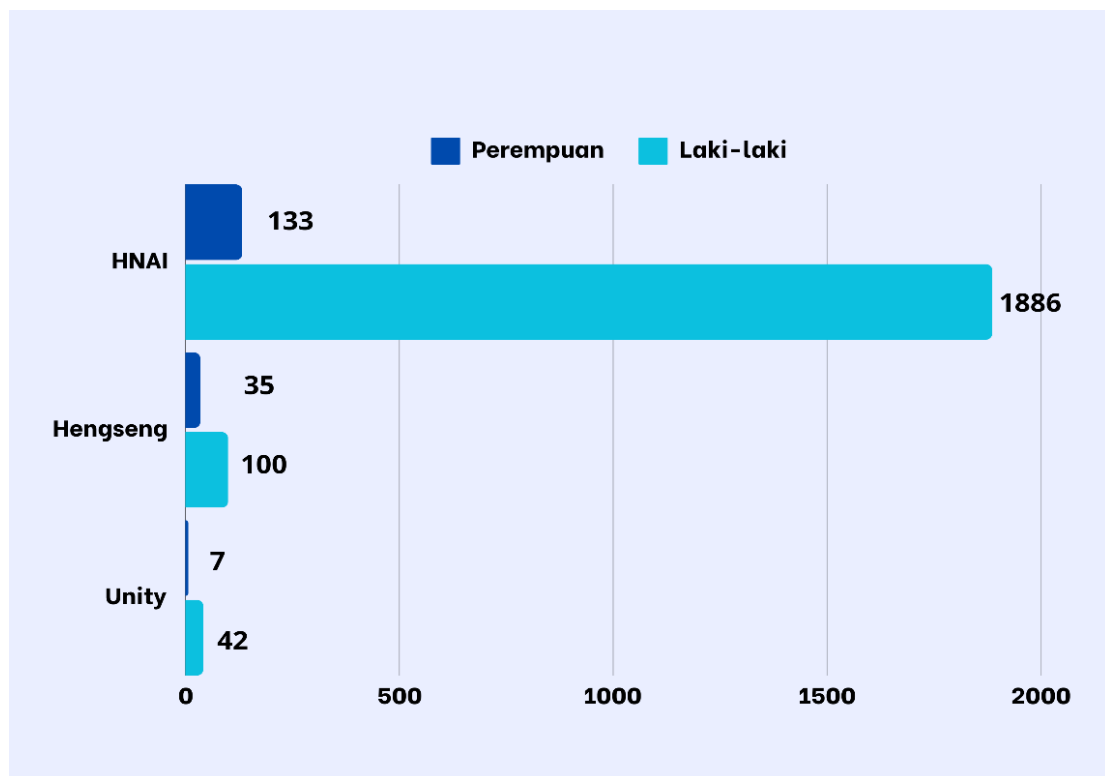
ekonomi yang timbul akibat adanya perusahaan seperti yang kerap diumbar-umbar oleh pemerintah setempat dan pihak perusahaan itu sendiri sebagai sebuah keberhasilan.

Kebanyakan dari mereka yang terserap masuk adalah anak muda, kategori penduduk berdasarkan usia yang banyak mengisi kantong-kantong pengangguran di Indonesia, tak terkecuali di Bantaeng. Seperti dalam ungkapan orang tua buruh perusahaan, “Yang tidak punya anak muda akan mati konyol. Tidak ada yang bisa dia kasi masuk perusahaan”. Namun, memiliki anak muda bukan jaminan bagi sebuah keluarga untuk terserap masuk bekerja di perusahaan. Beberapa warga yang kami temui mengaku kesulitan untuk mengakses pekerjaan di perusahaan.

Pada pagi itu, di pesisir Desa Baruga, saya bertemu salah seorang pemuda. Ia sedang menunggu orang tuanya mengambil jaring yang berisi rumput laut. Setiap hari, bersama saudara dan ibunya, ia membantu ayahnya untuk melepas rumput laut yang tersangkut pada jaring. Di tengah ributnya angin, kami mengobrol. Ia tidak termasuk salah satu dari ribuan anak muda yang dipanggil untuk bekerja di perusahaan. Beberapa kali mendaftar, tidak cukup untuk dapat akses bekerja di perusahaan. Menurutnya, jika ingin masuk perusahaan mesti ada orang dalam. Setiap orang dalam, punya kuota dan batasan berapa yang bisa ia masukkan ke perusahaan. Ada banyak pintu untuk masuk bekerja di perusahaan. Tetapi, pintu-pintu itu tidak pernah terbuka untuknya, bahkan beberapa kali mendaftar tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan bekerja disana—posisi yang didambakan oleh banyak orang: menjadi buruh perusahaan.

Ia bukan satu-satunya anak muda yang gagal masuk perusahaan. Seorang Ibu bercerita tentang anaknya yang pernah mendaftar tapi tidak pernah mendapat panggilan. Alasannya sama: tidak ada orang dalam. Si anak mendaftar pada awal beroperasinya perusahaan tahun 2019 lalu, sampai sekarang. Dan akan tetap mendaftar lagi di tahun ini jika perusahaan membuka lowongan. “Berkasnya sudah siap,” kata ibunya. Si anak mendaftar sebelum ia menikah pada tahun 2022 kemarin. Karena tidak kunjung mendapat titik terang, tahun ini si anak keluar mencari uang di kampung orang (Bulukumba) sebagai buruh panen cengkih. “Di tau ji toh kalau sudah menikah orang, apalagi adami anaknya. Mauki beli susu juga” Kata ibunya lagi sambil menceritakan nasib anaknya yang terombang-ambing dalam mencari pekerjaan.

Perusahaan yang diklaim sangat menguntungkan bagi anak muda pada kenyataannya tidak selalu. Masih ada anak muda di Desa, belum memiliki pekerjaan tetap atau bahkan tidak bekerja sama sekali dan hidup dalam nasib yang tidak pasti. Selain anak muda, perusahaan smelter tidak menyerap banyak tenaga kerja perempuan. Lebih banyak yang terserap adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Tidak banyak yang dibutuhkan oleh perusahaan pekerja perempuan. Terlebih lagi, kualifikasinya pun cenderung spesifik, semisal untuk analisis laboratorium.



**Gambar 1. Persentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan dari 3 perusahaan smelter yang beroperasi di KIBA<sup>32</sup>**

Kedua, perusahaan menguntungkan secara ekonomi tetapi tidak dengan dampak lingkungannya. Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian awal, dampak ekonomi sering kali disebut oleh warga setempat sebagai dampak positif kehadiran perusahaan—yang sering disandingkan dengan dampak lingkungan atau krisis yang ditimbulkan sebagai dampak negatif perusahaan. Salah seorang mantan buruh perusahaan secara jelas menanggapi hal ini: “jika yang kita lihat adalah dampak

<sup>32</sup> Data diolah dari laman huadi.co.id, <https://huadi.co.id/#>

ekonominya, tentu saja kita menginginkan perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal. Tetapi, jika yang kita lihat dampak lingkungannya, kita menginginkan untuk ditutup saja perusahaan". Terkait dengan kontradiksi ini, akan di uraikan lebih jauh pada bagian lain.

Ketiga, tidak semua orang memiliki tanah. Kedatangan perusahaan, tentu saja menguntungkan bagi mereka yang memiliki tanah luas. Mereka akan mendapatkan harga yang tinggi dari perusahaan. Dalam cerita setempat, beredar bahwa banyak warga yang terbeli tanahnya oleh perusahaan dengan angka yang tinggi mendadak jadi kaya dan konsumtif. Banyak dari mereka membeli motor hingga mobil. Sebagian lainnya menggunakan uang yang ia peroleh dari penjualan tanah untuk membeli lahan di luar kampung dan merantau. Namun, apakah mereka pernah berfikir apa yang telah hilang darinya dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi tetangganya saat ia menjual tanahnya (misal, nasib petani penggarap)?

Di jalan Dusun Papanloe kami melihat telah banyak lahan yang dipagari, itu pertanda bahwa pembebasan lahan telah dilakukan di area itu. Dusun Papanloe berada di area belakang perusahaan setelah melalui Dusun Mawang. Di sebuah toko kelontong kami singgah membeli minuman kemasan dingin sambil sedikit bercerita dengan ibu penjualnya. Kami menyampaikan kami dari mana saja dan menyampaikan agenda kami di Pajukukang.

Bersama cucunya yang sedang ingin bermain-main, ia tampaknya bersedia untuk sedikit mengobrol dengan kami. Menurutnya di Dusun Papanloe pun saat ini sudah banyak lahan yang sedang dibebaskan. Lokasi lahan yang sudah dibebaskan dan telah dipagari tampak jelas di depan toko kelontongnya. Saat ini polusi dan dampak langsung perusahaan di lingkungannya belum cukup terasa, namun ia memahami, jika melihat area yang dibebaskan, warga Dusun Papanloe akan mengalami pengalaman yang sama dengan yang terjadi di Dusun Mawang.

Ia mengatakan jika keluarga-keluarganya pun sudah banyak yang menjual lahannya ke perusahaan. Di Dusun ini menurutnya tidak banyak lahan besar yang dijual, ada yang 2 hektar, satu hektar, dan yang kecil-kecil. Salah satu lahan terluas yang dijual di Dusunnya sepengetahuannya adalah seluas 10 hektar. Lahan itu dimiliki oleh seorang haji, (Haji Jufri). Namun tak lama setelah ia menjualnya, ia kemudian meninggal dunia dan hasil jualannya diwariskan ke anak istrinya.

Ia sendiri mempunyai lahan seluas dua hektar dan rencananya akan dijual ke perusahaan. Lahan tersebut sudah ditawarkan oleh perusahaan dengan harga 500 juta rupiah per hektarnya, jadi ia berpeluang mendapatkan 1 miliar untuk lahannya. Namun menurutnya, harga tersebut masih rendah.

Beberapa harga lahan yang terjual di Dusun Papanloe sebelumnya adalah 700 juta rupiah per hektarnya. Itulah mengapa ia mengatakan harga yang ditawarkan padanya masih rendah, karena di bawah harga rata-rata lahan yang dijual sebelumnya. Lahannya sendiri berada tepat di belakang pagar pembatas terakhir lahan perusahaan. Ia menunggu hingga harga tanahnya bisa naik. Lahan tersebut rencananya akan diberikan pada anaknya yang telah menikah, namun lahan tersebut sepenuhnya masih atas namanya. Anaknya adalah salah seorang yang telah terserap juga sebagai pekerja di perusahaan.

Lahan-lahan garapan di Dusun Papanloe menurutnya ia anggap tidak cukup produktif untuk digunakan sebagai lahan pertanian, seperti untuk sawah padi. Tidak adanya irigasi non air tanah membuat petani sulit mendapatkan hasil pertanian. Rata-rata adalah sawah tadah hujan yang menurutnya tidak menguntungkan. Lahannya sendiri yang seluas dua hektar saat ini tidak digarap karena alasan-alasan tadi. Pertanian di Dusun ini, baik itu sawah padi maupun tanaman jagung, itu sulit karena hanya mengandalkan air hujan. Biasanya sawah tadah hujan itu produksi satu kali setahun, tapi menurutnya bahkan untuk dapat hasil dari satu kali produksi itu sangat jarang yang menguntungkan. Jika musim panen belum tiba, namun tiba-tiba kemarau masuk, maka itu akan menyulitkan petani. Ongkos pertanian itu mahal, kadang untuk mengembalikan ongkosnya pun sulit. Jadi karena itu juga banyak orang menjual lahannya, bahkan jika harganya rendah.

*“Kalau kembali’ ji itu baik-baik ji, tapi kalau mati i? tidak ada air na? na kalau tidak ditanami l, tidak ada ditunggu, susah kalau di daerah di sini,” ungapnya.*

Begitupun dengan kebun, biasanya orang di Dusun ini orang menanam jagung dan kacang hijau. Setelah musim jagung orang akan menanam kacang hijau, namun itu pun jarang sekali mendapat hasil untung dari perkebunan itu.

Dari keterangannya kami juga mendapat gambaran jika perusahaan saat ini terus mengupayakan pembebasan lahan di Desa Papanloe. Orang-orang juga sudah bersedia menjual lahannya ke perusahaan. Bahkan menurutnya, ada orang yang

berinisiatif mendatangi perusahaan untuk menawarkan tanahnya karena keterdesakan ekonomi, bahkan lahannya belum disasar oleh perusahaan. Bahkan harganya jauh dari rata-rata harga jual di Dusunnya. Orang yang menawarkan sendiri lahannya hanya dihargai 100 juta rupiah per hektarnya. *“Itu ji iyya yang butuh sekalia, biar tidak nakennaki (pembebasan), pigimi di anu perusahaan na bilang e bellimi tanahku,”* katanya.

### **C. Bangkit dan Redupnya Perlawanan**

Respon warga yang lahan dan pemukimannya masuk dalam kawasan (KIBA) pada awal munculnya dikemas dalam isu penolakan smelter di KIBA. Warga yang ikut dalam isu penolakan itu berasal dari dua Desa, yaitu Desa Papanloe dan Borong loe. Gerakan penolakan ini didampingi oleh Balang Institut dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sul-Sel. Bersama warga, kedua lembaga pendamping ini banyak melakukan konsolidasi dan pendidikan awal untuk memahami tentang rencana industri yang akan dibangun di wilayah mereka. Forum-forum warga dibentuk, pemutaran-pemutaran film di kampung-kampung bergulir seturut pendidikan nonformal seperti SPHR serta diskusi dibangun dan dirajut bersama. Berkali-kali aksi demonstrasi dilakukan di Kota Bantaeng. Protes warga ini berjalan dalam rentang tahun 2012-2017. Seiring dengan terbitnya peraturan daerah tentang kawasan industri di Bantaeng (KIBA), izin perusahaan dikantongi oleh Huadi Group hingga ditetapkannya KIBA sebagai Program Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sepanjang protes itu bekerja, aliansi yang lebih besar kemudian terbagun. Aliansi ini dijahit bersama oleh warga yang menolak dengan OMS di Bantaeng, dan juga sejumlah NGO di Makassar, seperti LBH-M dan WALHI Sulsel.

#### **Respon atas Gerakan-Gerakan di Papanloe**

Andi pada dasarnya mengikuti perkembangan-perkembangan gerakan yang ada di kampungnya. Ia mengatakan sebenarnya sudah seringkali lembaga-lembaga dari luar masuk di Papanloe untuk mendampingi atau menyuarakan aspirasi warga. Namun, menurutnya warga Papanloe saat ini seperti sedikit putus asa sebab harapan-harapannya belum banyak yang terpenuhi atau pupus di tengah jalan.

Di Papanloe sendiri ada beberapa gerakan yang muncul, salah satunya adalah AMP (Aliansi Masyarakat Papanloe). Beberapa aspirasi yang disuarakan oleh AMP adalah menuntut hak-hak masyarakat, salah satu yang disuarakan di saat aksi itu adalah memperjuangkan hak warga Papanloe untuk terserap jadi karyawan/pekerja. Itu sebenarnya tidak selesai karena beberapa orang belum terserap dan masih susah untuk masuk, termasuk salah satunya iparnya yang belum terserap. Namun AMP setelah berhadapan-hadapan dengan pihak perusahaan ia anggap tiba-tiba bungkam, dan terlalu lama bungkam. Jadi beberapa yang diperjuangkan akhirnya tidak selesai, entah hanya orang tertentu yang diperjuangkan, jadi warga tidak menjadi prioritas sepenuhnya. Ia tidak tahu pasti penyebabnya, namun ia menerka-nerka ada kaitannya dengan pemilihan kepala Desa beberapa waktu lalu.

Terakhir muncul lagi lembaga baru “Lembaga Pemuda dan Masyarakat Papanloe (LPMP) *Abulo Sibatang*” yang dibentuk dan diketuai oleh mantan Kepala Desa Papanloe dan diwakili oleh Dg Liwang. Organisasi ini sudah melakukan aksi terkait dampak lingkungan, hak warga Papanloe untuk menjadi karyawan juga, dan juga pembebasan lahan rumput laut. Proses pembebasan lokasi rumput laut saat ini menurutnya sudah berjalan prosesnya. Hal tersebut sudah dinegoisasikan. Sementara untuk dampak-dampak lingkungan, menurutnya akan ditangani secara bertahap. Beberapa yang dituntut adalah salah satunya kompensasi atas kerusakan seng atau atap rumah warga yang menjadi cepat karatan dan usang akibat polusi smelter. *“Belum cukup umurnya, sudah harusmi lagi diganti,”* katanya. Beberapa hal lainnya yang disoroti adalah ganti rugi atau kompensasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan seperti perbaikan infrastruktur/ jalan yang rusak, terutama di Dusun Mawang.

Terkait dengan gerakan, ia mengatakan ada banyak warga yang tidak begitu percaya lagi dengan lembaga/LSM. Karena pada akhirnya tidak semua tuntutan ini tercapai dan menimbulkan banyak kecurigaan. Kecurigaan yang umumnya timbul di warga itu muncul setelah aksi biasanya dilakukan. Ada satu kejadian dimana ada orang yang sebelumnya cukup vokal bersuara terkait tuntutan hak untuk bekerja di perusahaan, namun belum juga persoalan ini diselesaikan, dia sendiri yang masuk jadi karyawan di perusahaan. Itulah yang membuat warga yang benar-benar menuntut hak-haknya dan mengharapkan ada perbaikan setelahnya menjadi kian muak. Beberapa nama ia soroti sebagai oknum-oknum yang mementingkan pribadinya.



Ia sendiri mencoba objektif di tengah persoalan di Papanloe. Ia mencoba memahami bagaimana ia sebaiknya melihat persoalan yang di satu sisi adalah seorang pekerja di perusahaan, di sisi lain adalah bagian dari warga biasa di luar perusahaan. Ia pernah menyatakan sikapnya itu terhadap lembaga di Papanloe.

*“Saya bukan bagian dari lembaga, saya bukan bagian dari Pemdes, saya adalah masyarakat, saya adalah pekerja kalau di dalam perusahaan, ketika saya pulang kerja di lokasi saya, ada RT, RW, ada kepala Desa saya, jadi lembaga apapun dan siapapun di dalamnya, baik pun Pemdes, saya objektif berpikir, saya siap berbicara dan siap berkomentar, karena saya punya istri, saya punya anak, saya yang rasakan, apabila tidak jalan sesuai dengan visi misimu, siap dikoreksi, saya siap bersuara, begitu statement-ku sama lembaga,”* ungkapnya.

Menurutnya masyarakat sudah pintar, masyarakat tidak mau lagi dibodoh-bodohi, bukti yang mereka perlukan. Tidak bisa disalahkan masyarakat secara menyeluruh atas sikapnya itu. Itulah mengapa masyarakat, dan juga teman-temannya di Papanloe sudah muak dengan lembaga yang awalnya berkeinginan membantu namun pada akhirnya bungkam.

Pergolakan protes ini berlangsung secara paralel dengan agenda Huadi bersama PEMDA Bantaeng menentukan titik lokasi pabrik smelter dan mekanisme pembebasan lahan-lahan yang dikuasai warga. KIBA sendiri berdiri di atas lahan seluas 3.160 Ha, dimana 300 ha milih negara, dan 2000an ha lebih milik warga. Lobi-lobi Bupati NA ke warga dibantu kepala Desa dan elil-elit lokal sangat efektif menggoyahkan keyakinan warga untuk bertahan tidak melepas atau menjual lahan ke Huadi. Tuan-tuan tanah didekati karena lebih mudah dipengaruhi, dan cukup berhasil. Gejolak protes warga ternyata membuat posisi tawar mereka cukup tinggi. Terbukti dengan meningkatnya harga beli Huadi 100% dari harga umum yang berlaku. Satu per satu warga mulai goyah dihadapkan dengan nilai jual lahan yang sangat tinggi. Tanah-tanah mulai dilepas ke Huadi, gerakan protes mulai redup akibat gelombang surut warga yang dengan sadar menjual lahannya. Selain menerima uang pembebasan lahan, warga yang menjual lahan ke Huadi juga berhak mendapatkan jatah untuk bekerja di Huadi. Waktu itu perjanjian yang berlaku bagi warga yang

menjual 1 hektar mendapat jatah satu orang untuk jadi karyawan. Semakin luas lahan yang dijual ke Huadi, semakin banyak juga jatahnya. Sementara warga yang menolak menjual lahan akan mendapatkan intimidasi berupa penutupan akses ke lahan. Rata-rata alasan warga yang kukuh tidak menjual lahan karena ada amanah dari orang tua untuk menjaga lahan, atau juga karena ada kuburan keluarga di lahan. Seiring waktu lahan mereka pasrah juga untuk lepas lahan karena intimidasi Huadi ke warga.

### **Dinamika Aktor & Kelompok di KIBA**

Berbicara tentang peta aktor dan rombongan di kisaran smelter-KIBA, sejauh ini berdasarkan refleksi tim asesmen menandai sejumlah individu warga, OMS, dan rombongan kecil buruh yang cukup strategis dan potensial untuk diajak dalam rombongan belajar. Ada rombongan yang dibentuk berdasarkan inisiatif warga, tetapi kami membaca gerakan mereka cenderung lebih berorientasi pragmatis demi mendapat keuntungan dari setiap gejolak, demo, protes yang dilakukan. Model organisasinya juga sangat sentralistik, terpusat pada elit lokal yang profesinya sebagai pengepul hasil rumput laut, juragan pemasok material ke Huadi. Mereka-mereka ini seringkali melakukan protes dengan menutup atau memblokir akses jalan masuk ke Pabrik. Setelah tuntutan didengar, mereka membubarkan diri. Sangat jarang kelompok-kelompok inisiatif warga ini mengangkat isu yang lebih struktural dan menuntut peran pemerintah.

Rombongan strategis lainnya lebih banyak bergerak melihat dampak sosio-ekologis Huadi dan banyak melakukan aksi kampanye untuk menyuarakan kerusakan lingkungan oleh aktifitas ekstraktif smelter. Rombongan ini terdiri dari OMS lokal dan NGO di Makassar yang berjejaring dan membangun aliansi hingga level nasional.

Menurut Andi, di awal-awal perusahaan akan masuk, dan dalam upaya pembebasan lahan, ada berbagai respon yang muncul. Ia terlibat dalam mendampingi nelayan/petani rumput laut. Ia dulu terlibat sebagai bagian dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang juga menjadi mitra belajar warga di Papanloe. Ia juga mengatakan jika dulu ada berbagai lembaga atau NGO yang terlibat dalam gerakan-gerakan yang muncul di Papanloe. Salah satu yang ia sebutkan adalah Balang Institute. Dalam agenda-agenda warga bersama dengan Balang Institute, ia juga terlibat di sana, begitu pun sebaliknya. FPR, Pembaru, PMII, hingga pendamping hukum LBH Makassar, dan beberapa lembaga lainnya ia katakan biasanya terlibat dalam aliansi.

Dalam rentang waktu 2010-2014, ada berbagai respon yang muncul. Pada awalnya muncul berbagai penolakan dari warga setempat. Penolakan muncul sebab tidak adanya kejelasan di awal terkait rencana smelter di KIBA. Warga hanya mengetahui terkait rencana kawasan industri dimana mereka nantinya akan terserap sebagai pekerja. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup detail dan terbuka tentang gambaran dampak sosial dan lingkungan yang akan ditimbulkan perusahaan. Menurut dia, harusnya pemerintah terbuka tentang potensi dampak yang akan muncul, itu yang tidak dilakukan saat sosialisasi.

Menurut Andi, yang bisa direfleksikan terkait gerakan di seputar KIBA adalah pendekatan sejauh ini memang cenderung kasuistik. Misalnya, pendampingan warga dalam memperoleh hak-haknya, atau pendampingan buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dalam kasus PHK misalnya, atau menuntut pertanggungjawaban perusahaan dalam kasus-kasus kecelakaan kerja. Sebenarnya itu menjadi pintu masuk untuk proses-proses belajar bersama dengan pekerja. Setelah itu sudah ada beberapa kali kajian dan obrolan bersama dengan teman-teman buruh.

Saat itu ada sebuah aliansi taktis yang melibatkan berbagai organ di Bantaeng hingga Makassar, aliansi itu dinamakan KAPEKA (Koalisi Pemerhati Ketenagakerjaan). Pada saat terjadi PHK di Huadi imbas dari peraturan karantina karyawan saat Covid 19 pada tahun 2019-2021. 13 orang pekerja didampingi dalam menuntut hak-haknya atas pesangon. Saat itu aliansi ini melibatkan berbagai organisasi, dari Balang Institute, FPR, Pembaru, PMII, hingga pendamping hukum LBH Makassar, dan juga individu-individu dari berbagai lembaga di luar aliansi taktis untuk turut bersolidaritas. Aliansi ini berhasil memperjuangkan hak-hak pekerja yang di-PHK tersebut.

Namun dalam perkembangannya, ia mengatakan gerakan-gerakan yang bermunculan ini memang belum sampai ke tahap yang lebih progresif, karena biasanya gerakan itu lebih taktis, nanti terjadi sesuatu baru kemudian ada gerakan. Situasinya juga hanya memungkinkan hal tersebut, terutama kalau konteksnya adalah perburuhan. Sulit juga, sebab jika jumlah yang bergerak hanya 20-30 orang, itu hanya akan membahayakan mereka. Apa lagi pekerja yang baru bekerja dalam rentang setahun hingga tiga tahunan, itu sangat mudah diatasi oleh perusahaan, mungkin perusahaan hanya tinggal menyiapkan dana semilyar rupiah untuk membereskan persoalan pesangon masalah selesai, itu mudah bagi perusahaan.

Kemudian, selain buruh, kita juga selalu mencoba tidak mengabaikan dampak-dampak lingkungan. Berbagai hal kita coba lakukan untuk menggerakkan. Seperti dengan isu kesehatan dan kekeringan sumber air bersih. Yang paling disoroti adalah polusi udara dari smelter dan debu yang dikeluhkan warga, terutama di Mawang. Tantangannya adalah kita tidak punya keahlian dalam memastikan bahwa itu adalah dampak langsung, misalnya secara medis untuk kasus ISPA. Uji sampel yang dilakukan oleh teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Walhi misalnya, itu seperti tidak diakui atau diabaikan oleh mereka. Yang mereka akui hanya pengujian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang punya otoritas dan keahlian dalam hal tersebut.

Dalam gerakan, ada kekhawatiran atau semacam rasa skeptis dari terhadap lembaga/organisasi yang datang. Ini karena kerap kali terjadi semacam laporan atau aduan yang hanya digunakan untuk dimanfaatkan, dibajak untuk kepentingan tertentu. Misalnya oleh elit-elit lokal, yang punya pengaruh, ketika aduan-aduan itu dilaporkan, atau didemonstrasikan, ketika kepentingannya untuk memasok material misalnya sudah terpenuhi, maka gerakan itu terhenti lagi. Yang paling dirugikan adalah orang-orang di bawah yang benar-benar terdampak.

Namun, dari situ ia merasa tidak pesimis dengan gerakan di Pajukukang, ia optimis. Karena menurutnya, syarat-syaratnya itu ada. Pertama, kehati-hatian warga membuka informasi, ketidakpercayaannya pada lembaga-lembaga yang masuk, itu adalah kemajuan, sebab warga merasa tidak lagi mau terus-menerus dimanfaatkan. Kedua, inisiatif-inisiatif warga untuk bergerak itu selalu ada. Warga pernah memblokir jalan yang harus dilalui truk perusahaan untuk menyabotasi proses produksinya. Namun, saat dilakukan pemboikotan, proses produksi terus berjalan, akhirnya muncul ide untuk memboikot pemasok gas untuk konsumsinya, karena jika itu yang dihentikan maka proses produksi akan tersendat. Karena syarat-syaratnya sudah ada, inisiatif dan kemauan itu ada, saat ini yang belum ada adalah pendekatan atau metode yang benar dan tepat untuk situasi-situasi di Pajukukang.

#### D. Dampak-Dampak Sosial Ekologis oleh Pabrik Smelter

##### **Kemana Angin Berhembus, Disitu Sesak Bermukim: Polusi Udara dan Dampaknya Bagi Warga**

Polusi udara adalah krisis yang tak bisa ditutup-tutupi dan diabaikan. Krisis ini dimungkinkan oleh akumulasi keuntungan terus menerus oleh perusahaan. Bagi perusahaan, selama cerobong asap pembakaran tetap memuntahkan asap dan debu disertai bau menyengat berarti tungku-tungku itu masih aktif dan akan terus mencetak laba untuk perusahaan. Mesin-mesin itu menyala tanpa henti, tak pernah tidur. Dan selama itu pula, ia akan mencemari udara.

Secara kasat mata, kita dapat melihatnya secara langsung—bagaimana keputihan asap tersebut keluar dari cerobong pembakaran, diangkut dan bergeser lewat tiupan angin, dan menyelimuti pemukiman bagai kabut. Ketika sampai di pemukiman, polusi dalam bentuk debu halus berwarna hitam dan bau menyengat, dihirup oleh ratusan hingga ribuan warga di sekitar perusahaan smelter. Saat terhirup, tenggorokan terasa kering, dada sesak, dan kerap menyebabkan warga batuk-batuk.

Dalam setahun, krisis akibat pencemaran udara ini mencekik warga secara bergantian. Saat musim timur (kemarau) berlangsung (Desember hingga April), yang tercekik dan merasakan sesak adalah kampung-kampung dengan pemukiman padat penduduk yang berada di bagian Barat (terutama Barat Daya) perusahaan, seperti Desa Papanloe, Desa Baruga, hingga menjangkau kabupaten tetangga, Bulukumba.

Jika musim barat (penghujan), krisis pencemaran udara akan berpindah mengikuti tiupan angin menuju bagian Timur Laut. Melintasi pemukiman padat penduduk dan menyebar polusi lewat udara. Saat musim timur berlangsung (Mei-Desember), Desa Papanloe (utamanya Dusun Mawang) dan Desa Borong Loe adalah kampung yang paling terdampak udara kotor. Bahkan, dalam beberapa informasi bisa sampai Jeneponto, salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Bantaeng bagian Barat. Dengan demikian, krisis yang dikirim perusahaan lewat udara sangat bergantung pada arah angin.

Saat kami datang pada bulan Agustus dan mengunjungi kampung-kampung di sekitar smelter, kami menetap di Desa Baruga sebagai *basecamp*. Polusi udara seperti debu, asap dan bau menyengat hampir tidak terasa sama sekali. Seperti dalam

ungkapan salah seorang warga, *“Jika musim timur, baunya tidak sampai disini. Tapi kalau anda datang musim barat, kalian akan merasakan seperti yang kami alami”*.

Pengalaman itu kian kontras dengan apa yang kami alami di Dusun Mawang, Desa Papanloe. Suatu malam, kami mendatangi salah seorang warga di Mawang. Saat hendak masuk di lorong perkampungan, pandangan kami terhalang kabut asap. Tidak ada kendaraan yang berlalu lalang di lorong itu—padahal masih pukul 20.00 lewat. Sebelumnya, lorong itu akan sibuk sampai tengah malam. Apalagi untuk mengobrol di luar rumah dengan tetangga—tidak ada yang ingin melakukannya. Bisa dibayangkan, hampir tidak ada yang berkeliaran kala malam telah datang.

Mata perih dan debu-debu yang berwarna hitam sisa pembakaran tungku perusahaan, menempel pada badan motor dengan cepat. Tidak usah ditanya bagaimana rasanya menghirup asap smelter. Asap yang terhirup memberi efek yang beragam pada masing-masing tubuh kami. Ada yang merasa mual, sakit kepala, gelisah hingga terserang rasa panik yang membuat jantung berdegup kencang. Pada malam itu, kami mengobrol dalam rumah, sambil memakai masker dan disertai rasa khawatir akan kondisi tubuh masing-masing. Pendeknya, kami menghirup udara tercemar sebagaimana orang-orang yang bermukim di Dusun Mawang. Situasi yang pelik dan menyesakkan itu, kian mereka alami berhari-hari, selama angin masih bertiup dari arah timur.

Kampung-kampung disekitar perusahaan smelter menjadi sesak di kala debu, asap, dan bau menyengat itu datang. Polusi itu menimbulkan beragam dampak pada warga. Bagi warga, polusi smelter membuat hidup mereka semakin runyam. Seperti dalam tuturan salah seorang warga tempatan, meskipun polusi smelter tidak langsung membunuh layaknya racun, namun ketika debu itu terhirup kondisi kesehatan akan menurun dan terganggu. Dan akan memiliki efek jangka panjang pada kondisi kesehatan warga.

Salah seorang perempuan juga bercerita pada kami tentang anak tetangganya. Anak yang dimaksud itu kebetulan adalah teman kelas anaknya di salah satu pondok pesantren yang tak jauh dari perusahaan smelter itu berdiri (kurang lebih berjarak sekitar 2 km yang diukur menggunakan google maps) . Tahun lalu (2023), saat debu-debu itu menyerang pemukiman, salah seorang anak tetangganya mengalami sakit-

sakitan. Kondisinya lemas dan berdarah ketika meludah. Keadaan itu membuat ibunya bingung.

“Bagaimana saya akan menjalani hidup ke depannya? Mata pencaharianku disini. Tetapi anakku tak kuat tinggal disini”, ucapnya sambil mengulang perkataan tetangganya. Menurutnya, tetangganya tidak lama lagi akan memindahkan anaknya ke Kabupaten Jeneponto. Ia belum memindahkan anaknya karena situasi sekarang cenderung lebih aman di Desa Baruga. Akan tetapi, sebagaimana tuturan tetangganya, akan memindahkan anaknya saat angin bertiup ke Baruga. Ia hanya menunggu waktu, saat masa itu datang, ia akan memindahkan anaknya. Cerita lainnya datang dari seorang perempuan yang berprofesi sebagai pengrajin bata merah. Sehari-hari ia bekerja dengan suaminya membuat bata merah dan bertani. Sebagai pengrajin bata merah, produktivitasnya akan menurun saat asap smelter datang. Dalam situasi normal, saat bekerja sejak siang hingga sore, ia bisa mencetak 1000 bata merah dalam sehari. Berbeda saat polusi smelter menyebar di pemukimannya, jika mulai siang—ia hanya dapat mencetak kurang dari 1000 bata merah. Sehingga, untuk mencapai target, harus bekerja lebih awal—sejak pagi. Selain berdampak pada produktivitas, debu dan asap smelter membuatnya bekerja dengan menggunakan masker dan lebih cepat lelah.

Selain itu, beberapa perempuan selaku ibu rumah tangga yang kami temui juga mengaku bekerja lebih keras dalam mengurus kebersihan rumah akibat debu. Menjaga lantai tetap bersih, memastikan makanan tidak tercemar debu smelter, dan membersihkan perabotan rumah seperti piring dan gelas secara berkala sebelum digunakan. Selain manusia, tanaman juga terdampak. Tanaman kelor, salah satu sayuran yang banyak di konsumsi oleh warga. Kelor yang mulanya berwarna hijau tua dan dipercaya mengandung beragam nutrisi yang baik bagi tubuh, berubah menjadi hitam dan menjadi racun jika dikonsumsi.

*“Pernah suatu saat saya memasak kelor. Pada saat saya cuci, airnya berwarna kemerahan. Pada saat saya masak, airnya merah. Saya tidak jadi makan. Saya tidak mau makan racun.”* Tutur Ibu Ratna di Desa Baruga.

Selama di kampung, kami juga mendengar keluhan atas tanaman petani akibat polusi dari smelter. Mereka mengeluhkan persoalan gagal panen yang dialami oleh warga. Sawah sebagai sarana penghidupan warga, tak menghasilkan apa-apa. Padi gagal panen, petani menanggung beban berlapis. Salah seorang perempuan yang kami

temui bercerita tentang suaminya yang mengalami gagal panen tahun ini. Mereka adalah keluarga petani tunakisma. Suaminya hanya menggarap lahan milik orang lain dengan skema bagi hasil yang oleh warga setempat sebut *attesang*. Sebagai penggarap, mereka yang memodali ongkos produksi. Namun, polusi smelter, bukan hanya mengancam padi—tetapi juga perekonomian keluarga. Sehingga, mereka harus menanggung kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri.

### **Menyedot Air Tanah: Memperdalam Krisis Atas Air Bersih**

Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup warga yang bermukim di sekitar smelter. Cerita tentang air, adalah cerita yang sangat penting. Hal itu dikarenakan oleh kondisi iklim yang ada di Pajjukukang, termasuk wilayah yang kering. Menurut tuturan setempat, akses terhadap air oleh pemukim awal hanya tersedia di dua sumber air yakni di *bungung rua* (yang saat ini berada di Dusun Bungung Pandang, Papanloe) dan Kubangan besar yang menyerupai danau kecil (yang terletak di Bungung Rua, Papanloe). Dahulu, keduanya dimanfaatkan secara berbeda oleh warga setempat. Bungung rua, yakni sumur dengan dua mata air yang menopang kebutuhan debit air warga, dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan kubangan besar dimanfaatkan untuk memberi minum hewan ternak, untuk mandi warga, dan kebutuhan lainnya.

Namun, tidak diketahui kapan mulanya—orang-orang sudah menggunakan sumur galian—yang biasanya memiliki kedalaman sekitar 2-3 meter. Sumur itu menjadi penyedia utama bagi warga dalam memenuhi kebutuhan air. Sehingga, sumur-sumur galian tak jarang ditemukan di beberapa titik dekat rumah warga. Selain untuk kebutuhan rumahan (seperti mandi dan mencuci), sumur kerap digunakan untuk menopang usaha warga. Misalnya, para pengrajin bata merah sangat bergantung pada suplay air untuk memproduksi bata merah.

Keluhan-keluhan atas akses air semakin mengemuka sejak beroperasinya perusahaan. Menurut salah seorang buruh yang bekerja di perusahaan, bahwa pihak perusahaan telah menyedot air tanah dalam jumlah besar untuk kebutuhan produksi. Mereka mengebor tanah untuk menyedot air—dalam jumlah yang tidak sedikit, sekitar puluhan bahkan ratusan sumur bor. Akibatnya, debit air dalam tanah menjadi berkurang dan berdampak pada akses air bersih warga menjadi terganggu. Hal ini juga semakin diperparah oleh kemarau panjang.



Pada 2023 lalu, menurut cerita seorang perempuan dari Dusun Balla Tinggi, Papanloe, terjadi kekeringan parah. Warga Papanloe tidak bisa mengakses air sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. “Untuk mencuci dan mandi saja”, katanya, “kita tidak bisa. Air sumur kering” lanjutnya. Dalam beberapa cerita yang tersebar juga di kampung, terdengar kabar bahwa beberapa sumur yang ada di kampung mengering. Dan berdampak pada macetnya usaha pengrajin batu merah.

Kekeringan itu juga membuat warga melayangkan protes kepada perusahaan. Mereka menuntut CSR atau tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi keluhan atas air bagi warga terdampak. Tak lama setelah protes dilakukan, pihak perusahaan membangun dua sumur bor. Lalu, mereka juga membagikan air kepada warga. Menanggapi hal ini, salah seorang warga bilang pada kami “nda mempan ji juga itu”. Dengan demikian, air yang diberikan oleh perusahaan tidak sebanding dengan apa yang ia ambil dari warga.

### **Limbah dan Lalu Lalang Aktivitas Kapal Tongkang: Potret Krisis Masyarakat Pesisir Pajjukukang: Nasib Petani Rumput Laut**

Suatu pagi, warga di pesisir Desa Baruga sedang panen rumput laut. Mereka mengangkut rumput laut dari laut menuju bibir pantai. Saat sampai di bibir pantai, warga lainnya akan membantu membawa rumput laut itu dengan gerobak kayu menuju tempat penjemuran yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari bibir pantai. Di sana, salah seorang yang bertugas untuk merontokkan rumput laut dari tali bentang dengan tangan yang dibungkus kaos tangan berbahan kain. Lumut-lumut hijau menempel pada tali rumput laut dan beberapa batang rumput laut (*thallus*) berwarna putih pucat. Beberapa tali lainnya juga ditemplei hama sejenis kerang dengan ukuran yang lebih kecil.<sup>33</sup>

Rumput laut adalah komoditas yang banyak dibudidayakan oleh warga yang bermukim di pesisir Pajjukukang. Dalam informasi yang kami peroleh, beberapa petani rumput laut mengaku telah mengalami gagal panen yang berlangsung

---

<sup>33</sup> Dalam beberapa penelitian, misalnya menurut (Indrayani et al., 2021) menunjukkan bahwa adanya lumut hijau yang menempel pada thallus atau batang, membuat rumput laut sulit untuk melakukan proses fotosintesis. Sehingga, nutrisi yang diserap menjadi kurang. Hal ini dapat berakibat pada kematian rumput laut.

beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, terdapat beragam pandangan yang muncul ketika gagal panen ini dikaitkan dengan aktivitas perusahaan smelter.

Sebagian petani merasa kebingungan menilai fenomena ini. Mereka dilema atas kejadian yang menimpa para petani rumput laut. Disatu sisi, mereka tak yakin bahwa kurangnya produktivitas rumput laut disebabkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena, menurut mereka, belum ada penelitian ilmiah yang pernah dilakukan, apakah pertumbuhan rumput laut yang kerdil dan munculnya penyakit benar-benar disebabkan oleh limbah perusahaan atau bukan. Kebingungan ini menjadi semakin tajam ditengah perubahan cuaca semakin sulit ditebak saat ini.

Kendati demikian, meski berada dalam kebingungan yang tak kunjung terang, mereka juga tak bisa mengabaikan sama sekali keberadaan perusahaan. Salah seorang petani bercerita tentang produktivitas rumput laut yang ia budidayakan.<sup>34</sup> Menurutnya, sebelum perusahaan datang, saat ia mengikat 100 bentang bibit, ia bisa panen hingga 6 pikul. Namun setelah beroperasinya perusahaan pada tahun 2019 lalu, jika mengikat bibit 100 bentang hanya dapat menghasilkan 2 pikul lebih saat panen. Selain itu, semenjak beroperasinya perusahaan, rumput laut jenis katonik menjadi lebih rentan. Sehingga, kebanyakan petani menyiasatinya dengan membudidayakan jenis *Saparia* (dalam masyarakat setempat disebut Sp)—dengan harga yang lebih rendah. Dengan demikian, pendapatan para petani juga akan berkurang. Turunnya produktivitas panen juga dituturkan oleh salah seorang pedagang. Sebelum smelter datang, ia bisa membeli 200 ton/ tahun dari petani. Dan saat ini, penjualan dari petani hanya mencapai 50 ton per tahunnya.

Lebih jauh, sejak awal kehadiran perusahaan telah memberi dampak bagi petani rumput laut. Laut yang di reklamasi untuk dijadikan pelabuhan sementara (jetty) adalah bekas lahan budidaya rumput laut—yang disebut lokasi. Dalam keterangan yang kami dapatkan, setidaknya terdapat ratusan lokasi yang sebelumnya mendiami keberadaan pelabuhan saat ini. Dan pembebasan lokasi dengan skema ganti rugi masih terus dilakukan hingga saat ini—dimana sekitar 67 lokasi rumput laut sedang dalam proses pembebasan oleh perusahaan.

Dengan berkurangnya lokasi rumput laut produktif kian berdampak pada banyak orang. Bukan hanya pada petani selaku pembudidaya, tetapi juga bekerja dan

---

<sup>34</sup> Wawancara Agustus 2024

mendapat tambahan penghasilan dari komoditas ini. Misalnya, para pencari rumput laut liar yang disebut pa' abo-abo. Pa' abo-abo mencari untung dari para petani yang membudidayakan rumput laut. Mereka memungut dari rumput laut yang jatuh dan terbawa ombak. Dalam memanen rumput laut liar, terdapat dua cara yang dilakukan. Ada yang memungut di pinggiran bibir pantai—yang dominan dilakukan oleh perempuan. Sedangkan para lelaki biasa memanen liar dengan menggunakan jaring. Mereka biasanya menebar jaring sehari sebelum diambil. Berharap gelombang membawa rumput laut yang hanyut menempel pada jaring yang mereka tebar.

Dalam proses produksi rumput laut, peran perempuan menjadi sangat sentral. Para perempuan, biasanya menjadi buruh pengikat. Dalam setiap bentangnya, tenaga kerja mereka diupah sekitar 2.500-3.000 per talinnya. Hilangnya lokasi-lokasi rumput laut produktif oleh pemabngunan jetty, sedikit banyak akan berdampak pada permintaan tenaga kerja para buruh pengikat.

Meskipun terdapat dilematis atas menurunnya produksi rumput laut, namun para petani cukup yakin kegagalan panen yang mereka alami ketika musim penghujan. Saat musim hujan berlangsung, laut akan memerah. Ada dugaan bahwa merahnya laut disebabkan oleh limbah perusahaan yang dibuang melalui sungai-sungai kecil yang mengalir sampai ke laut. Selain mengalir sungai dengan limbah, pihak perusahaan kerap membuang limbah slag panas untuk bahan timbunan pelabuhaan—yang kerap memunculkan asap di sekitar jetty.

Sementara itu, limbah yang mencemari laut kerap disebabkan oleh aktivitas kapal tongkang dengan membuang oli kapal secara semena-mena dan bahan ore yang jatuh ke laut saat proses pengangkutan (secara tidak sengaja). Hal ini diduga akan berdampak keberlangsungan ekosistem laut di pesisir, utamanya bagi rumput laut yang menjadi harapan bagi banyak orang di pesisir Pajjukukang.

Nelayan bekerja dengan pendapatan yang tak menentu. Mereka mencari ikan dengan berbagai jenis alat tangkap seperti jaring (lanra) dan pancing rawai. Menurut cerita tempatan, di sekitar bangunan jetty adalah wilayah tangkap bagi banyak nelayan. Namun, setelah beroperasinya perusahaan, ikan-ikan disana semakin kurang. Selain itu, salah seorang nelayan juga mengaku bahwa mereka dilarang menangkap ikan disekitar jetty. Suatu waktu, saat sedang memancing mendekati wilayah jetty, ia ditegur oleh satpam perusahaan dan disuruh untuk berbalik arah.

Dengan demikian, kehadiran pelabuhan jetty, bukan hanya menimbun laut, tetapi menutup ruang hidup warga secara bersamaan.

Keluhan lain akibat operasi perusahaan muncul dari nelayan pemancing. Aktivitas kapal tongkang yang mengangkut material ore dan batu bara kerap berada diluar jalur. Menurut tuturan setempat, mereka memotong jalan untuk mempersingkat waktu pelayaran dan menghemat bahan bakar. Namun, laut bukan sarana lalu lintas yang kosong. Ada nelayan yang juga beraktivitas di laut. Sehingga, aktivitas kapal yang dinilai ugal-ugalan itu, kerap membuat nelayan merasa was-was ketika memancing.

Pancing rawai adalah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap jenis ikan karang seperti kerapu, sunu, ketamba, dan ikan karang lainnya. Dalam tali pancing rawai, lazimnya memiliki panjang 1000 dan memiliki 100-400 mata pancing. Sebelumnya, mereka tidak perlu khawatir ketika pancing diturunkan dan dibentangkan. Tetapi, hari ini tidak demikian. Sebelum memasang pancing, para nelayan harus memastikan keadaan aman dari kapal tongkang. Namun, kapal tongkang kerap muncul tiba-tiba—apalagi dalam proses pemancingan menggunakan rawai membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk pasang hingga pancing ditarik.

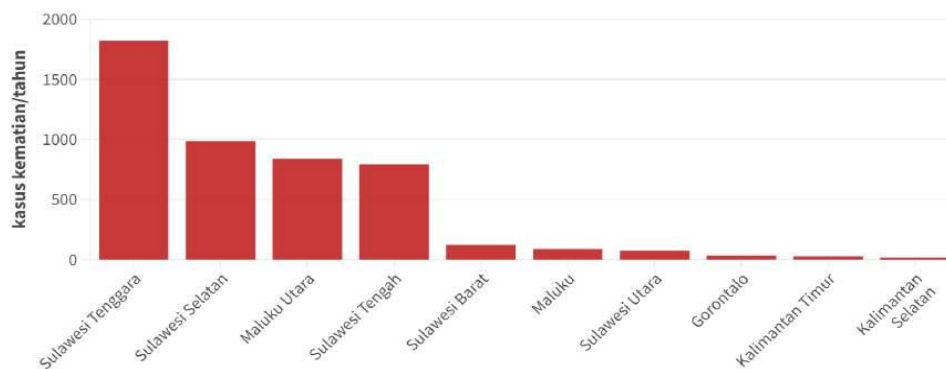
Aktivitas kapal tongkang kerap menjadi ancaman yang nyata bagi nelayan pemancing. Dalam suatu kejadian, salah seorang nelayan pemancing bercerita, kapal tongkang yang memuat ore membuat kapalnya hampir terbalik. Kejadiannya bermula saat tali besar dan panjang terjatuh dari kapal tongkang tersebut, terseret dan kemudian tersangkut pada tali pancingnya. Dalam kejadian itu, perahu yang ia tumpangi (dengan panjang 8,5 m dengan lebar 60 cm) menjadi tidak seimbang. Perahunya tertarik kapal tongkang disatu sisi, dan jangkar perahu yang tertancap di dasar disisi lain. Hampir saja, katanya. Untungnya jangkar yang ia turunkan tidak menancap kuat, sehingga perahu tersebut terseret ke arah mana tongkang melaju. Kejadian itu berlangsung pada 2023 lalu, dan melahap sepotong pancing, memutus separuh alat yang ia gunakan untuk mencari hidup. Dan ia merugi sekitar Rp. 500.000 atas kejadian itu. Kejadian lain yang juga pernah ia alami yaitu hampir tertabrak kapal tongkang.

## Dampak Sosial Ekologi PLTU *captive* di Jeneponto

Berdasarkan temuan Walhi Sulawesi Selatan, bahwa ditemukan pencemaran laut akibat cecceran batubara dan logam berat dengan potensi kandungan (Hg, Cr, Cu, & Fe) yang berpotensi menjadi racun bagi organisme laut. Nelayan, Petani rumput laut dan perempuan kehilangan pendapatan yang sangat besar hingga ratusan juta rupiah. Pembakaran batubara menyebabkan Polusi udara membuat kesehatan orang dewasa hingga Balita sekitar terpapar gangguan kesehatan seperti batuk-batuk berdahak dan gatal-gatal. PLTU merubah lanskap dan fungsi ekologi kampung. Pola bertani dan jenis tanaman berubah karena persoalan banjir yang makin rutin sejak ada PLTU (Syafaat et al., 2023).

### Kematian akibat polusi udara terkait dengan emisi smelter dan captive power pada tahun 2030

berdasarkan provinsi yang terkena dampak, karena emisi dari tiga provinsi yang dievaluasi



Sumber: Analisa CREA.



**Grafik 1. Kematian Akibat Polusi Udara Terkait Dengan Emisi Smelter Dan captive power pada tahun 2030**

Dampak lain yang muncul juga terasa manfaatnya kepada warga, seperti studi (Muttar et al., 2021) yang melihat kehadiran PLTU juga berdampak positif, antara lain pada aspek: membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, terpenuhinya kebutuhan listrik warga Jeneponto. Akan tetapi lebih lanjut Muttar juga menyebut bahwa eksternalitas PLTU jauh lebih besar dan berbahaya, seperti: lingkungan menjadi tercemar karena polusi asap, yang juga berpengaruh secara langsung pada air laut yang membuat rumput laut jadi menurun kualitasnya. Mulai muncul gangguan kesehatan yang dialami oleh warga sekitar PLTU, seperti gatal-gatal, iritasi kulit dan batuk berdahak. Bantuan dari PLTU ke warga tidak merata sehingga menimbulkan

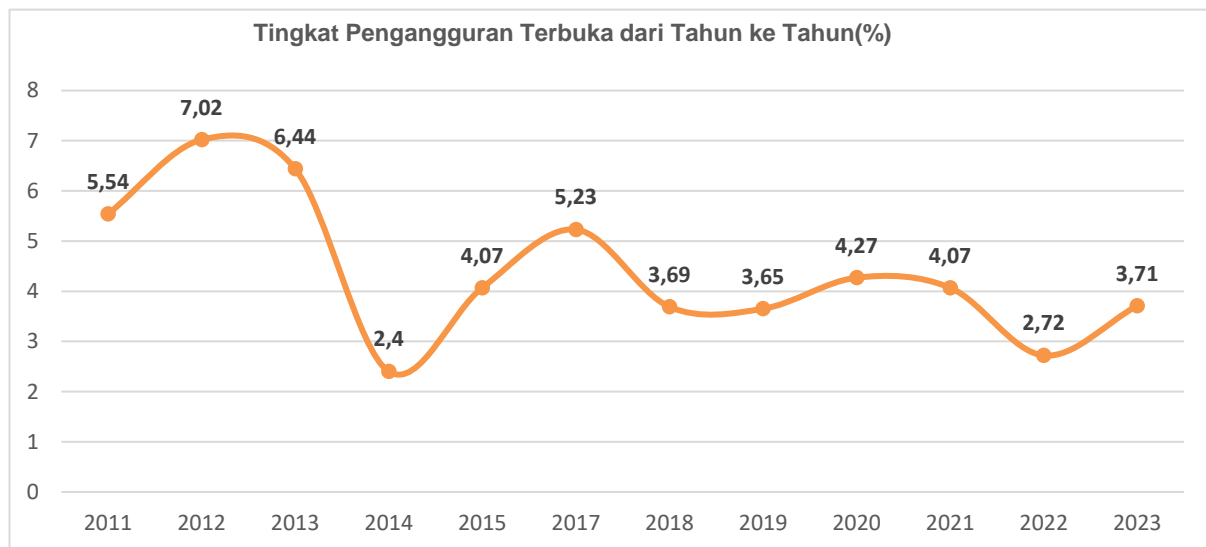
konflik. Dan juga kenyamanan warga sangat terganggu karena polusi suara dari mesin pabrik sangat bising, ketidaknyamanan ini juga disebabkan karena cuaca makin bertambah panas (Muttar et al., 2021).

## ISU PERBURUHAN: MENCIPTAKAN TENAGA KERJA INDUSTRIAL DAN CADANGAN BURUH YANG MELIMPAH PADA KIBA

Pemerintah Kabupaten Bantaeng menjanjikan adanya pembukaan lapangan kerja yang besar dan diperuntukkan bagi warga Bantaeng dalam perencanaan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng. Semangat yang sejalan dengan proyek hilirisasi nikel Presiden Jokowi ini dianggap mampu mempekerjakan dan menyejahterakan pekerja lokal Bantaeng. Pada tahun 2023, Huadi Indonesia mengklaim bahwa telah menyerap sebagian besar calon pekerja asal Bantaeng. Jumlah pekerja asal Bantaeng yang terserap berjumlah 2207 orang (78,29% dari total pekerja). Sementara itu, pekerja lokal yang berasal dari Desa Papanloe, Borong Loe, dan Baruga diklaim telah mencapai 976 orang yang tersebar ke dalam perusahaan-perusahaan naungan Huadi Indonesia (Zuhri et al., 2023). Jumlah tersebut persentasenya hanya 44,22% dari total pekerja asal Bantaeng.

Smelter di KIBA berdiri di atas kondisi ketenagakerjaan Bantaeng yang sebelumnya memang sudah bermasalah. Bantaeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menyumbang ribuan angka pengangguran terbuka.

**Grafik 1. Data Persentase Pengangguran Terbuka yang Diolah dari Data BPS (Bantaeng dalam Angka)**



Di Bantaeng, tingkat pengangguran terbuka<sup>35</sup> naik dari 3,69% pada tahun 2018 menjadi 3,71% pada tahun 2023 lalu, dalam rentang waktu tersebut smelter atau industri nikel telah beroperasi di Bantaeng. Persentase pengangguran terbuka tertinggi di Bantaeng terjadi pada tahun 2012 silam, yaitu sebesar 7,02%. Titik terendahnya adalah pada tahun 2014 (2,4%), namun setelahnya persentasenya naik lagi pada tahun 2015 (5,23%) dimana proses konstruksi beberapa perusahaan di KIBA telah berjalan. Secara keseluruhan, ada penurunan angka pengangguran terbuka jika dilihat dari tahun 2011 ke tahun 2023. Namun dalam 3 tahun terakhir, meski terjadi penurunan pada tahun 2022 (2,72%) dari tahun 2021 (4,07%), pada akhirnya naik lagi pada tahun 2023 lalu menjadi 3,71%. Dengan demikian, pada tahun 2023 terdapat 4.416 orang berstatus pengangguran terbuka dari total angkatan kerja aktif sejumlah 118.958 orang. Dari total angkatan kerja aktif terdapat 114.542 orang yang telah bekerja, namun masih didominasi sektor informal. Hanya 31.027 orang (27,09%) yang terserap ke dalam sektor formal, sisanya 83.515 orang (72.91%) bekerja di sektor informal.<sup>36</sup> Sementara itu, kehadiran smelter juga tampaknya belum berkontribusi secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan penduduk Bantaeng meski telah diklaim telah berkontribusi pada PDRB Bantaeng.<sup>37</sup>

---

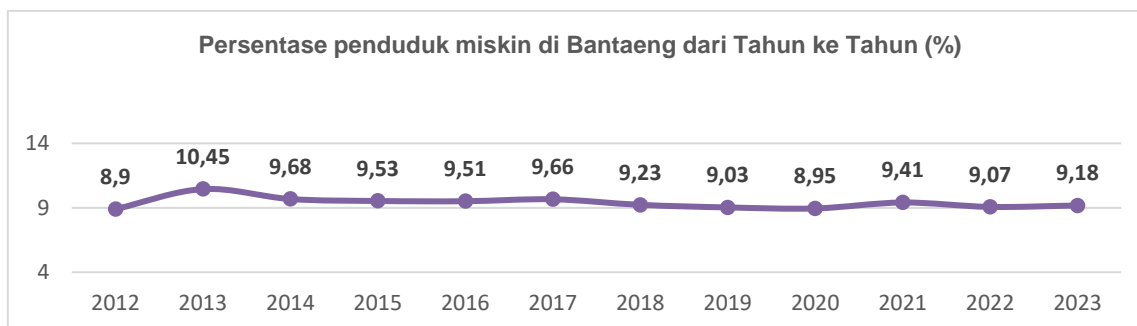
<sup>35</sup> Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan definisi BPS adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT adalah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja aktif.

<sup>36</sup> Sulsel.bps.go.id (2024). "Jumlah Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023", <https://s Sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkwMyMy/jumlah-pekerja-menurut-sektor-dan-kabupaten-kota.html>

<sup>37</sup> Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng sempat mencapai 15,45%, itu menempatkannya pada posisi tertinggi di Sulsel, dan peringkat 6 secara nasional. Laju pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan industri. Dikutip dari [https://makassar.antaranews.com/berita/502359/ekonomi-bantaeng-melaju-berkat-bantuan-modal-bagiumkm#:~:text=Dari%20sisi%20Pendapatan%20Domestik%20Regional%20Bruto%20\(PDRB\)%2C,pertumbuhan%20ekonomi%20Bantaeng%20didorong%20oleh%20sektor%20industri](https://makassar.antaranews.com/berita/502359/ekonomi-bantaeng-melaju-berkat-bantuan-modal-bagiumkm#:~:text=Dari%20sisi%20Pendapatan%20Domestik%20Regional%20Bruto%20(PDRB)%2C,pertumbuhan%20ekonomi%20Bantaeng%20didorong%20oleh%20sektor%20industri)



**Grafik 2. Data Persentase Penduduk Miskin Bantaeng dari Tahun ke Tahun, diolah dari Data BPS (Bantaeng dalam Angka)**



Grafik di atas menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bantaeng dari tahun ke tahun. Pada rentang waktu 2012-2014, sebelum smelter nikel PT HNAI beroperasi di Bantaeng—masih dalam proses persiapan dan konstruksi—persentase penduduk miskin di Bantaeng pernah mencapai 10,45% di tahun 2013, lalu turun menjadi 9,68% pada tahun 2014. Sementara itu dalam 3 tahun terakhir (2021-2023) angka penduduk miskin relatif berkurang, dari 9,41% pada 2021 menjadi 9,18% pada 2023. Ada penurunan sebanyak 0,23%. Jika dilihat dalam rentang 12 tahun terakhir, grafik terlihat cenderung stagnan meski terlihat ada tren penurunan. Namun persentase penduduk miskin pada tahun 2023 masih lebih tinggi dari pada tahun 2012 silam. Sejah ini, pengaruh kehadiran smelter dalam menekan angka kemiskinan di Bantaeng tampaknya tidak cukup signifikan.

Penggambaran situasi di atas adalah *impact* sementara dari industrialisasi dan hilirisasi nikel di Bantaeng yang didorong oleh Pemkab Bantaeng, dalam hal ini diinisiasi oleh Nurdin Abdullah ketika menjabat Bupati Bantaeng hingga meraih kursi hangat Gubernur Sulawesi Selatan. Perkawinan ambisi hilirisasi nikel Jokowi dan peningkatan produktivitas daerah Nurdin Abdullah diharapkan dapat menumbuhkan kesejahteraan rakyat Bantaeng, terutama di Desa-Desa terdampak di Kecamatan Pajjukkukang dan Gantarangekeke, namun ini masih menyisakan berbagai persoalan.

Meski warga lokal yang terdampak kerap dianggap sebagai prioritas utama yang akan diserap oleh perusahaan dan pemerintah, keterserapan pekerja lokal itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari tuntutan-tuntutan yang sering disuarakan oleh warga dalam beberapa kali melakukan aksi. Sejak perusahaan mulai beroperasi, simpul-simpul warga yang terkonsolidasi kerap menggelar demonstrasi, salah satu isu yang didorong adalah hak-hak warga lokal untuk mengakses pekerjaan di perusahaan yang

beroperasi di daerahnya sendiri.<sup>38</sup> Masalah keterserapan warga lokal di perusahaan bukan berarti telah selesai. Ini persoalan yang masih menjadi keresahan orang-orang yang belum terserap—bahkan yang telah terserap—terutama bagi beberapa pemuda dan angkatan kerja aktif di Desa-Desa yang diprioritaskan.

#### **A. Bagaimana Orang-Orang Terserap dan Tidak Terserap ke Dalam Perusahaan**

Dalam beberapa tahun terakhir perusahaan mengklaim di berbagai media massa telah melakukan proses rekrutmen yang terbuka dan transparan. Beberapa lembaga dilibatkan dalam rangkaian proses tersebut, terutama Perseroda, dalam hal ini PT Bantaeng Sinergi Cemerlang (Basic) selaku pengelola Kawasan Industri Bantaeng. PT Basic menyediakan platform CTK untuk mengakomodir pendaftaran pelamar pekerjaan dengan berbagai informasi kebutuhan perusahaan. Lembaga lain yang terlibat dalam proses penyediaan calon pekerja adalah Balai Latihan Kerja (BLK) Bantaeng (saat ini bernama BPVP: Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) yang memberikan pelatihan vokasi pada calon pelamar sebagai modal dasar untuk bekerja, begitupun dengan Akademi Komunitas Manufaktur (AK-Manufaktur) Bantaeng yang memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang keterampilan-keterampilan praktis para calon tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Saat ini orang-orang di wilayah terdampak berharap dapat terserap masuk ke perusahaan, terutama bagi tenaga-tenaga produktif. Kami sempat berbincang dengan salah satu kepala Desa di wilayah terdampak, Desa Papanloe. Menurutnya, berdasarkan aspirasi yang diterimanya, di Desanya sendiri sekitar 80% warganya berharap dapat masuk bekerja. Kepala Desa Baruga yang sempat ditemui dalam kesempatan terbatas mengatakan bahwa kategori umur yang terserap di perusahaan itu berkisar antara 18-40 tahun. Namun, menurutnya usia pekerja saat ini berkisar antara 18-30 tahun. Dari tingginya minat warga untuk bekerja saat ini, masih terdapat beberapa persoalan yang diresahkan oleh beberapa pelamar pekerjaan. Keresahan ini umumnya datang dari orang-orang yang bermukim di Desa-Desa prioritas. Salah seorang pemuda<sup>39</sup> di Desa Baruga misalnya, ia telah mendaftar setahun sebelumnya namun belum mendapat kepastian hingga saat ini. Ia tidak mendapatkan informasi

---

<sup>38</sup> Makassar.tribunnews.com (2021). "Penuhi Tuntutan Pengunjuk Rasa, PT Huadi Siap Pekerjakan Warga Papanloe Tanpa Seleksi", <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/21/penuhi-tuntutan-pengunjuk-rasa-pt-huadi-siap-pekerjakan-warga-papan-loe-tanpa-seleksi?page=1>

<sup>39</sup> Bukan nama sebenarnya

yang jelas tentang statusnya sebagai pelamar, apakah masih diproses, diluluskan, atau tidak diluluskan sama sekali ke jenjang seleksi berikutnya, statusnya mengambang meski ia telah melalui tahap peningkatan kapasitas di AK-Manufaktur Bantaeng sebelumnya.

Dalam kasus lain, menurut salah satu informan yang merupakan salah seorang ibu dari salah satu pelamar, keluarga yang tidak punya lahan untuk dibebaskan pada perusahaan akan lebih sulit meloloskan anak-anaknya untuk terserap. Akan lebih sulit lagi jika tidak punya koneksi dengan orang-orang perusahaan. Anaknya telah berkali-kali mendaftar ke PT Huadi Nickel Alloy Indonesia namun tidak kunjung lulus. Ia pernah sampai ke tahap wawancara dan dijanjikan untuk dikabari seminggu kemudian, namun panggilan yang dinantinya itu tak kunjung datang juga. Anaknya bahkan telah mengikuti peningkatan kapasitas dan pengalaman di Balai Latihan Kerja (BLK) Bantaeng saat itu, namun akhirnya tidak ada kepastian. Pemuda itu kini sudah sangat bosan mengeluarkan uang dan putus asa mengurus berkas-berkas lamaran ketika lowongan kerja kembali terbuka.

Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa proses rekrutmen ini belum cukup transparan bahkan dengan hadirnya lembaga-lembaga tersebut, sebab wewenang penuh dalam penyeleksian akhir tetap berujung di hadapan HRD Perusahaan yang sejauh ini kerap dikaitkan dengan praktik nepotisme. Sosok populer dan berpengaruh di lingkup Huadi Indonesia yang sering dikaitkan dengan isu ini adalah Ritha Latippa sebagai HR Manager di PT HNAI. Sementara itu tingkat persaingan dalam mengakses pekerjaan kian meningkat untuk formasi kebutuhan perusahaan yang masih sangat terbatas. Di situs PT Basic sendiri telah terdapat 6.636 jumlah pelamar<sup>40</sup> untuk berbagai kebutuhan.

Saat asesmen ini dilakukan, isu tentang rekrutmen masih diidentikkan dengan praktik nepotisme dan proses-proses yang diskriminatif, setiap pelamar tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Proses diskriminasi ini terjadi ketika orang-orang tertentu bisa direkrut melalui jalur “orang dalam”, sementara yang tak memiliki akses terhadap jalur tersebut kecil kemungkinannya mendapatkan kesempatan yang

---

<sup>40</sup> Platform informasi calon tenaga kerja (CTK) dan data posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Dikutip dari <https://info.ctk-kiba.com/>

sama. Sifat perusahaan smelter yang padat modal semakin mengecilkan kemungkinan penyerapan yang lebih besar dari jumlah pekerja yang terserap saat ini.

Sejak awal, proses rekrutmen di perusahaan Huadi memang telah identik dengan perekrutan yang informal. Kepentingan perusahaan dalam mengupayakan pembebasan lahan sepaket dengan tawarannya untuk menyerap calon pekerja untuk setiap keluarga yang membebaskan lahannya. Keterserapan anggota keluarga sebagai calon pekerja jadi salah satu *bargaining* penting perusahaan terhadap warga untuk memuluskan rencana pencaplokan lahan di Kawasan Industri—selain dengan menaikkan nilai tawar harga tanah. Beberapa cerita muncul jika setiap 1 hektar yang dibebaskan mendapatkan jatah untuk satu pekerja. Jika luasannya lebih dari itu, bisa mendapatkan jatah dua pekerja dalam satu keluarga.

Berdasarkan cerita informan, bahkan telah terjadi praktik jual beli jatah “1 kesempatan kerja” yang diperoleh dari pembebasan lahan. Keluarga yang tidak memiliki anak muda kadang bisa menjual jatah tersebut ke orang lain yang masih kerabat dekat atau keluarga dekatnya. Beberapa orang juga kadang rela mengeluarkan uang untuk menawar jatah tersebut. Ini jelas bukan fenomena yang umum. Dalam beberapa kesempatan kami juga mendapati informasi bahwa cara yang ditempuh oleh orang-orang di luar Desa-Desa prioritas untuk memperbesar peluang terserap ke perusahaan adalah dengan cara memperoleh surat keterangan domisili setempat meski tak bertempat tinggal di dalamnya. Ini menunjukkan gejala bahwa baik warga setempat dan juga warga luar tengah terDesak secara ekonomi dan akan menempuh berbagai cara untuk mengakses peluang kerja di perusahaan meski pekerjaan di perusahaan itu sendiri adalah pekerjaan berisiko tinggi.

Hal lain yang perlu disoroti adalah kecilnya peluang terserap bagi kalangan perempuan. Pada laman perusahaan Huadi Indonesia, hanya terdapat 175 pekerja perempuan dari total pekerja.<sup>41</sup> Pekerjaan yang dianggap berisiko tinggi dan sangat teknis ini lebih banyak menyerap pekerja laki-laki. Sementara itu bagi orang-orang di kampung, terutama di tiga desa terdampak, peluang kerja porsinya lebih besar bagi usia produktif muda 18-35. Bagi orang-orang dewasa usia 40 ke atas kemungkinan terserapnya lebih kecil. Salah seorang warga nelayan mengungkapkan yang

---

<sup>41</sup> Pada situs perusahaan hanya menampilkan jumlah pekerja pada 3 perusahaan di lingkup Huadi Indonesia: PT HNAI, PT Hengsheng, dan PT Unity. Di kutip dari <https://huadi.co.id/>

beruntung dalam situasi ini adalah keluarga yang mempunyai anak muda. Orang tua dianggapnya akan “mati konyol” jika bekerja di dalam perusahaan smelter.

## **B. Potret Alur Produksi dan Kondisi Kerja Buruh Smelter**

PT Huadi Nickel Indonesia sejauh ini diketahui memperoleh bijih nikel (ore) dari daerah Malili, Luwu Timur dan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Para pekerja tidak mengetahui persis pemasoknya dari perusahaan apa saja. Namun dalam dokumen notulensi rapat Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan per 21 November 2018, salah satu perusahaan yang disebutkan adalah PT Citra Lampia Mandiri yang konsesi pertambangannya terletak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur (Rusdianto, 2019). Perusahaan tersebut mayoritas sahamnya (85%) dikuasai oleh PT Asia Pasific Mining Resources.

Pemasok lain bahan baku nikel ke smelter Huadi adalah PT Sumber Mineral Global Abadi yang mayoritas sahamnya (90%) didominasi oleh PT Sumber Global Energy Tbk (sebelum dilempar ke publik). Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan besar bijih nikel dan batubara. PT Huadi Nickel Alloy Indonesia sendiri tercatat sebagai pelanggan produk nikel dalam dokumen prospektus<sup>42</sup> saham PT Sumber Mineral Global Abadi yang dirilis pada Januari 2024 lalu. Dalam dokumen itu Huadi memperoleh pasokan kadar nikel 1,65-2,00% dengan kuantitas 10.000 WMT (wet Metrik Ton/metrik ton basah) per setiap bulannya. Dalam catatan penjualannya, PT HNAI telah memperoleh 7.493 Metrik Ton per 31 Juli 2023 lalu (10,23% dari total penjualan). Perusahaan ini mendapatkan pasokan nikel dari 6 entitas perusahaan yang berlokasi di dua wilayah, yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. 5 perusahaan dari Sulawesi tenggara antara lain: PD Aneka Usaha Kolaka, PT Nikel Sukses Delapan-Delapan, PT Fajar Sukses Delapan-Delapan, PT Aneka Mineral Makmur Abadi, PT Roshini Indonesia, dan perusahaan berlokasi di Sulawesi Tengah adalah PT Raihan Caturputra. Sementara itu, belum terdapat informasi yang jelas terkait entitas perusahaan yang memasok material batubara/kokas ke Huadi. Menurut informasi yang beredar di antara pekerja, batubara ini dipasok dari wilayah Maluku, Kalimantan dan Morowali.

---

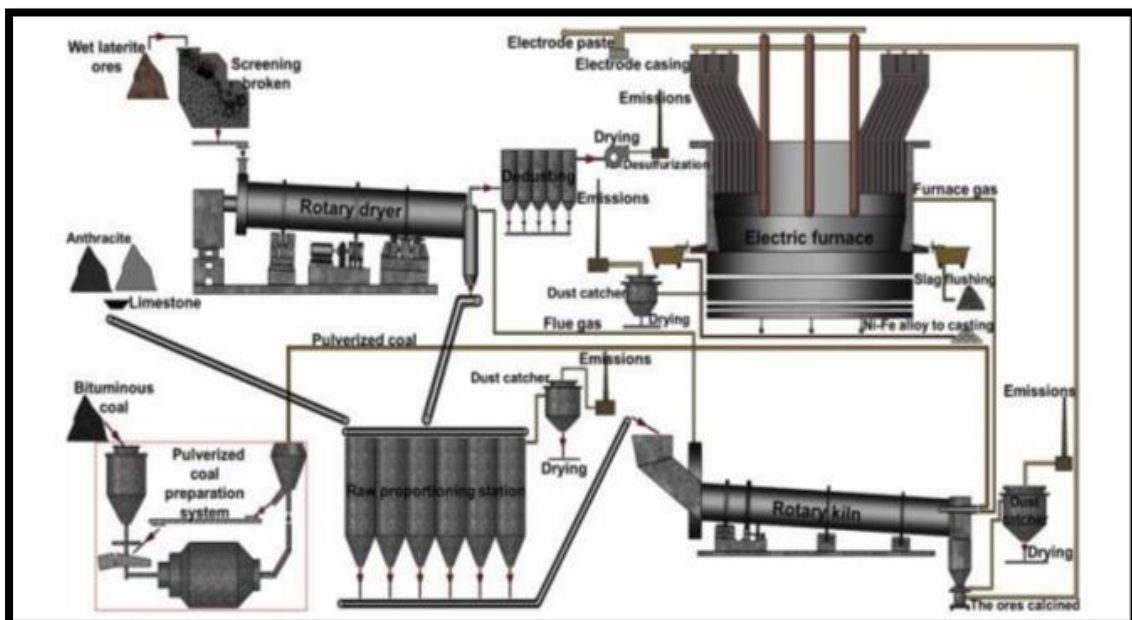
<sup>42</sup> Dokumen Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham yang diterbitkan di Jakarta, 24 Januari 2024. Dikutip dari <https://www.idx.co.id/Media/ok2b5ha4/9-smga-prospektus-ipo-2024.pdf>

PT Huadi pada lamannya<sup>43</sup> merencanakan kapasitas produksi 50.000 MT pada tahap 1 dengan mengoperasikan dua tungku dan akan didorong kapasitasnya menjadi 200.000 MT dengan pengoperasian delapan tungku sejak 2020 lalu. Kapasitas produksi harian untuk 2 tungku adalah 150 MT, atau 4.200 MT per bulan. Saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, perusahaan-perusahaan di Huadi Indonesia telah mengoperasikan 11 tungku. 5 perusahaan Huadi Indonesia di KIBA (PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Unity Nickel-Alloy Indonesia, PT Yatai Huadi Indonesia I dan II, serta PT Huadi Wuzhou Nickel Indonesia masing-masing memiliki dua tungku ditambah dengan 1 tungku dengan jenis berbeda di PT Hengsheng New Energy Material.

---

<sup>43</sup> Dikutip dari <https://huadi.co.id/hni/>

Di perusahaan-perusahaan Huadi Indonesia, sebagian besar mengolah bijih nikel saprolit dan teknologi yang digunakan adalah *Electric Furnace System*.<sup>44</sup> Di Indonesia sendiri pendekatan yang paling banyak digunakan dalam industri peleburan nikel saprolit adalah pirometalurgi dengan penggunaan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF). Dari 54 perusahaan smelter di Indonesia per Januari 2024, 49 di antaranya menggunakan teknologi RKEF, selebihnya menggunakan teknologi tinggi *hidrometalurgi high pressure acid leaching* (HPAL). Teknologi RKEF ini sendiri dianggap membutuhkan banyak energi dan material reduktor lain yang diperoleh dari industri ekstraktif seperti batubara antrasit yang berunsur karbon tinggi, batubara bituminous dan juga batu kapur (*limestone*), ini sekaligus membuatnya menjadi penghasil gas emisi yang tinggi dan limbah slag dalam jumlah yang besar.<sup>45</sup>



Gambar 1. Ilustrasi sistem kerja dan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF)

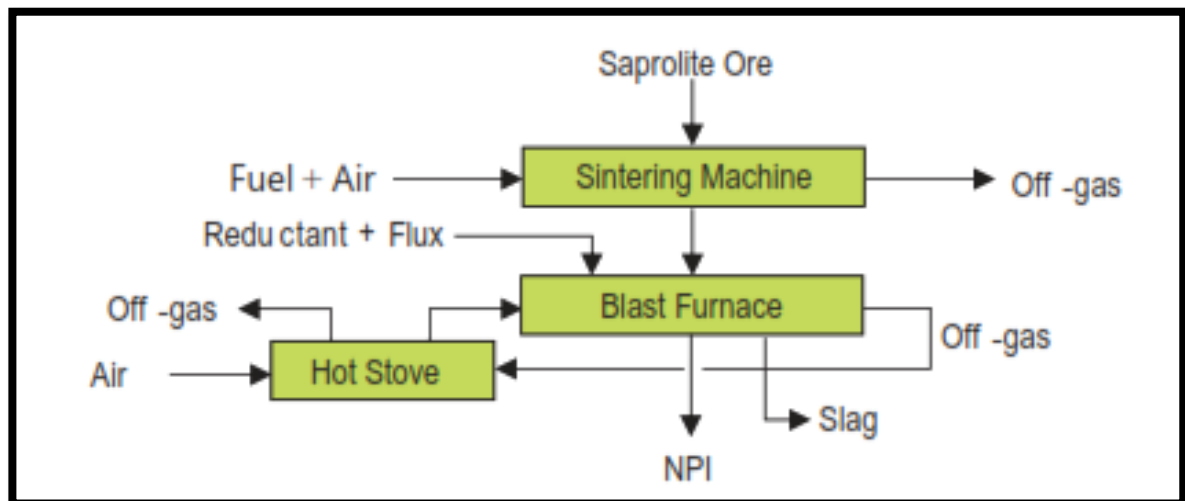
Sumber: (Firdaus Naufal, 2020)

Dalam kasus smelter di Bantaeng, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari beberapa pekerja dan ex-pekerja, teknologi di beberapa perusahaan Huadi beberapa aspek produksinya cenderung identik dengan teknologi *Blast Furnace* (BF) atau tanur/tungku sembur yang bisa memproduksi feronikel/NPI (*Nickel Pig Iron*).

<sup>44</sup> Kompas.id (2019). "Pengolahan Nikel Beroperasi di Bantaeng", <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/27/pengolahan-nikel-beroperasi-di-bantaeng>

<sup>45</sup> Tempo.co (2024). "Dua Teknologi Smelter Nikel di Indonesia, Mana yang Lebih Ramah Lingkungan?", <https://tekno.tempo.co/read/1835159/dua-teknologi-smelter-nikel-di-indonesia-mana-yang-lebih-ramah-lingkungan>

Beberapa aspek yang identik dengan *Blast Furnace* adalah penggunaan *Sintering Machine* dan tungku baja yang dilapisi dengan batu bata tahan api, yang menurut seorang pekerja itu diimpor dari China. Beberapa hal yang identik juga dengan teknologi BF adalah beberapa material pencampur (reduktor) yang digunakan dalam proses peleburan di tungku: batubara/kokas, batu kapur, dan silika (fluks).



**Gambar 2. Diagram alir sederhana sistem kerja Blast Furnace (BF)**

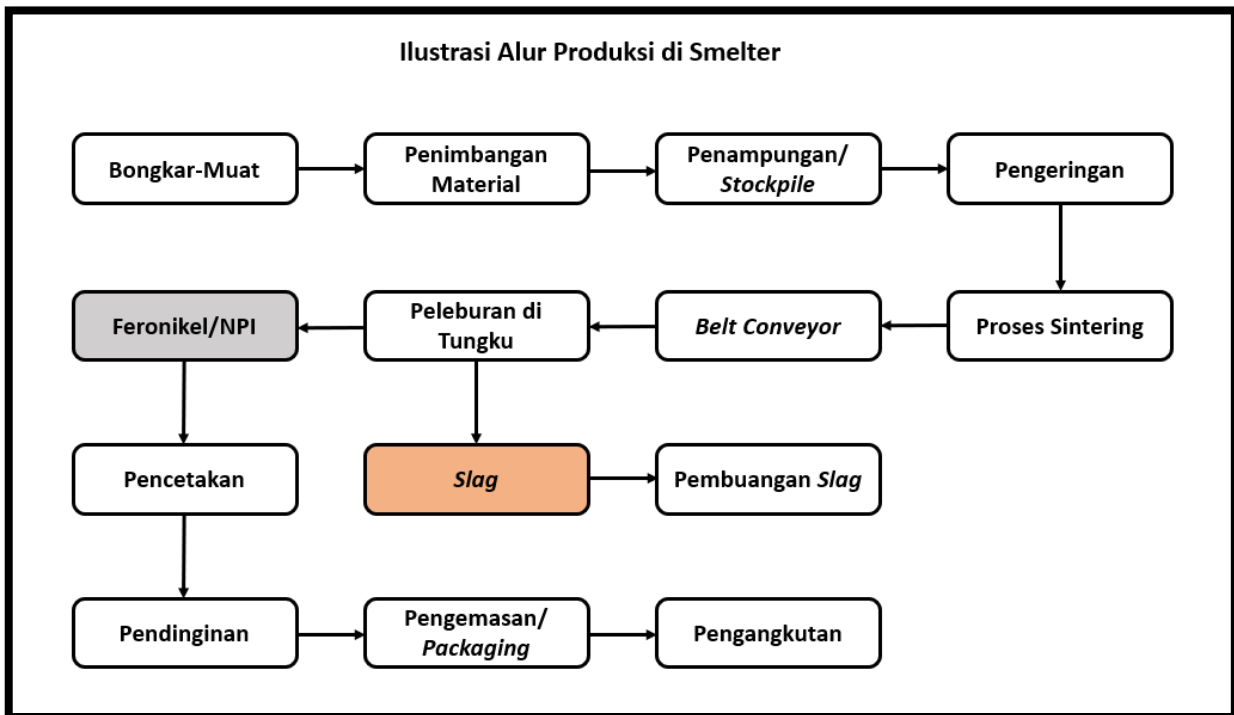
sumber: (Team Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, 2021)

Terkait proses produksi di beberapa perusahaan Huadi Indonesia yang beroperasi saat ini, ada beberapa gambaran yang diperoleh untuk mengilustrasikan alur dan kondisi pekerja dalam prosesnya. Proses awalnya dimulai dengan aktivitas bongkar-muat material bahan baku (Ore nikel maupun batubara) di *jetty*. Bahan baku kemudian diangkut oleh driver truk melalui jembatan timbang menuju *stockpile*. Jembatan timbang sendiri berfungsi untuk menimbang bobot bahan baku yang masuk, maupun material yang keluar (feronikel). Pada proses itu dilakukan juga pengambilan sampel bahan baku untuk setiap truk untuk pengujian kadar pada laboratorium. Dari *stockpile* kemudian dilakukan proses pengeringan untuk mengurangi kadar air pada ore.

Pada proses sintering, pekerja mulai bersentuhan dengan suhu panas. Dari informasi yang kami temukan, temperatur suhunya bisa mencapai 800-900 derajat Celcius. Di tahap ini dilakukan proses pembakaran awal yang mencampur bahan baku (nikel ore) dengan bahan-bahan lainnya seperti batubara-kokas, batu kapur, dengan tujuan mempercepat naiknya suhu. Output dari proses sintering ini adalah



menghasilkan sinter bijih nikel—reduksi nikel dalam bentuk padat, semacam bongkahan kerikil—yang selanjutnya akan diteruskan ke tungku menggunakan *belt conveyor* dan diolah lebih lanjut dalam proses peleburan. Dalam proses peleburan di tungku, bijih sinter kemudian dicampur lagi dengan material reduktor: batubara kokas, batu kapur, dan silika untuk meningkatkan suhu/panas.



**Gambar 3. Ilustrasi alur kerja/produksi di beberapa smelter yang beroperasi di KIBA<sup>46</sup>**

Dalam proses peleburan di tungku, risiko kerjanya sangat besar. Para pekerja di tungku akan berhadapan dengan suhu yang lebih tinggi, yakni 1500 derajat Celcius atau lebih. Selain itu, di bagian tutupan tungku juga teraliri arus listrik dengan tegangan yang sangat tinggi dan sangat berpotensi membuat para pekerja tersengat, terutama jika tidak difasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) yang layak. Para pekerja beberapa kali merasa was-was dengan tegangan tersebut, terutama jika sewaktu-waktu terjadi *korsleting*. Apalagi telah pernah terjadi satu kasus pekerja tersengat listrik di perusahaan Yatai I yang menyebabkannya meninggal dunia<sup>47</sup> dan juga

<sup>46</sup> Ilustrasi ini diolah berdasarkan informasi yang diperoleh dari pekerja dan dilengkapi dengan beberapa input yang diperoleh dari laporan mahasiswa AK-Manufaktur Bantaeng.

<sup>47</sup> Betahita.id (2023). "Liputan khusus: Koalisi LSM Desak Evaluasi Kawasan Industri Nikel Bantaeng", <https://betahita.id/news/lipsus/8739/koalisi-lsm-desak-evaluasi-kawasan-industri-nikel-bantaeng-.html?v=1683685826>

ledakan tungku di PT Hengsheng yang menyebabkan pabrik itu sempat terhenti operasionalnya.

Pasca proses peleburan di tungku kemudian dilanjutkan dengan pemurnian yang akan menghasilkan feronikel yang siap dicetak menjadi batangan feronikel, di sisi lain tungku akan menghasilkan gas emisi yang dibuang ke udara dan limbah *slag* yang jumlahnya berkali lipat ketimbang feronikel yang dihasilkan. Menurut penggambaran salah seorang pekerja di salah satu perusahaan naungan Huadi Indonesia, gas yang keluar terasa sangat bau dan menyengat, menurutnya karena penggunaan batubara/kokas yang tinggi. Sementara itu rasio feronikel yang dihasilkan terhadap jumlah *slag* yang dihasilkan dalam satu siklus produksi menurutnya sangat kecil. Hal ini menyebabkan ada pekerjaan ekstra yang dilakukan pekerja di bagian pembuangan limbah *slag*.

Feronikel yang dikeluarkan oleh tungku akan dilanjutkan dalam proses pencetakan pada rell pencetakan dan pendinginan. Feronikel yang telah dicetak, produk akhirnya berbentuk batangan dengan bobot 23-27 kg. Proses selanjutnya adalah *packaging* atau pengepakan yang dilakukan oleh pekerja harian yang disewa tenaganya sebesar 17 ribu rupiah per setiap ton yang dikemas. Jumlah tenaga yang disewa dalam satu proses pengepakan biasanya 4-5 orang. Jam kerjanya tidak menentu dan hanya dihadirkan ketika diperlukan.

Sementara itu, bekerja di bagian pembuangan limbah *slag* menghadapi berbagai risiko. Jalur pembuangan ini tiap kali harus dibersihkan agar tidak terjadi penyumbatan. Limbah slag yang keluar adalah limbah cair panas yang dianggap sudah menyerupai lahar panas. Hawa panasnya bahkan menembus sepatu *safety* yang dikenakan pekerja. Mereka biasa mensiasatinya dengan membiarkan tanah di sekitar tungku digenangi air agar dapat digunakan untuk merendam kaki yang masih mengenakan sepatu untuk didinginkan. Para pekerja di lini ini harus menyekop *slag* tersebut agar tetap berada di jalur pembuangan. Suatu waktu para pekerja harus menggali lagi jalur-jalur tersebut agar tetap dapat dilalui. Di jalur pembuangan tersebut dilapisi dengan semacam aspal hitam dan apabila dilalui limbah *slag* (terak magnesium) yang masih berwujud cair dan panas, reaksinya akan mengeluarkan asap berwarna hijau. Reaksi lain yang ditimbulkannya adalah aroma dan bau yang sangat menyengat sehingga pekerja biasanya butuh berlapis-lapis masker jika harus bekerja di area itu.

“...Baru bukan sampai di hidung. Tapi langsung mentong masuk sampai di sini dirasa. Langsung masuk. Langsung ki batuk,” ungkap salah seorang yang pernah bekerja di area tersebut sembari meletakkan telapak tangannya ke dadanya.

Salah seorang ex-pekerja di area ini mengaku kelelahan dan lumayan sering dirawat di rumah sakit karena terjangkit tipes selama bekerja di area tersebut. Seorang rekan kerjanya yang lain mengalami hal yang sama. Suatu waktu, rekannya telah pulih dan segera kembali masuk bekerja, hanya dalam rentang waktu sebulan ia kembali terjangkit penyakit yang sama.

Terkait dengan jumlah pekerja dalam satu shift di beberapa divisi untuk satu tungku kami mendapat beberapa gambaran. Pada divisi pengering ore terdapat sekitar 10 orang pekerja, divisi sintering 40 pekerja, divisi tungku 30 orang, divisi pembuangan *slag* 5 orang, dan pengepakan 4-5 orang. Di luar pekerja *packaging*/pengepakan, rata-rata gaji pokok yang diterima pekerja berkisar antara 3,2 - 3,5 juta per bulannya. Keseluruhan upah yang diterima jika ditambahkan tunjangan-tunjangan dan insentif-insentif *shift* (lembur) berkisar antara 5-6 juta rupiah untuk saat ini. Meski demikian, para pekerja belum mendapatkan penggambaran detail tentang perhitungan upah lembur. Tiadanya slip gaji semakin menyulitkan pekerja menganalisisnya. Sementara itu pekerja pengepakan statusnya adalah pekerja harian/borongan yang dipanggil ketika dibutuhkan.

Setiap pekerja (di luar pekerja yang sifatnya reguler 8 jam kerja sehari seperti pekerjaan administrasi dan perkantoran) bekerja selama 12 jam kerja per setiap *shift* (sudah termasuk lembur). Jika mendengar keterangan pekerja, porsinya adalah 8 jam kerja ditambah 4 jam kerja lembur. Namun, pekerjaan lembur itu sendiri sudah seperti pekerjaan reguler dan wajib, sebab siklus produksi di smelter tidak ada jeda, proses operasionalnya berlangsung selama 24 jam. Dalam satu divisi terdapat 3 tim yang saling berotasi setiap 12 jam (1 shift). Ilustrasinya seperti ini, jika tim 1 masuk bekerja pada pukul 6 pagi sampai pukul 6 malam, maka tim 2 akan masuk pada shift 2 pada pukul 6 malam sampai pukul 6 pagi, kemudian tim 3 akan melanjutkan shift 3 pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 malam. Tim 1 akan kembali masuk ke shiftnya pada pukul 6 malam.

## **Kecelakaan Kerja dan Hak-Hak Pekerja yang Diabaikan**

Seperti telah disinggung sedikit sebelumnya, pekerjaan di smelter adalah pekerjaan berisiko tinggi. Oleh karena itu, smelter-smelter yang beroperasi di KIBA telah berulang kali disoroti oleh berbagai media massa dan NGO, terutama yang terkait dengan isu manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam kurun waktu 2020-2023 telah terjadi setidaknya 13 insiden kecelakaan kerja<sup>48</sup>—yang terpublikasi ke khalayak umum. Kecelakaan kerja ini menimpa baik pekerja lokal maupun TKA. Menurut beberapa informan yang kami temui, sebenarnya kecelakaan-kecelakaan itu kerap terjadi, kecelakaan berat selalu berpotensi terjadi, namun kecelakaan-kecelakaan ringan intensitasnya menjadi cukup sering.

Menurut salah seorang informan, kecelakaan-kecelakaan ringan itu hampir tiap bulan terjadi. Kecelakaan ringan itu seperti ada luka sobek atau terkena serpihan-serpihan, atau percikan-percikan kecil namun panas. Percikan dari proses peleburan *ore* yang panasnya mencapai 1200-1500 derajat celsius biasa mengenai tubuh pekerja, seingatnya dulu ada pekerja yang terkena pada lehernya dan ada juga yang terkena pada sepatunya hingga menembus sepatu dan mengenai kakinya. Hal ini sangat memungkinkan terjadi di area kerja tungku, terutama di lantai dasar dan di bagian pengeboran jalur keluar feronikel dan pencetakan.

*“Nabilang orang itu (tungku) adeknya neraka,”* ungkapnya.

Di satu kasus berbeda, kecelakaan kerja pernah terjadi di area tungku pembakaran yang menyebabkan salah seorang pekerja mengalami trauma. Saat itu lantai di sekitar tungku yang masih panas tak sengaja diinjaknya, hingga kakinya mengalami luka bakar dan melepuh hingga ke paha. Itu sudah mengindikasikan jika tidak ada pengawasan kala itu. Saat kejadian, ia segera dibawa ke ruangan khusus yang pintunya tertutup sehingga tidak ada pekerja lain yang bisa menyaksikannya. Ia lalu diamankan pihak perusahaan lalu dipulangkan ke rumahnya. Pihak perusahaan mengklaim akan menanggung pengobatannya melalui klaim BPJS. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak menanggung keseluruhan pengobatannya, sehingga orang tua korban harus menjual ternaknya untuk membiayai pengobatannya, padahal upah pekerja telah dipotong untuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Setelah

---

<sup>48</sup> Trendasia.org (2023). “Pernyataan Sikap Koalisi Advokasi KIBA”, <https://trendasia.org/pernyataan-sikap-koalisi-advokasi-kiba/>

pulih, ia lekas kembali bekerja dan meminta ke pihak perusahaan untuk dipindahkan ke posisi atau divisi yang berbeda, namun pihak perusahaan menolaknya dengan alasan ia ahli dalam pekerjaan itu. Perusahaan sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan traumanya. Orang tuanya bahkan sudah sangat kesal dengan perusahaan yang tidak pernah menunjukkan kepedulian dan itikad baik untuk membantu sejak awal.

*“Kalau kau masih kerja di PT Huadi, haram untuk saya makan uangnya Huadi,”* ungkap Ibu si pekerja pada anaknya. *“Huadi angguppai tanningna, I nakke angguppai pai’na,”* (Huadi yang dapat manisnya, saya yang dapat pahitnya) tambahnya.

Sementara itu, kasus kecelakaan kerja 2023 lalu terjadi di area divisi sintering yang menimpa seorang pekerja yang bertugas sebagai *cleaning*. Ia terperosok ke dalam mesin penggilingan yang berbentuk seperti mata bor berukuran besar. Penggilingan ini berfungsi untuk menyerap debu atau mengumpulkan debu yang dihasilkan dari proses sintering agar terpisah dari gas yang akan dibuang ke udara. Saat itu mesin penggilingan ini belum berhenti beroperasi namun pekerja pembersihan sudah diminta untuk membersihkannya. Jadi kecelakaan itu terjadi pada waktu *off*, namun mesin belum berhenti sepenuhnya.

Dalam kecelakaan yang menyebabkan disabilitas fisik pada pekerja itu, yang paling disoroti rekan kerjanya adalah tiadanya pemberitahuan-pemberitahuan dari pihak yang biasanya bertugas dan memiliki kontrol di area itu. Pemberitahuan yang dimaksud adalah semacam peringatan jika mesin masih beroperasi maka kegiatan pembersihan tidak diperbolehkan dulu, meski pun jam kerjanya sudah masuk. Atau setidaknya sekadar mengingatkan potensi hal seperti itu bisa terjadi dan bisa menimpa pekerja, mereka seharusnya memastikan betul tidak ada lagi mesin yang beroperasi, baru kemudian menginstruksikan kegiatan pembersihan. Sederhananya, minim tindakan-tindakan pencegahan dari alumnus-alumnus K3 yang bertugas. Pihak K3 (*safety*)terkadang hanya melakukan *briefing* awal, menganjurkan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dan melakukan dokumentasi, setelah itu ia akan kembali menuju gedung yang terpisah.

Kemudian, pada bulan Juli 2024 lalu, ada satu insiden pekerja Huadi hendak berangkat malam menuju smelter, namun di perjalanan mengalami kecelakaan dan

meninggal dunia. Kecelakaan tersebut tidak di-cover oleh perusahaan karena dianggap terjadi di luar area perusahaan dan operasional perusahaan, padahal pekerja tersebut jelas-jelas dalam perjalanan menuju lokasi kerja. Perusahaan tidak menganggap insiden tersebut sebagai insiden kecelakaan kerja karena tidak terjadi saat beraktivitas di area kerja. Perusahaan juga kemudian berdalih dan terkesan mendiskreditkan korban saat menemukan informasi—yang belum diketahui kepastiannya—bahwa pekerja tersebut berkendara dalam keadaan mabuk karena menenggak minuman keras sebelum berangkat ke perusahaan.

Selain itu, perusahaan tampaknya sangat menyepelekan aspek keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Terkait APD, salah seorang pekerja menggambarkan bahwa fasilitas APD yang diberikan perusahaan masih tergolong tipis dan rentan. Sejak bekerja di KIBA, APD yang digunakannya masih terbilang tipis. Iapun lekas berdiri mengambil tas, mengeluarkan helm lalu menarik selempang baju. *“Ini bajunya. Kain biasa. Korek (bakar) saja terbakar. Apalagi 1500<sup>0</sup>. Langsung tembus kulit,”* keluhnya. Ia pun lekas menunjukkan area belakang leher. Di sisi itu, ia kerap kali mengalami percikan api. Tidak jarang, luka percikan tersebut akan langsung berwarna putih. Selain belakang leher, ia juga pernah mendapat luka bakar di bagian lengan dan kaki. Ia lantas membandingkan APD tempatnya bekerja dengan APD PT Vale.

*“Kalau APD-nya dia kayak pake jas. Panjang (tangannya menunjukkan area batas mata kaki). Baru mengkilat itu jas. – biarki baku hadap-hadapan (tungku), tidak bisa mentongki na tembus, kayakki Astronot begitu eh, petugas-petugas covid,”* ungkapnya.

Para pekerja yang membutuhkan nutrisi dan protein untuk menunjang energi mereka dalam pekerjaan yang intens kerap kali mengeluhkan kondisi makanan dan minuman yang disediakan perusahaan. Makanan yang disediakan biasanya tidak lagi segar dan bahkan digambarkan oleh pekerja seperti makanan lama yang hanya dipanaskan kembali. Dalam satu kasus, pekerja disajikan makanan yang sudah basi dan itu terjadi dalam tiga pergantian shift berturut-turut. Di kasus lain, pernah terdapat satu potongan leher botol plastik di dalam makanan pekerja. Sementara itu, minuman mineral yang disediakan dianggap seringkali tidak higienis. Minumannya dianggap seperti air ledeng yang tidak bersih dengan galon yang jarang dibersihkan dan berdebu. Beberapa persoalan lain yang disoroti adalah keterlambatan jam makan,

terutama pada malam hari. Masalahnya, satu-satunya opsi makan dan minum di perusahaan hanya disediakan oleh perusahaan, pekerja tidak dibolehkan lagi keluar kawasan saat jam makan di sela-sela jam kerja. Sementara itu, jika pekerja mengalami sakit dan tidak masuk bekerja, upahnya biasanya akan dipotong sebesar 350 ribu rupiah per shift. Kebijakan pemotongan ini dianggap tidak berdasar. Hal ini menyebabkan pekerja terkadang memaksakan diri untuk tetap masuk bekerja dalam kondisi yang tidak prima.

Di sisi lain, ada beberapa isu terkait dengan penempatan kerja yang tak sesuai dengan pekerjaan utama atau keahlian pekerja. Beberapa pekerja kerap ditempatkan di divisi berbeda dalam proses produksi. Misalnya, pekerja di tungku sewaktu-waktu bisa diperintahkan untuk mengurus pekerjaan di penggilingan batubara, atau pekerja dari divisi lain diperintahkan untuk mengurus beberapa pekerjaan fisik di jalur pembuangan limbah *slag*. Ini dianggap sangat berbahaya oleh beberapa pekerja, karena semakin memperbesar peluang terjadinya kecelakaan kerja.

Informasi tersebut mengindikasikan adanya penyelewengan terhadap perjanjian kerja bersama atau sekaligus mengindikasikan perusahaan tidak cukup terbuka membahas SPK. Sikap perusahaan yang tertutup juga menyebabkan beberapa hak-hak dasar lain seperti slip gaji tidak diperoleh para pekerja. Pendistribusian gaji sejauh ini dilakukan secara online via transfer ke rekening pekerja. Para pekerja yang kami temui menyoroti hal ini, sebab penting untuk mengecek besaran-besaran tertentu seperti persentase pemotongan untuk asuransi dan besaran upah rill dan upah lembur yang sesungguhnya. Slip gaji harus diminta oleh pekerja dan jarang dipenuhi. Permintaan itu biasanya hanya dipenuhi ketika pekerja membutuhkannya untuk keperluan mengakses pembiayaan atau mengakses KPR. Dalam satu kasus, salah seorang pekerja pernah menemui adanya kejanggalan, seperti ketidaksesuaian antara informasi nominal di slip gaji dengan yang diperolehnya secara rill.

## KONTRADIKSI-KONTRADIKSI SMELTER: HIDUP SEPERTI PENGUNSI DAN JANJI-JANJI KORPORASI

### A. Alasan Bertahan dan Perasaan Mendalam Warga

Saat perusahaan smelter beroperasi di kampung mereka secara resmi sejak 2019, tampaknya luapan amarah dan upaya penolakan terhadap perusahaan semakin tak terdengar sama sekali, baik lewat perlawanan secara terbuka (unjuk rasa) maupun dalam percakapan harian.<sup>49</sup> Hal ini terjadi karena semakin kuatnya ekspansi kapital yang dimulai sejak masa *land clearing* pada 2014 lalu—yang secara perlahan menurunkan daya perlawanan warga dan gerakan sosial yang ada di kampung. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh warga dalam menghadapi kenyataan ini, dalam situasi yang krisis dan terpaksa—adalah dengan hidup berdampingan dengan perusahaan smelter.

Hingga kini, terdapat 6 perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Pajjukukang. Masing-masing terdiri dari Yatai 1 dan 2, Huadi 1, Unity 2 (Huadi 2), Hengsong, dan Wuzhou yang tergabung dalam Huadi Group. Perusahaan smelter itu, beroperasi dan memakan banyak ruang, dan berdiri di tengah-tengah perkampungan warga, khususnya tiga Desa yang ada di Pajjukukang yakni Desa Papanloe, Desa Baruga dan Borong Loe. Pada bagian ini akan menyajikan beragam cerita warga yang secara khusus memotret alasan-alasan bertahan dan perasaan mendalam yang dialami oleh warga.

### Ikatan Kuat Dengan Tanah dan Kampung

Dalam penuturan beberapa informan, alasan mereka bertahan dikarenakan ikatan mereka dengan kampungnya. Meskipun banyak dari mereka adalah pendatang dari Jeneponto, tetapi karena kebanyakan dari mereka sudah tinggal lama (puluhan tahun) semakin membuat mereka terikat dengan kampung sebagai tempat mukim dan ruang hidup beserta dengan orang-orangnya. Sehingga, saat kami bertanya tentang alasan mereka, beberapa dari mereka mengungkapkan rasa khawatir. Umumnya, mereka khawatir bahwa ketika mereka pindah ke kampung orang lain, artinya harus mencari sumber penghidupan baru—itu pun tanpa jaminan sama sekali bahwa apa

---

<sup>49</sup> Setelah beroperasinya perusahaan, tuntutan-tuntutan warga dalam perlawanan terbuka (unjuk rasa) kerap berputar pada resapan tenaga kerja, CSR dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan.



yang (penghidupan) mereka tinggalkan jauh lebih layak dibanding dengan apa yang tersedia di kampung asalnya. Selain itu, mereka juga khawatir jika mereka pindah, akan sulit bagi mereka untuk mendapat orang-orang yang menjadi tetangganya seperti dengan orang yang sehari-hari mereka temui di kampung. Singkatnya, mereka perlu beradaptasi dengan pekerjaan baru, lingkungan baru, serta orang-orang baru adalah hal yang berat bagi banyak warga tempatan untuk beranjak dari kampungnya.

Ibu Pita adalah salah satu contohnya<sup>50</sup>:

Ibu Pita adalah warga Desa Baruga. Selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga membangun usaha ga'de-ga'de (warung kecil-kecilan) untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak usaha bata merah menurun, suaminya yang bekerja sebagai supir truk turut terdampak. Orderan semakin berkurang, dan jasa pengangkutan yang ia tawarkan semakin sulit mendapat pelanggan. Ia bercerita tentang alasan mengapa sulit bagi beberapa orang beranjak dari kampung (pindah) dan lebih memilih bertahan. Seperti yang ia tuturkan, "Kalau pindah baruki lagi cari tetangga baru. Baru disini sudah kenal maki. Kalau pindah belum trentu dapat tetangga baru. Kalau di kota dirimu adalah dirimu. Waktu pindah dia panggil banyak tetangga (temannya yang mengambil btn) tapi tidak ada datang. Beda kalau di kampung, apa yang mau dikerja atau ada acara pasti banyak yang datang. Saling membantu orang disini. Kalau ada orang yang buat acara pasti kita bantu karena mauki juga dibantu nanti kalau bikin acara juga. Kalau tidak pergiki siapa yang mau datangiki nanti kalau ada acarata," tegasnya.

Contoh lainnya dapat dilihat dari kasus Pak Jaja<sup>51</sup>:

Pak Jaja merupakan warga Dusun Balla Tinggia, Papanloe. Sehari-hari ia bekerja sebagai pengrajin bata merah sambil bertani dan beternak. Dalam hitungannya, ia hanya memiliki tanah seluas 7 are. Dan menjadi satu-satunya tanah yang ia miliki diluar tempat tanah untuk mukimnya (rumah). Menurutnya, pihak perusahaan sudah beberapa kali meminta sebagian kecil tanah dari 7 are itu untuk dibeli. Pihak perusahaan hanya ingin membeli sepotong saja, khususnya pada bagian bidang tanah milik pak Jaja yang berbatasan dengan

---

<sup>50</sup> Semua informan menggunakan nama samaran

<sup>51</sup> Semua informan menggunakan nama samaran

tembok beton perusahaan. Dalam amatan pak Jaja, pihak perusahaan hanya membutuhkan sebagian tanahnya untuk merapikan pagar beton. Di kampung, beberapa bagian pagar beton kerap terlihat tidak rapi—dan berkelok seperti bentuk huruf U—berpola melompati tanah yang belum terbeli oleh perusahaan. Kenyataan itu turut dialami oleh Pak Jaja. Sebidang tanah milik Pak Jaja, masih terdapat bantilang yang dimanfaatkan untuk mencetak bata merah; jagung dan kacang-kacangan pun masih ditanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Selain itu, tanah yang diminta oleh perusahaan adalah satu-satunya akses yang kini tersedia—yang biasa ia lalui untuk menangkap ikan di sungai. Ikan mujair masih tersedia di sungai itu yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan (lauk) keluarga.

Hingga kini, tanah secuil itu masih ia pertahankan. Namun, pihak perusahaan pun terus mendesaknya untuk menjual tanah tersebut. Di samping desakan yang terus dilakukan oleh perusahaan, alasan lain yang memaksa dia untuk melepas tanah tersebut dikarekakan polusi udara yang ditimbulkan oleh perusahaan kian membuat hidupnya tidak nyaman. Dalam keadaan terpaksa, ia menegosiasikan harga (sebagian) tanahnya, yang awalnya ditawarkan 100 juta menjadi 300 juta. Selain sebidang tanah yang diinginkan perusahaan, ia juga memberi penawaran untuk mengambil semua tanahnya (termasuk bekas tanah mukim yang kini tidak ditinggali—tanah yang tidak diinginkan perusahaan) dengan harga 600 juta. Alasannya, karena tanah tersebut sudah tidak layak untuk ditempati bermukim.

### **Bertahan di Tengah Krisis; Menunggu Harga Tanah Naik dan Janji Relokasi**

Tak jarang kami memperoleh hasil wawancara dengan warga tempatan mengungkapkan alasannya untuk bertahan—walau tanah yang ia tempati bermukim dan bekerja semakin tidak karuan setelah beroperasinya perusahaan smelter di kampung mereka. Beberapa warga menganggap sekaligus penuh harap—bahwa dengan bertahan harga tanah akan semakin naik. Sejak masa pembebasan lahan, harga tanah melonjak dari waktu ke waktu. Pengalaman itu kian terekam dalam ingatan mereka. Sehingga, sangat wajar ketika mereka bersikap penuh harap agar harga tanah akan semakin tinggi ke depannya. Belum lagi, beberapa dari mereka yang bertahan, khususnya di Dusun Mawang, tak jarang mulai membangun rumah

batu—walau mereka sendiri mengakui bahwa perkampungan itu (Mawang) tidak lagi layak dihuni.

Ada anggapan yang muncul: semakin mewah dan bernilai bangunan yang ada di atas tanah, semakin tinggi pula harga tanah tersebut. Munculnya spekulasi ini tidak terlepas dari apa yang mereka saksikan sendiri di kampung, saat satu rumah kayu yang besarnya tidak seberapa, pun kondisinya yang sudah reok—dibeli dengan harga 800 juta. Tampaknya, setiap fenomena jual-beli tanah turut mempengaruhi cara berfikir warga dalam membangun posisi tawar-menawar dengan pihak perusahaan.

Di samping bertahan untuk mengharap harga tanah naik, beberapa warga yang kami temui juga mulai menyinggung isu tentang relokasi. Keduanya saling terkait satu sama lain. Dengan cara demikian, posisi tawar mereka akan lebih tinggi di hadapan perusahaan dibanding terusir dan pergi dari tanahnya dengan sendiri. Terkait dengan relokasi, sejauh ini belum ada upaya tersebut dari pihak perusahaan dan pemerintah. Warga pun tak tahu menahu teknisnya akan seperti apa karena memang pembicaraan terkait itu hampir tidak ada sama sekali.

Meski mengemuka dalam wawancara kami, relokasi belum menjadi satu isu penting dalam setiap tuntutan-tuntutan yang dilayangkan terhadap perusahaan. Menyikapi situasi ini, Pak Rahim, salah seorang warga Mawang menekankan pentingnya persatuan dari warga untuk memikirkan dan menuntut pemerintah dan perusahaan untuk memfasilitasi rencana relokasi di tengah situasi krisis yang terjadi sekarang ini.

*“Bebaskan kalau mau bebas, tapi pemerintah juga harus fokus menyediakan fasilitas untuk rumah (memfasilitasi proses relokasi), fokus memikirkan juga bagaimana warga yang masih mau bertahan supaya bisa tetap aman di sekitar pabrik,”* ungkap Pak Rahim.

Dari tuturan Pak Rahim, kita bisa memahami bahwa tuntutan untuk direlokasi dapat dilihat sebagai tuntutan akan peran negara dalam mengatasi krisis yang dialami oleh warga. Meski begitu, belum juga ada kejelasan dari pihak pemerintah dan perusahaan untuk memfasilitasi relokasi warga, utamanya di Dusun Mawang yang kian hari kondisi permukiman itu semakin memburuk.

## Penghidupan Baru yang Muncul

Seiring dengan hilang dan melemahnya penghidupan warga, tampaknya beberapa warga mulai menekuni pekerjaan yang sama sekali baru untuk menyambung hidup. Munculnya penghidupan baru di kampung, dalam amatan kami—dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, penghidupan baru yang muncul dari dalam perusahaan seperti yang banyak dilakoni warga saat ini, misalnya menjadi buruh atau pekerja (baik mereka yang terserap sebagai buruh tetap atau buruh dengan skema borongan yang sifatnya harian) di perusahaan telah membuat mereka ingin tetap bertahan untuk tinggal di kampung. Bekerja sebagai buruh dianggap lebih baik dari pada harus keluar merantau. Argumen seperti ini tercermin dari ungkapan Ibu Nambo “kalau ada pekerjaan yang tersedia di kampung (perusahaan) buat apa pergi merantau cari kerja di luar kampung”. Warga lainnya, seperti dalam cerita Pak Rahim memilih untuk tetap tinggal di kampung dan menolak untuk pindah ke permukiman yang lebih layak, dikarenakan pertimbangan akses ke perusahaan—tempat mereka bekerja.

Sementara itu, jenis pekerjaan baru yang muncul diluar perusahaan sebagai kategori kedua. Hal ini terlihat jelas ketika kami di kampung. Di sekitar pagar depan perusahaan, beberapa warga telah memilih untuk mengais rejeki di tengah kehadiran perusahaan. Mereka menjual beberapa jajanan yang siap untuk dikonsumsi oleh para pekerja perusahaan yang jumlahnya ribuan itu. Salah satunya dapat dilihat dari kasus Ibu pedagang kaki lima:

Ia berjualan di dekat limbah *slag* smelter PT HNAI, hanya pagar pembatas yang mengantarai keduanya. Jualannya persis menghadap ke jetty PT Huadi yang disinggahi beberapa kapal tongkang pengangkut ore dan batubara. Ibu-ibu itu baru memulai usahanya 7 bulan lalu. Menurutnya aktivitas jualannya sejauh ini lumayan menghasilkan, meski ia hanya beroperasi dari pagi-pagi buta hingga jam 10/11 jelang siang. Ia melihat peluang usaha ini karena banyaknya pekerja yang berganti shift di pagi hari. Ia tinggal di Desa Borong Loe, Pajukukang, Desa yang juga masuk ke dalam kawasan industri dan terdampak langsung olehnya. Suaminya adalah seorang petani penggarap di Desa Borong loe. Sebelumnya di kampung banyak pekerja rumput laut, namun saat ini usaha itu dianggapnya tak cukup menghasilkan. Suaminya menggarap tanah yang dimiliki oleh orang lain, suaminya menanggung semua modal produksi dan perawatan, sementara bagi hasilnya tetap dibagi rata pada si pemilik. Ia saat

ini mempunyai seorang anak dan membayangkan ke depannya anaknya juga dapat terserap masuk ke dalam perusahaan. Sejauh ini belum ada dari keluarga intinya yang masuk bekerja ke dalam perusahaan. Ia melihat peluang usaha ini karena biasanya pekerja berangkat pukul 6 pagi, yang belum sempat sarapan di rumahnya biasanya akan singgah untuk sarapan nasi kuning.

Selain itu, beberapa warga juga memulai usaha baru. Alasannya sama: perusahaan dilihat sebagai mesin yang dapat menarik banyak orang dan mengumpulkannya dalam satu tempat bernama pabrik. Kenyataan ini telah membangun asumsi bagi mereka yang memulai usaha baru bahwa orang-orang (pekerja) inilah yang akan membeli jasa (pelayanan) mereka tawarkan. Sebagai contoh, sejak kehadiran perusahaan beberapa warga telah membangun usaha bengkel kecil-kecilan karena menganggap aktivitas lalu lintas di sekitar perusahaan semakin padat, utamanya para pekerja yang banyak menggunakan motor. Bagi mereka yang terjun dalam usaha bengkel, tentu saja, hal tersebut dipandang sebagai satu peluang secara ekonomi.

Di samping itu, ada juga yang membangun kos-kosan. Mereka yang terlibat dalam usaha kos-kosan menganggap kehadiran para pekerja nantinya akan membutuhkan tempat tinggal. Tak jarang, mereka juga membayangkan bahwa Pajjukukang ke depannya akan mirip dengan Morowali—dimana usaha kos-kosan menjadi peluang ekonomi yang sangat menggiurkan. Namun, kondisi di kampung tidak demikian. Kebanyakan yang bekerja di perusahaan berasal dari Desa sekitar, sehingga lebih banyak untuk tinggal di rumah masing-masing karena akses ke tempat kerja masih relatif dekat. Kadang juga, pekerja lebih memilih untuk mengakses perumahan subsidi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari perusahaan. Hal lain yang membuat mengapa usaha kos-kosan belum mendapat posisi tawar yang tinggi di mata pekerja adalah polusi udara, utamanya bangunan kos-kosan yang berjarak dekat sekali dengan perusahaan.

### **Menanam di Lahan Yang Terbeli Perusahaan**

Dalam temuan di kampung, beberapa warga yang bertahan memanfaatkan lahan-lahan yang telah dibeli perusahaan untuk ditanami jagung. Mereka menanam di lahan yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Salah seorang petani perempuan yang kami temui di Dusun Bonto Manai, Desa Baruga. Ia menanam jagung di lahan milik perusahaan yang berada di belakang *bantilang* miliknya, rumah

produksi bata merah yang ia bangun empat tahun silam. Sebelumnya, ia menanam di lahan milik orang lain dengan skema sewa (pajak). Namun, lahan tersebut telah dibeli oleh perusahaan. Sehingga, ia sempat berhenti bertani karena tak punya akses lahan.

Pada tahun ini (2024), ia meminta izin kepada pihak perusahaan untuk menanam jagung di lahan milik perusahaan. Pihak perusahaan memberinya izin dengan satu syarat: jika sudah tiba masa konstruksi (bagian dari ekspansi perusahaan), pihak perusahaan akan menggusur jagung yang ia tanam. Dan tidak disertai ganti rugi. Ia sepakat dan menerima persyaratan yang dibuat oleh perusahaan. Saat ini, ia menanam jagung di lahan tersebut dengan luas kurang dari 1 hektar. Ia juga mengatakan bahwa satu tetangganya juga melakukan hal yang sama.

Di tempat lain, kami juga mendengar cerita yang sama. Beberapa rumah tangga juga menanam jagung di lahan yang telah terbeli yang terletak di Dusun Panoang, Desa Baruga. Lahan tersebut kini terbengkalai akibatnya adanya penolakan dari warga. Mulanya, lahan seluas 50 hektar itu akan dibangun PLTU yang direncanakan sejak tahun 2014 silam. Namun, penolakan besar-besaran dari warga membuat pembangunan PLTU tidak berjalan.

## **B. Beragam Artikulasi Perlawanan dan Kepentingan**

Sejak perusahaan berdiri hingga saat ini ada banyak respon yang bermunculan ke permukaan. Secara umum gerakan-gerakan yang muncul menyoroti beberapa isu penting: hak warga untuk mengakses pekerjaan; dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan perusahaan dan pertanggungjawabannya atas kerugian masyarakat petani dan nelayan di pesisir; dan isu-isu terkait ketenagakerjaan. Beberapa gerakan ini tidak muncul bersamaan dalam satu rentang waktu dan cenderung parsial. Ragam gerakan dan respon yang bermunculan ini melibatkan banyak elemen masyarakat, dari warga terdampak (petani, peternak, pengrajin bata, nelayan, pembudidaya-*pa'abo-abo*), pemuda-pemuda Desa, tokoh-tokoh masyarakat seperti mantan perangkat Desa, pedagang, hingga mahasiswa, elemen NGO, dan organisasi buruh.

Dalam obrolan-obrolan lepas antar pemuda-pemuda di Desa Papanloe beberapa tahun lalu, mereka mulai menyoroti isu-isu terkait perusahaan yang beroperasi di Desanya. Sekitar tahun 2021 silam, sebuah inisiatif yang lebih serius

akhirnya muncul dari keresahan-keresahan mereka: membentuk aliansi yang mereka namai Aliansi Masyarakat Papanloe (AMP). Menurut informan yang terlibat dalam aliansi ini, salah satu keresahan utama yang mereka bawa ke dalam beberapa aksi-aksi demonstrasi di hadapan perusahaan adalah hak warga setempat untuk mengakses pekerjaan. Saat itu persentase pekerja lokal yang terserap dianggap masih sangat minim. Upaya-upaya ini mempunyai dampak, yaitu terbukanya peluang untuk mengakses pekerjaan. Namun, dampak lain yang dimunculkannya adalah semakin populernya beberapa pentolan gerakan dan menguatnya pengaruh kelembagaan dalam merekomendasikan nama-nama tertentu untuk diserap, khususnya di Desa Huadi Indonesia. Pentolan-pentolan ini lalu dianggap kian dekat dengan pihak perusahaan dan perlahan memunggungi kepentingan warga yang lebih luas, sementara rekomendasinya hanya menyasar segelintir orang.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul suatu lembaga yang diinisiasi oleh tokoh masyarakat dan pedagang lokal yang dinamai LPMP (Lembaga Peduli Masyarakat Papanloe). Kehadiran lembaga ini dianggap sebagai antitesis dari AMP yang dianggap tidak lagi mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan warga Papanloe, khususnya di Dusun Mawang dan Balla Tinggia. Isu keterserapan warga lokal ke dalam perusahaan masih menjadi isu utama yang disoroti oleh lembaga ini. Persoalan yang disorotinya adalah proses perekrutan pekerja yang dianggap tidak transparan di balik dalih profesionalitas. Isu lain yang didorongnya adalah dampak lingkungan perusahaan yang merugikan warga, dari jalanan yang rusak karena kendaraan operasional perusahaan, asap dan debu yang dimuntahkan smelter, hingga suara bising dan bau menyengat yang mengganggu aktivitas harian dan ketenangan warga. LPMP juga menuntut biaya pertanggungjawaban perusahaan (CSR) atas dampak sosial-lingkungan dapat diturunkan dan dikelola secara terbuka. Salah satu tuntutananya adalah penggunaan CSR untuk mengatasi dampak smelter terhadap atap rumah warga yang mengalami korosi sehingga umur penggunaannya sangat pendek. Program CSR ini tidak pernah direalisasikan di lapangan sehingga kondisi setempat tidak mengalami perbaikan sehingga kualitas hidup warga terdampak pun tidak membaik.

Lembaga ini juga menyoroti beberapa hal lain, seperti ganti rugi atas lokasi-lokasi budidaya rumput laut yang terdampak aktivitas tongkang di sekitar *jetty* sekaligus mencoba menegosiasikan proses pembebasan lokasi-lokasi budidaya

secara adil dalam kepentingan perusahaan memperluas *jetty* bongkar-muat material bahan baku perusahaan. Saat ini telah terdapat beberapa lokasi yang telah dicaplok oleh perusahaan.

Sementara itu, beberapa NGO terlibat dalam beberapa gerakan warga. Warga Borong Loe dan Balang Institute sejauh ini terlibat bersama dalam menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh smelter, khususnya dampak polusi yang ditimbulkan oleh smelter PT Hengsheng terhadap pertanian padi warga Borong Loe. Pada saat asesmen ini dilakukan, warga Borongloe melakukan demonstrasi di depan kantor perusahaan menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas gagal panen dalam skala yang luas di Desa Borong Loe. Salah seorang aktivis menggambarkan bahwa tanaman padi warga mengalami kerusakan yang tidak biasa, diduga akibat dari aktivitas perusahaan, padi tiba-tiba menghitam dan mati. Balang Institute beserta warga telah mengungkapkan hal tersebut pada pemerintah dan menyoroti temuan DLHK Bantaeng yang menyatakan bahwa tanaman padi tersebut telah terkontaminasi zat yang berbahaya yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Terkait dengan perburuhan, isu yang kerap disoroti adalah maraknya pelanggaran perusahaan dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Beberapa elemen masyarakat dan NGO seperti Trend Asia, Balang Institute, dan LBH Makassar yang tergabung dalam Koalisi Advokasi KIBA menganggap bahwa perusahaan terus mengabaikan fakta tingginya angka kecelakaan kerja<sup>52</sup> dan tidak melakukan perbaikan-perbaikan serius setelahnya.

Peristiwa kecelakaan berat yang membuat salah seorang pekerja mengalami disabilitas fisik permanen mendorong Koalisi Advokasi KIBA segera bergerak menDesak aparat hukum menyelidiki kasus hukum ini dan menuntut operasionalisasi perusahaan dihentikan saat investigasi dan penyelidikan hukum dilakukan. Koalisi juga menuntut terjaminnya pemulihan hak-hak korban dan keluarganya oleh PT Huadi secara adil, serta mendorong pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 155/1981 tentang K3 dan Konvensi ILO No. 161/1985 tentang setiap negara anggota ILO harus memerintahkan perusahaan menyediakan kesehatan kerja di setiap tempat kerja. Selain itu, DPR diDesak untuk

---

<sup>52</sup> Dalam siaran pers dan pernyataan sikap Koalisi Advokasi KIBA, 10 April 2023, mengutip catatan Balang Institute, sepanjang 2020-2023 telah terjadi 13 kasus kecelakaan kerja berat yang di antaranya merenggut nyawa 4 orang pekerja.



merevisi Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dianggap masih lemah dalam hal pemberian sanksi pada pelanggaran-pelanggaran perusahaan terkait K3.

Isu perburuhan lain yang sejauh ini pernah disoroti adalah sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah seorang eks pekerja Huadi korban PHK yang sempat kami temui mengatakan itu terjadi pada saat Covid-19 melanda Indonesia tepatnya pada 2021 lalu dan telah menyebar hingga Sulawesi Selatan, termasuk Bantaeng. Pengetatan dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kepentingannya agar tetap dapat beroperasi dan produktif dalam situasi pandemi. Aturan sepihak lalu dikeluarkan perusahaan yang menuntut para pekerja dikarantina secara ketat agar tetap berada di dalam lingkungan perusahaan. Pekerja tidak diperbolehkan untuk meninggalkan perusahaan dan ancaman sanksinya tidak main-main: PHK. Yang cukup janggal adalah adanya pernyataan yang dirilis perusahaan yang mesti ditandatangani tiap pekerja yang salah satu poinnya adalah pelanggaran atas aturan pengetatan itu akan berakhir dengan status pengunduran diri dan tanpa hak memperoleh pesangon.<sup>53</sup>

Dalam situasi demikian, beberapa pekerja tetap memutuskan untuk keluar meninggalkan lingkungan perusahaan. Pekerja tidak tahan terus-menerus berada dalam lingkungan smelter dalam jangka waktu yang lama dengan jam kerja yang juga cukup panjang, beberapa di antaranya merindukan keluarga, ada yang harus menjenguk sanak keluarga yang sakit, ada yang harus keluar karena keperluan ibadah wajib seperti shalat jumat dan beberapa harus membereskan beberapa pekerjaan terkait dengan usaha rumah tangganya. Informan yang sempat kami temui adalah salah satu di antaranya. Ia ketahuan menerebos perusahaan dan pulang mengunjungi rumahnya. Ia bersama puluhan orang lain kemudian disanksi PHK tanpa pemberian peringatan. Menyikapi hal ini, aliansi taktis KAPEKA (Koalisi Pemerhati Ketenagakerjaan) dibentuk oleh solidaritas antara pemuda-mahasiswa, buruh dan NGO. Salah satu tuntutan utama yang diDesaknya adalah terpenuhinya hak-hak pekerja yang di-PHK: pesangon. Menurutnya, saat itu terdapat sekitar 14 orang eks-

---

<sup>53</sup> Halilintarnews.id (2021). "KAPEKA Akan Tempuh Jalur Hukum PHI, Tuntut PT.Huadi Nickel Alloy Ada Apa", <https://halilintarnews.id/2021/03/05/kapeka-akan-tempuh-jalur-hukum-phi-tuntut-pt-huadi-nickel-alloy-ada-apa/>

pekerja yang memutuskan terlibat langsung dalam proses ini dan berhasil mendapatkan hak-haknya setelah menempuh berbagai proses yang panjang.

Pada asesmen ini, dapat dikatakan bahwa belum terdapat serikat buruh independen yang terbentuk di lingkungan pekerja smelter Huadi Indonesia. Isu-isu perburuhan kerap kali direspon oleh organisasi-organisasi di luar lingkup Kawasan Industri atau aliansi-aliansi taktis yang terbentuk ketika merespon isu-isu tertentu (kasuistik). Hal ini disebabkan karena masih rentannya posisi buruh di hadapan perusahaan. Menurut salah seorang penggerak dari FPR (Front Perjuangan Rakyat) yang sempat kami temui, untuk saat ini perusahaan akan sangat mudah menangani buruh-buruh yang bersuara saat ini, sebab usia kerja buruh masih relatif pendek, dan itu sangat rentan dengan ancaman pemecatan atau PHK. Jika jumlah buruh yang bersuara juga sedikit maka itu hanya membuatnya kian rentan. Menurutnya, mungkin perusahaan hanya menyediakan 1 miliar dana (atau lebih kecil dari itu) untuk menyiapkan pesangon bagi pekerja yang sejauh ini rata-rata bekerja selama 2-3 tahun, persoalan perusahaan sudah beres.

Jumlah cadangan pekerja yang membludak di pasar tenaga kerja membuat posisi perusahaan berada di atas angin. Jika melihat data pelamar di platform calon tenaga kerja (CTK) PT Basic yang jumlahnya dua kali lipat ketimbang jumlah pekerja yang terserap ke kawasan, perusahaan yang padat modal ini tidak akan kesulitan sama sekali mengeliminasi siapapun yang melawan, terutama buruh-buruh di lingkup Huadi Indonesia. Rekrutmen yang memberikan pengaruh besar pada aktor-aktor “orang dalam” juga salah satu faktor yang membuat posisi pekerja yang direkrut menjadi rentan.

“*Satu keluar, ribuan yang mau masuk,*” ungkap seorang istri salah seorang pekerja yang mengatakan jika suaminya siap dipekerjakan di posisi manapun asal tak dikeluarkan.



Gambar 1. Linimasa momen atau peristiwa penting di kawasan industri Bantaeng

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Studi ini berupaya untuk menunjukkan sejumlah pelajaran penting tentang bagaimana situasi dan kondisi warga biasa seturut lingkungan tempatnya melangsungkan kehidupan sehari-hari yang bertahan, beradaptasi, dan berjuang di dalam perubahan ruang dan penghidupan pada suatu kawasan Industri di Bantaeng.

**Pertama.** Dengan menggunakan lensa ekonomi politik yang kritis, kita memahami bahwa keinginan pemerintah pusat mewujudkan proyek kemitraan transisi energi yang berkeadilan (JETP), sebagai suatu komitmen dan kontribusi atas agenda pengurangan emisi yang menyebabkan krisis iklim secara global, sepertinya masih memiliki banyak tantangan dan kontradiksi yang bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh, Perpers nomor 112 tahun 2022 tentang moratorium pembangunan PLTU baru di luar yang sudah ditetapkan RUPTL. Dikecualikan bagi PLTU yang dibangun untuk menyuplai kawasan industri atau PSN (PLTU *captive*). Padahal menurut studi dari banyak pihak, justru PLTU adalah salah satu teknologi industrial yang paling besar menyumbangkan emisi sebesar 49% dari sektor energi dan transportasi.

**Kedua,** kehadiran Kawasan industri di Bantaeng (KIBA) yang saat ini didominasi oleh 6 pabrik pengolahan nikel (smelter) yang telah beroperasi sejak tahun 2018 tapi diresmikan tahun 2019, sangat jauh dari apa yang warga Pajjukukang bayangkan. Nurdin Abdullah selaku Bupati Bantaeng pada tahun 2012 mempromosikan kalau KIBA akan jadi kawasan industri berbasis agrobisnis. Dimana KIBA diharapkan mampu menjadikan Pajjukukang yang dicitrakan sebagai daerah yang tidak produktif-bertransformasi menjadi daerah industrial yang ditandai oleh suatu peralihan mata pencaharian masyarakat dari bertani, berkebun, budidaya rumput laut, nelayan, dan pembuat bata merah menjadi karyawan atau buruh pabrik smelter. Dengan begitu lapangan pekerjaan terbuka luas, warga lebih punya pendapatan pasti dengan bekerja di kawasan, tidak lagi bertumpu pada nilai jual komoditas padi, jagung, rumput laut dan bata merah yang dianggap menurun. Di sisi lain, pemerintah akan mendapatkan sumber pemasukan baru bagi daerah dengan hadirnya kawasan industri tersebut. Kami tidak menyangkal fakta tersebut. Akan tetapi kami menemukan realitas lain, yang sepertinya tidak pernah diperhitungkan oleh

pemerintah daerah, yaitu; dampak-dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ternyata sudah bermasalah sejak fase penetapan Kawasan termasuk pola perampasan tanah dan terintegrasinya KIBA sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2016. Kami melihat pada fase ini sebagai tonggak awal atas terjadinya reorganisasi atas ruang hidup masyarakat di Pajjukukang.

**Ketiga.** Sejak pabrik Smelter beroperasi tahun 2018 hingga saat ini tahun 2024, berdampak sangat serius bagi kehidupan warga sekitar. Terutama dampak sosial ekologis yang mendalam. Polusi udara, air dan suara dari aktivitas pabrik dirasakan sekali oleh warga. Sumur-sumur air warga dan sungai menjadi kering dan tercemar kandungan logam berbahaya. Hampir setiap hari, warga menghirup udara yang tercemar, debu-debu dari cerobong tungku pembakaran bertumpuk dan mengendap hingga ke piring makan dalam rumah warga. Limbah hasil peleburan nikel (*slag*) ditumpuk menggunung disisi jalan raya. Warga sekitar pabrik mulai terkena penyakit kulit dan ISPA. Petani pembudidaya rumput laut mulai merugi, panen rumput lautnya menurun sangat drastis. Tanaman pertanian banyak yang rusak mengakibatkan gagal panen. Ternak warga mati keracunan limbah pabrik. Berkali-kali protes warga yang terdampak tidak digubris pemerintah dan perusahaan. Warga bertahan menunggu tanah dibayar dan direlokasi. Sementara di dalam Pabrik, buruh-buruh bekerja dengan kondisi yang sangat tidak layak. Dari makanan hingga alat perlindungan kerja yang sangat dibawah standar. Tekanan-tekanan hingga ancaman PHK begitu mudah dilayangkan karena dibatasinya serikat pekerja perusahaan membela dan mengadvokasi nasib dan hak-hak dasarnya.

**Keempat,** kami juga mempelajari munculnya beragam respon yang berasal dari warga, yang tidak berlebihan bila disebut sebagai bagian dari gerakan sosial. Sejak fase awal kehadiran KIBA dan Pabrik Smelter, inisiatif warga untuk menolak muncul dalam wujud aliansi warga dengan organisasi masyarakat sipil. Aliansi tersebut kemudian 'redup' seiring dengan semakin kuatnya tekanan dari Pemerintah dan perusahaan dalam bentuk; membeli tanah warga dengan harga tinggi, dibarengi dengan lobi-lobi oleh Bupati NA kepada tokoh masyarakat. Setelah perusahaan beroperasi hingga saat ini, bentuk respon warga lebih variatif, baik dalam kaitannya dengan tuntutan dan kepentingan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, Kami menawarkan beberapa rekomendasi:

**Pertama**, berdasarkan temuan terdapat berbagai krisis sosial, ekonomi dan ekologi yang timbul akibat beroperasinya perusahaan smelter didalam kawasan industri Bantaeng. Karena itu, pemerintah daerah Bantaeng selaku pengelola kawasan sepatutnya lebih berpihak kepada warga yang terdampak oleh polusi pabrik smelter, baik pada soal kelayakan hidup warga yang masih berada di dalam KIBA, maupun warga yang terpapar polusi di luar kawasan.

**Kedua**, berdasarkan temuan didapati berbagai krisis yang muncul akibat beroperasinya perusahaan pengolahan nikel. Karena itu, pihak perusahaan yang tergabung dalam Huadi Group Investment agar memperhatikan dan bertanggung jawab atas penciptaan krisis lingkungan yang dialami oleh warga. Termasuk juga menerapkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam AMDAL. Selain itu, berbagai jenis pelanggaran hak pekerja juga menjadi temuan dalam laporan ini. Sehingga, pihak perusahaan perlu mengurangi tekanan kerja kepada pekerja pabrik, memperhatikan hak-hak dasar pekerja (terutama buruh perempuan) termasuk tidak melarang atau membatasi kehadiran serikat pekerja.

**Ketiga**, berdasarkan studi ini dan kajian-kajian kritis yang sudah ada sebelumnya. Dan juga menyadari potensi dari ekspansi perusahaan smelter ke Desa-Desa lainnya, sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuat suatu ruang belajar dan bertindak bagi warga yang terdampak untuk “mempersiapkan diri” atas rencana ekspansi perusahaan tersebut dengan membuat komunitas belajar dan bertindak di kampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Laporan

- Anam, S., & Ristiyani, R. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 217–236. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>
- Antaraneews.com. (2011). *Cuaca Berubah, Produksi Rumput Laut Turun*. <https://www.antaraneews.com/berita/241845/cuaca-berubah-produksi-rumput-laut-turun>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023. *Sensus Pertanian*, 28.
- Balang Institut & JATAM. (2023). *Daya Rusak Industri Pengolahan Nikel di Bantaeng*.
- Bersntein, H. (2019). *Dinamika Kelas dan Perubahan Agraria* (Revisi). INSISTPress.
- CREA, & CELIOS. (2024). *Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel*.
- Firdaus Naufal. (2020). Review: Proses Pemurnian Bijih Nikel Laterit Secara Pirometalurgi. *Review: Proses Pemurnian Bijih Nikel Laterit Secara Pirometalurgi*, 1–94.
- Huadi.co.id. (n.d.). *Presentase Tenaga Kerja Huadi Group: 75% Dominasi Tenaga Kerja Lokal*. <https://huadi.co.id/presentase-tenaga-kerja-huadi-group-75-dominasi-tenaga-kerja-lokal/>
- Indrayani, S., Hadijah, & Indrawati, E. (2021). *Potensi Budidaya Rumput Laut Studi Perairan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*.
- Muttar, M., Hamzah, D. R., Syam, M. I., Alamsyah, A., & Utaminingsih, N. (2021). Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto. *Vox Populi*, 4(1), 48. <https://doi.org/10.24252/vp.v4i1.21838>
- Nirwana. (2023). Organisasi Pagar Desa (Opd) Di Bantaeng Pada Tahun 1955-1960. In *Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Prasetyo, A., Suarez, I., Parapat, J., & Amali, Z. (2023). Ambiguitas versus Ambisi: Tinjauan Kebijakan Transisi Energi Indonesia. *CREA & Trend Asia*, 39. [https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/03/CREA\\_Trend-Asia\\_ID\\_Ambiguitas-versus-Ambisi.pdf](https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/03/CREA_Trend-Asia_ID_Ambiguitas-versus-Ambisi.pdf)
- Pratama Ady Anugrah, & Haidir, Mu. (2023). Bertaruh pada Smelter - Laporan Riset Aksi Partisipatif Terkait Smelter di Kawasan Industri Bantaeng. In *Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Trend Asia*. Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Trend Asia.
- Rakhmat, M. Z., & Yeta, P. (2023). *Polemik Investasi China di Indonesia: Menghindari Investasi Berkualitas Rendah dan Jebakan Utang*. 1–36. <https://celios.co.id/2023/policy-paper-polemik-china-menghindari-investasi-berkualitas-rendah-dan-jebakan-utang/>

- Riedho, M. R. Z. (2024). Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 20(1), 74–95. <https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7156.74-95>
- Riyanto, G., Adiyaksa, R., & Larastiti, S. (2024). *Pergulatan Transisi Energi Berkeadilan: Satu Isu Beragam Dilema*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Wibawa, A., & Achdiyana, I. (2024). Peran Negara G20 dalam Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(3), 271–290. <https://doi.org/10.22146/jkn.88751>
- Saraswati, N. M. V. (2020). Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 55–72. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.72>
- Shalati, S. N., & Simanjuntak, J. (2019). *Kajian Investasi Tiongkok di Sektor Pembangkit Listrik Batubara Indonesia*. <http://aeer.info>
- Syafaat, A. R., Walhiswandi, M., Riadi, S., & Gaffar, N. F. (2023). *Dampak Energi Kotor di Jeneponto*. July.
- Team Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. (2021). Grand Strategy Mineral dan Batubara. *Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*, 1–435.
- Zuhri, A., Said, A., Marewa, B., Anwar, H., & Sain, S. (2023). *Teroka KIBA, Harapan Dari Selatan*.

### **Berita dan Website**

- Antara (2013). “KPU Bantaeng Tetapkan Nurdin-Yasin Pemenang”, <https://makassar.antarane.ws.com/berita/46650/kpu-bantaeng-tetapkan-nurdin-yasin-pemenang>. Diakses pada 24 Agustus 2024.
- Antarane.ws (2011). “Cuaca Berubah, Produksi Rumput Laut Turun”, <https://www.antarane.ws.com/berita/241845/cuaca-berubah-produksi-rumput-laut-turun>. Diakses pada 30 Agustus 2024.
- Beritasatu.com (2012). “Bosowa Siap Bangun PLTU Jeneponto II Senilai Rp 3,1 T”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/65459/bosowa-siap-bangun-pltu-jenepon-to-ii-senilai-rp-3-1-t> Diakses pada 25 Agustus 2024.
- Betahita.id (2023). “Liputan khusus: Koalisi LSM Desak Evaluasi Kawasan Industri Nikel Bantaeng”, <https://betahita.id/news/lipsus/8739/koalisi-lsm-desak-evaluasi-kawasan-industri-nikel-bantaeng-.html?v=1683685826>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Chinadailyhk.com (2023). “BRI paving the way for a community of shared future”, <https://www.chinadailyhk.com/hk/article/361050>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Rusdianto, E. (2019). “Menilik Pabrik Smelter Nikel di Bantaeng”. <https://www.mongabay.co.id/2019/04/30/menilik-pabrik-smelter-nikel-di-bantaeng/>. Diakses pada 24 Agustus 2024



- Esdm.go.id (2020). "Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Halilintarnews.id (2021). "KAPEKA Akan Tempuh Jalur Hukum PHI, Tuntut PT.Huadi Nickel Alloy Ada Apa", <https://halilintarnews.id/2021/03/05/kapeka-akan-tempuh-jalur-hukum-phi-tuntut-pt-huadi-nickel-alloy-ada-apa/>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Huadi.co.id. "Presentase Tenaga Kerja Huadi Group: 75% Dominasi Tenaga Kerja Lokal", <https://huadi.co.id/presentase-tenaga-kerja-huadi-group-75-dominasi-tenaga-kerja-lokal/>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Indonesian.cri.cn (2018). "Takalar PLTU Officially Operates", <https://indonesian.cri.cn/201/2018/02/21/222s170619.htm>. Diakses pada 20 Agustus 2024
- Jatam.org (2023). "JETP Indonesia: Kemitraan Eksploitatif untuk Jawaban yang Keliru atas Krisis Iklim", <https://jatam.org/id/lengkap.php?slug=jetp-indonesia-kemitraan-eksploitatif-untuk-jawaban-yang-keliru-atas-krisis-iklim>. Diakses pada 21 Agustus 2024
- Jatam.org (2024). "Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi", <https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Kompas.id (2019). "Pengolahan Nikel Beroperasi di Bantaeng", <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/27/pengolahan-nikel-beroperasi-di-bantaeng>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Kumparan.com (2021). "Belt and Road Initiative di Indonesia: Perkembangan, Kritik, dan Alternatif", <https://kumparan.com/introvert-note/belt-and-road-initiative-di-indonesia-perkembangan-kritik-dan-alternatif-1vRtw7nbzLo/4>. Diakses pada 20 September 2024
- Liputan6.com (2014). "Perusahaan Gabungan 3 Negara Mulai Bangun PLTU di Bantaeng", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2120112/perusahaan-gabungan-3-negara-mulai-bangun-pltu-di-bantaeng>. Diakses pada 21 Agustus 2024
- Makassar.tribunnews.com (2021). "Penuhi Tuntutan Pengunjuk Rasa, PT Huadi Siap Pekerjakaan Warga Papan Loe Tanpa Seleksi", <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/21/penuhi-tuntutan-pengunjuk-rasa-pt-huadi-siap-pekerjakaan-warga-papan-loe-tanpa-seleksi?page=1>. Diakses pada 2 September 2024
- Sulsel.bps.go.id (2024). "Jumlah Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023", <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkwMyMy/jumlah-pekerja-menurut-sektor-dan-kabupaten-kota.html>. Diakses pada 23 Agustus 2024
- Sulselprov.org.id (2024) "Deskripsi Daerah Kabupaten Bantaeng", [https://sulselprov.go.id/kota/des\\_kab/1](https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/1). Diakses pada 23 Agustus 2024

- Tempo.co (2014) “Kabupaten Bantaeng Siap Jadi Daerah Industri”, <https://bisnis.tempo.co/read/562302/kabupaten-bantaeng-siap-jadi-daerah-industri>. Diakses pada 20 Agustus 2024
- Tempo.co (2024). “Dua Teknologi Smelter Nikel di Indonesia, Mana yang Lebih Ramah Lingkungan?”, <https://tekno.tempo.co/read/1835159/dua-teknologi-smelter-nikel-di-indonesia-mana-yang-lebih-ramah-lingkungan>. Diakses pada 24 Agustus 2024
- Tempo.co. (2014). “*Kabupaten Bantaeng Siap Jadi Daerah Industri*”, <https://bisnis.tempo.co/read/562302/kabupaten-bantaeng-siap-jadi-daerah-industri>. Diakses pada 2 Agustus 2024
- Trendasia.org (2023). “Pernyataan Sikap Koalisi Advokasi KIBA”, <https://trendasia.org/pernyataan-sikap-koalisi-advokasi-kiba/>. Diakses pada 24 September 2024

Studi ini merupakan hasil belajar lapang tentang ekonomi politik korporasi energi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Industri utama yang beroperasi adalah industri pengolahan nikel atau Smelter. Sebagai suatu studi belajar permulaan, kajian lapangan yang dikombinasikan dengan studi literatur ini berupaya memahami bagaimana kegelisahan warga setelah Kawasan Industri Bantaeng beroperasi. Banyak letupan kemarahan dan penyesalan yang kami dengar dari warga sekitar KIBA. Warga marah karena polusi sangat parah, menyesal karena dipaksa melepas tanah untuk perusahaan.

Studi ini juga melihat pola perampasan tanah dan pengaruh struktur sosial agraria lama terhadap pembebasan tanah untuk KIBA dan untuk korporasi Huadi Group; mempelajari sedalam apa krisis sosial ekologi yang muncul sebagai dampak atas polusi air, udara, suara bagi warga dan lingkungannya; dan juga menyelidiki isu perburuhan dari situasi dan pembagian kerja, pengupahan, pola perekrutan hingga kondisi kerja para buruh.